Bulletin of Monetary Economics and Banking

Volume 3 | Number 2 Article 5

9-30-2000

BASELINE SURVEY MENGENAI KONDISI INTERNAL, PERSAINGAN DAN SISTEM PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH DI JAWA TIMUR

Djoko Sutrisno

Tjahjono Mohamad Amin

Johny Marsius

Follow this and additional works at: https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb

Recommended Citation
Sutrisno, Djoko; Amin, Tjahjono Mohamad; and Marsius, Johny (2000) "BASELINE SURVEY MENGENAI KONDISI INTERNAL, PERSAINGAN DAN SISTEM PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH DI JAWA TIMUR," *Bulletin of Monetary Economics and Banking*: Vol. 3: No. 2, Article 5.
DOI: https://doi.org/10.21098/bemp.v3i2.292
Available at: https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5

This Article is brought to you for free and open access by Bulletin of Monetary Economics and Banking. It has been accepted for inclusion in Bulletin of Monetary Economics and Banking by an authorized editor of Bulletin of Monetary Economics and Banking. For more information, please contact bmebjournal@gmail.com.

BASELINE SURVEY MENGENAI KONDISI INTERNAL, PERSAINGAN DAN SISTEM PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH DI JAWA TIMUR

Djoko Sutrisno, Tjahjono
Mohamad Amin, Johny Marsius[*)]

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Keberadaan lembaga keuangan mikro dalam perekonomian Indonesia, sebagaimana juga di negara-negara berkembang lainnya, cukup penting karena selama ini lembaga-lembaga keuangan mikro tersebut (termasuk Bank Perkreditan Rakyat) sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat kecil dan menengah. Walaupun kontribusinya terhadap volume kegiatan perbankan secara nasional kurang siqnifikan, namun dilihat dari luasnya transaksi yang dilakukan peranan lembaga keuangan mikro, sebagai mesin penggerak roda perekonomian di daerah-daerah khususnya daerah terpencil tidak diragukan.

Sejak dikeluarkannya Paket kebijaksanaan 28 Oktober 1988 yang lebih dikenal dengan Pakto 1988, peluang untuk membuka Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang semula tertutup sama sekali menjadi terbuka lebar. Selain dibuka BPR-BPR baru, lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya yang telah tumbuh dan berkembang dari lingkungan masyarakat masih diperlukan, seperti Lembaga Dana Kredit Pedesaan dengan singkatan LDKP, LDP di Bali dan Badan Kredit Desa (BKD) keberadaanya masih tetap dibutuhkan. Dengan Peraturan Pemerintah telah ditetapkan persyaratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud untuk menjadi BPR. LDKP dengan UU perbankan 1992 diharapkan menjadi BPR dengan batas waktu selambat-lambatnya akhir Oktober 1997. Namun hanya sedikit yang dapat memenuhi persyaratan menjadi BPR, terutama untuk memenuhi persyaratan pemenuhan jumlah modal disetor yang ditetapkan minimal sebesar Rp. 50 juta. Bagi lembaga keuangan mikro yang belum berhasil menjadi BPR, tetap dapat melakukan kegiatan seperti semula, namun tidak termasuk sebagai bank.

Lima tahun sejak diluncurkannya Pakto 88 (Oktober 1988), jumlah BPR meningkat sangat drastis yaitu dari 432 menjadi 2.420 BPR pada akhir September 1999 atau meningkat 460%. Pakto 88 telah mendorong BPR untuk tidak beroperasi di Ibukota negara, ibu kota provinsi dan kabupaten, melainkan di daerah-daerah pedesaan.

---

* Peneliti Kantor Bank Indonesia Surabaya

Rata-rata BPR mempunyai asset Rp.1,3 milyar, dan apabila dikelompokkan dari nominal asset yang dimiliki maka diperoleh gambaran 441 BPR mempunyai asset Rp.1 milyar. Menyadari jumlah BPR yang begitu banyak telah menjadi beban yang berat bagi pengawasan Bank Indonesia, maka tambahan pembukaan BPR baru perlu dibatasi. Di samping tetap berupaya untuk meningkatkan BPR-BPR yang sudah ada menjadi lebih kuat dan sehat. Oleh karena itu sejak bulan Mei 1999 dikeluarkan peraturan baru yang mengatur jumlah minimal modal disetor BPR baru yang beroperasi di Jakarta dan sekitarnya minimal Rp.2 milyar untuk yang beroperasi di ibukota provinsi minimal Rp.1 milyar, dan untuk daerah lainnya minimal Rp.500 juta. Sampai saat ini, 14,7% dari BPR mempunyai tingkat kesehatan **K**urang **S**ehat, 28,1% **T**idak **S**ehat. Dengan prosentase 43% (1040 BPR) dari jumlah BPR yang beroperasi di Indonesia mempunyai tingkat kesehatan non sehat adalah merupakan hal yang tidak menguntungkan dan perlu diupayakan bagaimana meningkatkan kesehatan mereka menjadi lebih baik.

Berkembangnya suatu lembaga keuangan mikro selain dari kondisi internal dan kinerja yang baik dari lembaga tersebut, juga tersedianya suasana yang kondusif yang memungkinkan lembaga keuangan berkembang secara wajar. Suasana kondusif ini merupakan perpaduan antara keadaan ekonomi, politik dan keamanan yang baik dan peraturan terkait yang menunjang.

Sejak tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 tentang perbankan, mulai dikenal bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah / Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah sejak diberlakukannya UU tersebut mulai berkembang, hingga saat ini di seluruh Indonesia baru ada 2 bank umum syariah dan 3 bank umum yang membuka kantor cabang syariah serta 79 BPR syariah (6 BPR syariah beroperasi di Jawa Timur). Tingkat kesehatan BPR syariah yang beroperasi di Jatim per posisi Desember 1999, 4 BPRS yang mempunyai tingkat kesehatan **S**ehat, 1 BPRS **C**ukup **S**ehat, dan 1 BPRS **K**urang **S**ehat.

Dalam baseline survey terdahulu (bulan Juni 2000 hasil kerja sama GTZ, BI, dan Perbarindo) BPRS dikeluarkan dari sampel karena sistem operasional BPRS berbeda dibandingkan dengan konvensional, di samping itu jumlah dan volume usahanya sangat kecil sedikit jika dibanding BPR konvensional. Dengan pertimbangan bahwa warna agama Islam dalam tatanan sosial penduduk Jawa Timur lebih menonjol dibandingkan penduduk propinsi lain, maka BPRS yang memiliki sistem spesifik dibandingkan BPR konvensional seperti tidak menggunakan sistem bunga (dhi bagi hasil), dan menghindari kegiatan spekulasi yang tidak produktif, maka survei mengenai BPRS menarik untuk dilakukan. Dari hasil survey ini diharapkan dapat menambah khasanah perbendaharaan pengetahuan kita dalam mengembangkan perbankan di Jatim khususnya dan BPR pada umumnya secara nasional.

1.2. Tujuan Survey

Tujuan umum survey ini adalah untuk mengetahui keadaan kondisi internal, dan tingkat persaingan serta sistem pengawasan BPRS di wilayah kerja KBI surabaya. Informasi mengenai BPRS ini merupakan supplemen dalam pengawasan dan pembinaan BPR secara keseluruhan di Jawa Timur umumnya dan wilayah kerja KBI Surabaya pada khususnya.

1.3. Metodologi Penelitian

– *Cakupan penelitian*

Objek penelitian adalah BPRS yang beroperasi di Jawa Timur, dengan fokus pada kondisi internal, kinerjanya, tingkat persaingan serta pengawasan terhadap BPRS.

– *Data*

Data yang digunakan dalam survey ini berasal dari data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari literatur serta hasil baseline survey BPR Jatim, Bali dan NTB. Sedangkan data primer diperoleh langsung dari lapangan yakni dari semua BPRS yang ada di Jawa Timur (6 BPRS).

– *Kuesioner*

Konsep daftar pertanyaan BPRS dibuat oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan daftar kuesioner yang telah dibuat bersama-sama dengan GTZ, Universitas Airlanggadalam rangka survai BPR terdahulu dan masukan dari Asbisindo.

Daftar pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data primer terdiri dari tiga macam yaitu:

1. Kuesioner I berhubungan dengan informasi umum BPRS
2. Kuesioner II berhubungan dengan informasi kualitatif BPRS
3. Kuesioner III berhubungan dengan data keuangan dan lainnya yang dapat diperoleh dari Bank Indonesia.

– *Metode analisis*

Dalam menganalisis data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, mencakup kondisi internal, persaingan, dan pengawasan BPR. Klasifikasi dan indikator yang digunakan oleh konsultan GTZ-Profi dalam menulis laporan survey BPR konvensional sebagian besar diterapkan pula pada BPR syariah. Klasifikasi utama yang digunakan dalam analisis ada dua yakni ***"kelas asset"*** dan ***"kelas kinerja kredit"***. seperti dalam tabel sbb :

Kelas	Kelas Asset Rp.	Kelas Kinerja Kredit *Non Performing Loan* (NPL)
A	< Rp.500 juta	< 5%
B	Rp.500 s.d Rp.1 milyar	5 s.d 10%
C	Rp.1 s.d 5 milyar	10 s.d 25%
D	> Rp.5 milyar	> 25%

1.4. Organisasi Laporan

– Bagian pertama mengambarkan mengenai latar belakang, tujuan dan metodologi survey dan organisasi laporan.

– Bagian kedua menyajikan hasil dari penelitian khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan, organisasi dan manajemen, kondisi persaingan, pengawasan, perlindungan simpanan dan asosiasii BPRS, termasuk pelatihan-pelatihan yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas SDM BPR.

– Bagian akhir dari penulisan menyimpulkan temuan-temuan survey dan saran-saran.

Sebagai bahan perbandingan pada bagian lampiran laporan ini disertakan tabel-tabel yang memuat perbandingan angka-angka antara BPR dengan sistem syariah, (hasil survey BPR syariah Jatim) dengan BPR konvensional (hasil survey BPR konvensional di Jatim, Bali, NTB).

II. Sampel Survey

2.1. Lokasi, Tipe BPR dan Jangka Waktu Operasi

Di wilayah provinsi Jawa Timur terdapat 6 BPR syariah (BPRS) dan semuanya tergolong BPR gaya baru (didirikan setelah diberlakukannya Undang Undang No.7 tahun 1992) yang memungkinkan bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil, dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Jangka waktu operasi BPRS sampai saat ini rata-rata 4 tahun, hal ini dapat dimaklumi karena sistem syariah (sebelumnya dengan istilah bagi hasil) merupakan sistem operasional perbankan yang spesifik, yang secara yuridis baru dimungkinkan sejak berlaku undang-undang No.7 tahun 1992. Sebagian besar jangka waktu operasional BPRS berkisar antara 5 – 9 tahun, sedangkan satu BPRS merupakan hasil konversi dari BPR konvensional. (Tabel II.1).

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

2.2. Klasifikasi Asset

Jumlah asset BPRS di Jawa Timur per Desember 1999 rata-rata adalah Rp.1.240 juta, sedangkan BPR konvensional di Jawa Timur jumlah assetnya rata-rata sebesar Rp.1.726 juta (lihat tabel II.1). Jumlah asset rata-rata BPRS yang masih rendah disebabkan jangka waktu beroperasi yang relatif baru dan BPR yang beroperasi dengan sistem syariah belum begitu dikenal dikalangan masyakat luas. Jangka waktu beroperasi BPR ternyata sangat mempengaruhi besarnya jumlah asset suatu BPRS, hal ini tergambar pada jawaban para direktur BPRS mengenai tingkat persaingan yang akan diuraikan pada bahasan persaingan.

Tabel II.1 :
Klasifikasi BPR Syariah Di Jawa Timur

	B P R S
Jml BPRS	6
Tipe BPRS	
% BPR Sebelum Pakto 88	100,0
% BPR Setelah Pakto 88	0,0
% BPR Ex-LDKP	0,0
Status Hukum	
% Perusahaan Terbatas	100,0
% Perusahaan Daerah	0,0
% Koperasi	0,0
Tahun Beroperasi	
Rata2 beroperasi	4,0
% BPR 1 -3 tahun	17,0
% BPR 5 -9 tahun	83,0
% BPR 10 thn dan lebih	0,0
Asset[1]	
Rata2 (Rp. milyar)	1,2
% BPR < Rp.500 juta	50,0
% BPR Rp.500 - < 1 Milyar	0,0
% BPR Rp.1 - Rp.5 Milyar	50,0
% BPR > Rp.5 Milyar	0,0
% Portofolio kredit/Asset	
Prosentase	67,0
% BPR < 60%	50,0
% BPR > 85%	17,0
Rata-rata outstanding kredit	
Rata2 (Rp. juta)	1,6
% BPR < Rp 1 juta	33,0
% BPR > Rp.2 juta	17,0
% Kredit Non Lancar	
Rata2 (%)	18,0
% BPR < 10%	50,0
% BPR > 25%	17,0

Keterangan :
Angka prosentase BPRS nilai baris dibandingkan dengan total BPRS di Jatim

1 Seperti yang dijelaskan dalam BAB I (1.3) Kelas asset dibagi menjadi empat yakni; kelas A dgn asset < Rp.500 jt; kelas B dgn asset Rp.500 juta – Rp.1 milyar; Kelas C dgn asset Rp.1 – 5 milyar; kelas D dgn asset > 5 milyar.

Asset BPRS terutama ditanamkan dalam portofolio pembiayaan (atau kredit pada BPR konvensional), yang mencapai porsi 67% dari total asset. Portofolio pembiayaan BPRS di bawah 50% dan yang di atas 85%, masing-masing ada satu BPRS, khusus yang di bawah 50% adalah BPRS yang baru beroperasi satu tahun.

Apabila diambil secara rata-rata dari 6 BPRS, maka porsi pembiayaan terhadap total asset sebesar 64%. Sementara itu apabila dilihat dari "kinerja kredit", rata-rata prosentase kredit non lancar BPRS adalah 18% (lihat tabel II.2). Perbedaan NPL yang besar pada masing-masing BPRS menunjukkan perbedaan pola manajemen pada masing-masing BPRS. Rendahnya portofolio NPL juga dapat mengindikasikan bahwa BPRS yang *over-liquid* disebabkan sulitnya mendapatkan debitur yang layak, di lain pihak tingginya penempatan pembiayaan menyebabkan penyediaan modal, likuiditas dan resiko pembiayaan meningkat.

Table II.2 :
Variasi Asset, Portofolio Pembiayaan (kredit) dan Kualitas Aktiva Produktif

	B P R Syariah
Jumlah BPR	6
Jumlah Kantor	10
Asset *)	
Rata-rata Asset (Rp. Jutaan)	1.240
% BPR < Rp. 1 Milyar	50,0
% BPR > Rp. 5 Milyar	-
% BPR-LDKP < Rp.1 Milyar	-
Portofolio Kredit/Asset *)	
Rata-rata %	64
% BPR < 50%	17
% BPR > 85%	17
Rata2 kredit / rata2 asset (%)	67
Kredit Non performing *) [2]	
% Rata-rata	18
% BPR < 10%	50
% BPR > 25%	17

Keterangan :
***)** Dari rata-rata masing-masing individu BPRS

2 Seperti yang dijelaskan dalam BAB I (1.3) Kelas kinerja kredit dibagi menjadi empat yakni; kelas A dgn NPL < Rp.5%; kelas B dgn NPL 5% – 10%; Kelas C dgn NPL 10% – 25%; kelas D dgn NPL > 25 %

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

III. Kondisi Internal

Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian pertama membahas kondisi keuangan yang menguraikan mengenai struktur neraca dan laba rugi BPRS, berdasarkan besarnya asset dan kinerja perkreditannya. Dalam bagian kedua akan dibahas hal-hal yang berhubungan dengan organisasi dan manajemen, termasuk pelatihan-pelatihan yang diharapkan oleh BPRS dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen BPRS.

3.1. Kondisi Keuangan

3.1.1. Struktur Neraca dan Rugi Laba

Dalam membahas kondisi keuangan BPRS akan dianalisa struktur asset, hutang, pendapatan berikut struktur biaya yang didasarkan pada neraca dan laporan laba rugi BPRS (Desember 1999). *Istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan kondisi keuangan menggunakan istilah-istilah seperti dalam* ***pos laporan bulanan*** *BPR.*

3.1.1.1. Analisis Struktur Neraca

Analisis terhadap neraca dimungkinkan dapat terdeteksi masalah- masalah manajemen keuangan dan sumber-sumber inefisiensi pada BPRS. Tabel III.1 dan III.2 memperlihatkan kombinasi neraca baik dari kelas asset maupun kelas kinerja kedit, dengan catatan angka prosentase pada tabel tidak menyertakan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Pada tabel III.1 dapat diketahui bahwa struktur asset BPRS sebagian besar terdiri dari portofolio pembiayaan sebesar 67%, penempatan pada bank lain sebesar 26%, sedangkan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif masih belum memenuhi ketentuan.

Apabila kita lihat dari kelas asset ternyata dari 6 BPRS di Jatim termasuk dalam kelas A (kurang dari Rp.500 juta) sebanyak 3 BPRS dan kelas C (Rp.1 milyar s.d Rp.5 milyar) sebanyak 3 BPRS.

BPRS kelas asset C sebagian besar (70%) assetnya ditempatkan dalam bentuk pembiayaan, sedangkan BPRS kelas asset A hanya sebesar 51% dari total asset. BPRS kelas asset C menempatkan dananya pada bank lain (ABA) sebesar 28% dari total asset dan BPRS kelas asset A sebesar 10%.

Aktiva tetap bersih (aktiva tetap minus penyusutan) menyumbang kurang dari 5% dari total asset ada pada 4 BPRS, sedangkan 2 BPRS yang lain menempatkan lebih dari

Tabel III.1
Neraca Gabungan berdasarkan Kelas Asset

(dlm Rp. Juta)

Uraian	Asset Class		Total
	A	C	BPR Syariah
Jml BPRS	3	3	6
ASSETS			
Kas	25,9	37,9	63,8
ABA/BI	93,5	1.813,4	1.906,9
Portofolio kredit	488,3	4.526,0	5.014,3
Lancar(%)	83,7	92,2	88,0
Kurang Lancar (%)	4,4	3,2	3,8
Diragukan (%)	11,3	4,4	7,9
Macet (%)	0,7	0,2	0,5
(-) PPAP	(9,3)	(152,5)	(161,8)
Asset Tetap	151,4	180,2	331,6
(-) Penyusutan	(30,1)	(100,4)	(130,6)
Asset lainnya	245,7	170,0	415,8
TOTAL ASSETS	965,4	6.474,6	7.439,9
HUTANG/LIABILITIES			
Hutang Lancar	2,6	25,1	27,6
Tabungan	260,2	1.869,2	2.129,4
Deposito	116,8	1.830,4	1.947,2
ABP/BI/kredit	12,1	1.127,0	1.139,0
Kewajiban lainnya	6,2	57,4	63,6
EQUITY			
Modal disetor	619,5	921,8	1.541,3
Modal Lainnya	16,8	98,6	115,4
Cadangan	0,0	185,0	185,0
LABA/RUGI			
Akumulasi	(50,8)	21,1	(29,7)
Thn berjalan	(18,0)	339,1	321,1
TOTAL PASIVA	965,4	6.474,6	7.439,9
Kas/Asset	3%	1%	1%
ABA&BI /Asset	10%	28%	26%
Kredit/Asset	51%	70%	67%
Akt.tetap/Asset	13%	1%	3%
Tab/Passiva	27%	29%	29%
Dep/Passiva	12%	28%	26%
Mdl dstr/Pass	64%	14%	21%
LR/Passiva	-7%	6%	4%

Keterangan:
A: < Rp. 500 juta, C: Rp. 1M - Rp.5 M

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

10%. Aktiva tetap bersih pada BPRS kelas A lebih tinggi (13%) dibandingkan dengan BPRS kelas C (1,2%), hal ini disebabkan BPRS kelas A relatif baru didirikan.

Apabila dilihat dari sisi passiva struktur liabilities (*kewajiban*) BPRS tidak terlalu didominasi oleh dana dari pihak ketiga. Deposito menyumbang sebesar 26% dari seluruh kewajiban dan equity (passiva) dan tabungan menyumbang sekitar 29%[3)]. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum banyak tahu tentang praktek perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil. Masyarakat belum terdorong untuk menyimpan uangnya pada BPRS, karena lebih tertarik dan terbiasa kepada BPR konvensional yang menawarkan sistem bunga. Nampaknya BPR dengan sistem syariah masih harus lebih gencar melakukan promosi agar lebih dikenal masyarakat sebagai salah satu alternatif penyimpan uang.

Apabila dilihat dari kelas asset, sumber dana BPRS kelas C terdiri dari deposito sebesar 28%, tabungan sebesar 29% dan modal disetor sebesar 14%. BPRS kelas asset A[2)]sumber dananya lebih banyak dari modal disetor dengan sumbangan tabungan sebesar 27%, deposito sebesar 12% dan modal disetor sebesar 64%. Hal ini mengindikasikan bahwa BPRS kelas asset A masih mengalami kesulitan menghimpun dana dari masyarakat karena masih relatif baru.

Apabila dilihat dari kinerja kredit (tabel III.2) ternyata tidak ada pola hubungan yang jelas antara struktur asset BPRS dengan kinerja kredit. Struktur asset (aktiva) pada BPRS berkinerja kredit paling baik (kelas A) dengan BPRS berkinerja baik (B) berbeda secara signifikan. BPRS kelas kinerja kredit A menginvestasikan sebesar 82% dari total assetnya dalam bentuk pembiayaan dan sebesar 9% dalam bentuk penempatan pada bank lain, sedangkan BPRS kelas kinerja kredit B penempatan dalam pembiayaan mencapai 71% dan dalam bentuk penempatan pada bank lain sebesar 25%.

Pada BPRS kelas kinerja kredit D menempatkan dananya dalam bentuk pembiayaan sebesar 50% dan dalam bentuk antar bank sebesar 13%. Sebagian besar BPRS pada kelas kinerja kredit C adalah BPRS besar, menempatkan dananya dalam bentuk pembiayaan sebesar 56% dan dalam bentuk penempatan antar bank sebesar 38%.

BPRS yang portofolio kreditnya kurang dari 60% diindikasikan bahwa BPRS yang bersangkutan sulit menemukan peminjam yang layak dan tingkat resiko yang tinggi menyebabkan portofolio pembiayaan rendah karena mereka sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Yang masuk dalam kriteria ini adalah BPRS kelas kinerja kredit C dan D. Dari klasifikasi kinerja kredit terlihat bahwa semakin besar jumlah pembiayaan semakin kecil NPL BPRS yang bersangkutan.

---

3) Pada BPR konvensional porsi tabungan sebesar 20% dan porsi deposito 56%

Tabel III.2
Neraca Gabungan berdasarkan kinerja kredit

(dlm Juta)

I t e m s	Kelas kinerja kredit				Total
	A BPRS.	B BPRS.	C BPRS.	D BPRS.	BPRS.
Jml BPRS	2	1	2	1	6
ASSETS					
Kas	9,4	20,2	23,4	10,6	63,8
ABA/BI	210,5	373,6	1.307,8	15,0	1.906,9
Fotofolio kredit	1.995,7	1.048,5	1.913,6	56,4	5.014,3
Lancar (%)	99,8	93,5	83,3	32,1	77,2
KL (%)	0,2	4,0	5,9	11,0	5,3
D (%)	0,0	2,1	10,7	51,3	16,0
Macet (%)	0,0	0,4	0,3	5,7	1,6
(-) PPAP	(112,2)	(16,3)	(32,7)	(0,6)	(161,8)
Asset Tetap	115,0	37,3	157,2	22,1	331,6
(-) Penyusutn	(10,4)	(16,0)	(93,7)	(10,5)	(130,6)
Asset lainnya	219,5	19,4	158,0	18,8	415,8
TTL ASSETS	2.427,5	1.466,8	3.433,8	111,9	7.439,9
LIABILITIES					
Htg Lancar	6,5	0,7	20,5	0,0	27,6
Tabungan	895,9	207,3	975,3	50,9	2.129,4
Deposito	501,8	343,0	1.101,7	0,8	1.947,2
ABA/BI/loans	341,3	685,7	100,0	12,1	1.139,0
Kewajiban lainnya	29,9	21,3	10,3	2,1	63,6
EQUITY					
Modal disetor	577,9	155,0	714,6	93,7	1.541,3
Modal Lainnya	0,0	0,0	113,6	1,8	115,4
Cadangan	25,7	0,0	159,3	0,0	185,0
LABA/RUGI					
Akumulasi	0,0	21,1	(0,3)	(50,5)	(29,7)
Thn berjalan	48,6	32,8	238,8	0,9	321,1
LIABILITIES & EQUITY	2.427,5	1.466,8	3.433,8	111,9	7.439,9
Kas/Asset	0%	1%	1%	10%	1%
ABA&BI /Asset	9%	25%	38%	13%	26%
Kredit/Asset	82%	71%	56%	50%	67%
Akt.tetap/Asset	4%	1%	2%	10%	3%
ABP/Passiva	14%	47%	3%	11%	15%
Tab/Passiva	37%	14%	28%	46%	29%
Dep/Passiva	21%	23%	32%	1%	26%
Mdl dstr/Pass	24%	11%	21%	84%	21%
LR/Passiva	3%	4%	7%	-108%	3,9%

Kredit non lancar: A: <5 %, B: 5 -< l0%, C: 10 – 25%, D: > 25%

Dari sisi passiva, sumber dana BPRS dengan kinerja paling baik (kelas kinerja kredit A) antara deposito dan modal disetor relatif berimbang masing-masing 21% berbanding 24%, sedangkan BPRS dengan kinerja paling buruk (kelas kinerja kredit D) sumber pendanaan yang berasal dari deposito tidak berperan sama sekali (hanya 1%), dan hampir seluruhnya berasal dari modal disetor (84%).

BPRS dengan kinerja baik memperoleh laba 3% dari total asset (ROA) dan BPRS dengan kinerja buruk ROAnya (-) 44%. Struktur sumber dana pada BPRS kelas kinerja B adalah 23% deposito, 14% tabungan, 11% equity, dan 4% laba. Struktur sumber dana BPRS kelas kinerja C adalah 32% deposito, 28% tabungan, 21% equity, dan 7% laba.

Seperti juga kecenderungan pada sisi aktiva bahwa semakin besar jumlah pembiayaan semakin kecil NPLnya, maka pada sisi passiva terlihat semakin besar dana pihak ketiga, maka semakin baik kondisi NPL BPRS yang bersangkutan. Keadaan tersebut mengambarkan bahwa semakin besar total aktiva bank berarti bank tersebut semakin dipercaya oleh masyarakat karena kinerja bank tersebut baik.

Gambar 1
Struktur Neraca Rata-Rata BPR Syariah

Kelas Asset A			
Pos Nrc	Nilai	Pos Nrc	Nilai
Kas	4%	Tb & Dp	40%
ABA	11%	ABP/BI	4%
Pembiayaan	54%	Equity	37%
		Profit	-16,0%

Kelas Kinerja Kredit A			
Pos Nrc	Nilai	Pos Nrc	Nilai
Kas	1%	Tb & Dp	52%
ABA	8%	ABP/BI	9%
Pembiayaan	62%	Equity	38%
		Profit	5%*)

Kelas Asset C			
Pos Nrc	Nilai	Pos Nrc	Nilai
Kas	1%	Tab & Dep	54%
ABA	25%	ABP/BI	23%
Pembiayaan	73%	Equity	22%
		Profit	5%

Kelas Kinerja Kredit B			
Pos Nrc	Nilai	Pos Nrc	Nilai
Kas	1%	Tab & Dep	38%
ABA	25%	ABP/BI	47%
Pembiayaan	71%	Equity	14%
		Profit	4%

Kelas Kinerja Kredit C			
Pos Nrc	Nilai	Pos Nrc	Nilai
Kas	2%	Tab & Dep	49%
ABA	26%	ABP/BI	2%
Pembiayaan	68%	Equity	23%
		Profit	6%

BPRS di Jatim			
Pos Nrc	Nilai	Pos Nrc	Nilai
Kas	3%	Tab & Dep	47%
ABA	18%	ABP/BI	13%
Pembiayaan	64%	Equity	30%
		Profit	3%**)

Kelas Kinerja Kredit D			
Pos Nrc	Nilai	Pos Nrc	Nilai
Kas	10%	Tab & Dep	46%
ABA	13%	ABP/BI	11%
Pembiayaan	50%	Equity	41%
		Profit	–44%

*) BPR syariah hasil konversi dan beroperasi kurang dari 1 tahun dikeluarkan dari perhitungan
**) BPR syariah yang mengalami masalah struktural dikeluarkan dari perhitungan

Gambar 1 menyajikan struktur neraca berdasarkan **"kelas asset"** dan **"kinerja kredit"**. Untuk menghindari hilangnya informasi jika neraca digabungkan, prosentase tidak didasarkan pada angka absolut tetapi diwakili oleh porsi rata-rata setiap neraca BPRS.

Struktur asset BPRS di Jatim secara rata-rata di sisi aktiva terdiri dari; 64% dalam bentuk pembiayaan, 18% dalam bentuk antar bank aktiva, dan 3% dalam bentuk tunai dan selebihnya berupa aktiva tetap dan asset lainnya. Sedangkan dari sisi pasiva terdiri dari tabungan dan deposito sebesar 47%, pinjaman antar bank sebesar 13% dan equity 30%, serta laba ditahan sebesar 3%.

Sebagaimana terlihat pada gambar 1 struktur neraca berdasarkan kelas asset berbeda dengan kelas kinerja kredit. Dilihat dari kelas asset struktur neraca rata-rata tercermin semakin besar asset BPRS semakin besar porsi portofolio pembiayaan dan ABA, begitu juga ketergantungnya pada dana pihak ketiga dan ABP/BI, namun porsi equity menurun. Bila diamati melalui kelas kinerja kredit pada BPRS tercermin bahwa semakin baik kinerja kreditnya maka semakin kecil prosentase penempatan dana antar bank. BPRS dengan kinerja paling baik (A) prosentase rata-rata penempatan dana antar banknya sebesar 8%, untuk kelas B dan C porsinya di atas 20%. Begitu juga uang tunai, semakin baik kinerja kreditnya semakin kecil porsi uang tunainya. Seluruh BPRS kecuali kelas kredit D porsi pembiayaan rata-rata di atas 60%.

Apabila dilihat dari sisi passiva yang paling menonjol adalah dana pihak ketiga (46% s.d 52%) dan equity (23% s.d 41%), kecuali BPRS kelas B dimana yang paling besar justru pinjaman dari BI yaitu sebesar 47%.

BPRS dengan kelas kinerja paling buruk menderita kerugian –44% dari total passiva, sedangkan yang lain mengalami keuntungan antara 4% s.d 6%.

3.1.1.2. Analisis Struktur Laba Rugi

Analisis terhadap laporan laba rugi dilakukan dengan cara melihat aspek-aspek sumber pendapatan dan pengeluaran biaya. Pendapatan BPRS terutama berasal dari pendapatan kegiatan pembiayaan yang disalurkan yakni 88% dari total pendapatan. Biaya operasional mencapai 99 %, dan biaya non operasional sebesar 1% masing-masing dari total biaya. Biaya paling banyak yang dikeluarkan oleh BPRS adalah biaya penghimpunan dana yakni sebesar 28% dari total biaya. Tabel III.3 dan tabel III.4 menggambarkan kombinasi laporan laba rugi berdasarkan kelas asset dan kinerja kredit.

Apabila dilihat dari kelas asset BPRS, maka dapat digambarkan sebagai berikut (lihat tabel III.3):

Tabel III.3 :
Laporan Laba Rugi berdasarkan Kelas Asset

(Rp Juta)

Uraian	Asset Class		Total
	A BPR Sy	C BPR Sy	BPR Sy
Jumlah BPR	3	3	6
INCOME			
Bunga bank	26,3	125,9	152,2
Pdptn kredit	99,0	1.418,2	1.517,3
Pdptn oprs. Lainnya	0,8	17,2	18,0
Pdptn oprs. total	130,8	1.561,4	1692,
Pdptn non oprs.	22,9	7,8	30,7
TOTAL INCOME	153,7	1.569,2	1.722,9
BIAYA			
Bga u/ BI/bank lain	0,0	212,6	212,6
Bunga kpd nasabah	25,0	363,1	388,1
Biaya pegawai	71,8	298,5	370,3
Penghapusan	30,5	160,1	190,5
Biaya oprs. Lainnya	32,2	171,3	203,5
Biaya oprs. Total	159,4	1.205,6	1.365,1
Biaya non oprsl.	10,2	4,6	14,8
TOTAL BIAYA	169,7	1.210,2	1.379.8
LABA/RUGI			
Sblm pajak	(16,0)	358,9	34,0
Setelah pajak	(18,0)	355,5	325,9
Bunga bank	18%	8%	9%
Pedapatan kredit	66%	90%	88%
Pendaptan oprs lain	1%	1%	1%
Pdptn non Opsr.	15%	0%	2%
Bunga ke BI/Bank	0%	18%	15%
Bunga kpd nasabah	15%	30%	28%
Bya. Pegawai	42%	25%	27%
Penghapusan	18%	13%	14%
Biaya oprs. Lainnya	19%	14%	15%
Total Biaya	94%	100%	99%
Biaya Non Oprs.	6%	0%	1%

A: < Rp. 500 juta, C: Rp. 1M - Rp.5 M,

a. Pendapatan dari pembiayaan (kredit) BPRS kelas asset A sebesar 66% dari total pendapatannya, sedangkan pendapatan dari penempatan dana antar bank 18%. Sementara itu, pendapatan dari pembiayaan (kredit) BPRS kelas asset C sebesar 90% dari total pendapatannya, sedangkan pendapatan dari penempatan dana antar bank sebesar 8%.

Tabel III.4 :
Laporan Laba Rugi berdasarkan Kelas Kinerja Kredit

(Rp Juta)

Uraian	Kinerja kredit				Total
	A	B	C	D	
Jumlah BPR	2	1	2	1	6
PENDAPATAN					
Bunga bank	15,1	5,0	132,1	0,0	152,2
Pdptn kredit	570,5	255,9	677,3	13,6	.517,3
Pdptn opsl lain	2,0	15,3	0,7	0,0	18,0
Ttl pdptn oprsl	592,3	276,2	810,1	13,6	.692,2
Ttl pdpt non oprs	0,0	0,0	12,5	18,3	30,7
PENDAPATAN TOTAL	592,3	276,2	822,6	31,8	1.722,9
BIAYA					
Bunga kpd BI/bank	85,0	78,7	49,0	0,0	212,6
Bunga kpd Nasabah	156,2	54,5	174,7	2,6	388,1
Biaya pegawai	104,9	49,2	199,0	17,2	370,3
Penghapusan	103,2	20,6	61,7	5,1	190,5
Bya oprsl lainnya	74,9	37,0	87,1	4,5	203,5
Total biaya Operasional	524,2	240,0	571,5	29,4	1.365,1
Biaya non Operasional	3,0	0,0	10,3	1,5	14,8
BIAYA TOTAL	527,2	240,0	581,8	30,9	1.379,9
LABA/RUGI					
Sebelum pajak	65,0	36,2	240,8	0,9	343,0
Setelah pajak	65,0	21,1	238,8	0,9	325,9
Bunga bank	3%	2%	16%	0%	9%
Pedapatan kredit	97%	93%	82%	43%	88%
Pendaptan oprs lain	0%	6%	0%	0%	1%
Pdptn non Opsr.	0%	0%	2%	57%	2%
Bunga ke BI/Bank	16%	33%	8%	0%	15%
Bunga kpd nasabah	30%	23%	30%	8%	28%
Bya. Pegawai	20%	20%	34%	56%	27%
Penghapusan	20%	9%	11%	16%	14%
Biaya oprs. Lainnya	14%	15%	15%	15%	15%
Total Biaya	99%	100%	98%	95%	99%
Biaya Non Oprs.	1%	0%	2%	5%	1%

Kredit non lancar: A: <5 %, B: 5 -< l0%, C: 10 - 25%, D: > 25%

b. Pada kelas asset A porsi biaya untuk pegawai paling dominan (42%) dibandingkan biaya-biaya lainnya, sementara biaya dana hanya 15%. Pada kelas asset C porsi pengeluaran biaya yang dominan adalah biaya dana (30%), sementara biaya operasional lainnya hanya 15%.

c. Struktur biaya tergantung pada skala operasi BPRS yang bersangkutan dan seberapa luas nasabah yang dilayaninya. Semakin besar volume usaha BPRS maka semakin efisien.

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Mereka mengeluarkan biaya pegawai hanya sebesar 25% dari total biaya dan biaya operasional lainnya sebesar 14%, sedangkan BPRS kecil (A) mengeluarkan biaya pegawai sebesar 42% dari total biaya dan biaya operasional lainnya sebesar 19%.

Apabila dilihat dari kelas kinerja kredit BPRS maka dapat digambarkan sebagai berikut (lihat tabel III.4):

a. Pendapatan dari pembiayaan (kredit) berperanan dominan pada masing-masing kelas kinerja kredit. Hal ini dapat dimaklumi karena kegiatan pokok bank adalah pelaksanaan pembiayaan. Pendapatan dari pembiayaan pada BPRS kelas kinerja kredit paling baik (A) sebesar 97% dari total pendapatan sedangkan kelas kinerja kredit paling buruk sebesar 43%.

b. BPRS dengan kinerja kredit paling baik (A) mengeluarkan biaya penghimpunan dana sebesar 30% dari total biaya, sedangkan BPRS dengan kinerja paling buruk mengeluarkan biaya penghimpunan dana sebesar 8%.

Gambar 2 menyajikan struktur pendapatan dan biaya rata-rata BPRS berdasarkan kelas asset dan kelas kinerja kredit. Berdasarkan unsur pendapatannya ternyata pendapatan utama BPRS diperoleh dari kegiatan penyaluran pembiayaan yang mencapai 71% dari total pendapatan bank, sedangkan penempatan antar bank mencapai 17%.

Apabila dilihat dari biaya rata-rata yang dikeluarkan, biaya dana termasuk bagi hasil (*bunga*) pinjaman yang diterima dan bunga untuk tabungan dan deposito mencapai 31% dari total biaya yang dikeluarkan, sedangkan biaya operasional lainnya mencapai 66% dari pengeluaran biaya keseluruhan.

Berdasarkan kelas asset, pendapatan rata-rata BPRS kelas asset A sebesar 50% berasal dari kegiatan pembiayaan (kredit), dan sebesar 28% dari ABA, sedangkan BPRS pada kelas asset C sebesar 91% berasal dari kegiatan pembiayaan (kredit), dan sebesar 6% dari ABA. Di lain pihak biaya rata-rata yang dikeluarkan BPRS pada kelas asset A sebesar 81% untuk biaya operasional lainnya dan sebesar 13% untuk biaya penghimpunan dana, sedangkan BPRS pada kelas asset C biaya operasional lainnya sebesar 51% dan sebesar 49% biaya penghimpunan dana.

Jika dilihat dari kelas kinerja kredit, struktur pendapatan dan biaya BPRS tidak bervariasi kecuali pada kelas kinerja kredit B. BPRS dalam kelas B umumnya BPRS kecil dengan kinerja kredit yang baik, dengan pengeluaran biaya lebih rendah, dengan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan.

Gambar 2
Struktur Pendapatan dan Biaya Rata-Rata BPR Syariah

Kelas Asset A			
Pos L/R	Nilai	Pos L/R	Nilai
Bunga bank	28%	Bya.pendanaan	13%
Pend. Pembiayaan	50%	Bya Opr lainnya*)	81%

Kelas Kinerja Kredit A			
Pos L/R	Nilai	Pos L/R	Nilai
Bunga bank	36%	Bya.pendanaan	31%
Pend. Pembiayaan	62%	Bya Opr lainnya*)	67%

Kelas Kinerja Kredit B			
Pos L/R	Nilai	Pos L/R	Nilai
Bunga bank	2%	Bya.pendanaan	56%
Pend. Pembiayaan	93%	Bya Opr lainnya*)	44%

Kelas Asset C			
Pos L/R	Nilai	Pos L/R	Nilai
Bunga bank	6%	Bya.pendanaan	49%
Pend. Pembiayaan	91%	Bya Opr lainnya*)	51%

Kelas Kinerja Kredit C			
Pos L/R	Nilai	Pos L/R	Nilai
Bunga bank	14%	Bya.pendanaan	31%
Pend. Pembiayaan	83%	Bya Opr lainnya*)	65%

BPR di Jatim			
Pos L/R	Nilai	Pos L/R	Nilai
Bunga bank	17%	Bya.pendanaan	31%
Pend. Pembiayaan	71%	Bya Opr lainnya*)	66%

Kelas Kinerja Kredit D			
Pos L/R	Nilai	Pos L/R	Nilai
Bunga bank	0%	Bya.pendanaan	8%
Pend. Pembiayaan	43%	Bya Opr lainnya*)	87%

*) Biaya operasional lainnya termasuk biaya penghapusan kredit macet.

3.1.2. Klasifikasi Asset

Apabila 6 BPRS yang ada di Jawa Timur dibagi dalam kelas asset terlihat hanya ada pada kelas asset di bawah Rp. 500 juta (A) dan pada kelas asset Rp.1 milyar sampai dengan Rp.5 milyar (C). Jumlah asset rata-rata BPRS per Desember 1999 sebesar Rp.1,2 Milyar.

Jangka waktu beroperasi berhubungan positif dengan perkembangan asset yaitu semakin lama BPRS beroperasi maka semakin besar jumlah assetnya. Hal ini tergambar pada BPRS yang masa operasionalnya 3 tahun memiliki asset rata-rata Rp.0,3 juta, sedangkan pada BPRS pada kelas C yang sudah beroperasi rata-rata 5 tahun memiliki asset rata-rata Rp. 2,2 juta.

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Tabel III.5:
Kelas Asset BPR syariah terhadap Indikator Terpilih

Uraian	Kelas Asset	
	A	C
Jml BPR (%)	50	50
Rata-rata Tahun Operasi	3,0	5,0
Rata-rata Asset (Rp.juta)	0,3	2,2
% Portofolio kredit/Asset		
Rata2 %	53,6	73,5
% BPR < 60%	50,0	0,0
% BPR > 85%	0,0	17,0
Rata-2 outstanding kredit		
Rata2 (Rp. juta)	1,0	2,3
% BPR < Rp 1 juta	33,0	0
% BPR > Rp.2 juta	0,0	17
% Kredit Non Lancar		
Rata2 (%)	28,0	12
% BPR < 10%	17,0	33
% BPR > 25%	17,0	0

Keterangan:
A: < Rp.500 juta; C: Rp.1 M - Rp.5 M

3.1.3. Portofolio Kredit dan Rata-Rata Outstanding Kredit.

Rata-rata prosentase portofolio pinjaman terhadap asset pada BPRS kelas asset A lebih rendah dibandingkan BPRS kelas C. Dari rasio pinjaman terhadap asset, BPRS dengan asset kecil (kelas asset A), cenderung menemui kesulitan dalam mendapatkan calon peminjam yang layak, dan sejalan dengan bertambahnya jangka waktu operasi BPRS semakin mampu mendapatkan peminjam yang layak, hal ini terlihat dari BPRS pada kelas A dengan rata-rata operasional 3 tahun rasio rata-rata kredit terhadap asset sebesar 54% dan BPRS kelas C dengan rata-rata operasional 5 tahun dengan rasio rata-rata kredit terhadap asset sebesar 74%.

Jumlah rata-rata pinjaman per nasabah yang disalurkan BPRS sangat berbeda antar kelas asset contoh; kelas A sebesar Rp.1,2 juta per nasabah, sedangkan pada kelas C sebesar Rp.3,1 per nasabah. Seperti juga pada porsi kredit terhadap asset, rata-rata outstanding kredit meningkat sejalan dengan bertambahnya asset BPRS. Pada umumnya BPRS kelas asset besar (A) menyalurkan kredit di bawah Rp.1 juta per nasabah, namun pada BPRS dengan asset besar (C) mempunyai rata-rata outstanding kredit di atas Rp.1 juta sampai dengan Rp.2 juta per nasabah.

NPL BPRS pada kelas asset A lebih buruk dibandingkan dengan kelas asset C. Dari 3 BPRS pada kelas A, satu BPRS sedang mengalami masalah struktural yakni 68% pembiayaannya adalah non lancar.

3.2. Organisasi dan Manajemen

3.2.1. Struktur Organisasi

Dalam bab organisasi dan manajemen berikut akan dibahas hal-hal yang berhubungan dengan organisasi yaitu: struktur organisasi, kepemilikan, komposisi dari personil BPRS. Untuk manajemen akan dibahas hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan manajemen, manajemen secara umum, manajemen perkreditan dan keuangan, masalah yang dihadapi oleh manajemen serta kebutuhan pelatihan bagi SDM BPR.

Struktur organisasi BPRS tergantung pada jumlah asset masing-masing BPRS, semakin besar jumlah asset BPRS maka struktur organisasinya semakin komplek. Struktur organisasi BPRS pada dasarnya sama dengan BPR konvensional, kecuali dalam BPRS terdapat unsur dewan syariah.

Struktur organisasi BPRS (gambar 3) yang paling sederhana dengan jumlah asset sebesar Rp.111,9 juta per akhir tahun 1999 memiliki pegawai 5 orang terdiri dari satu orang direktur, dibantu satu orang staf direktur ditambah tiga orang yang masing-masing mengisi tiga bagian yakni bagian pembiayaan (d.h.i kredit pada BPR konvensional), bagian operasional, dan bagian umum. BPRS yang didirikan pada bulan Oktober 1994 ini, sampai saat ini tidak mengalami perkembangan kegiatan usaha, dengan tingkat kesehatan **T**idak **S**ehat. Jumlah dewan pengawas syariah dan dewan komisaris masing-masing terdiri dari 2 orang, dan BPRS tersebut sampai saat ini belum membentuk satuan kerja internal audit.

Gambar 3
Struktur Organisasi Sederhana BPR Syariah

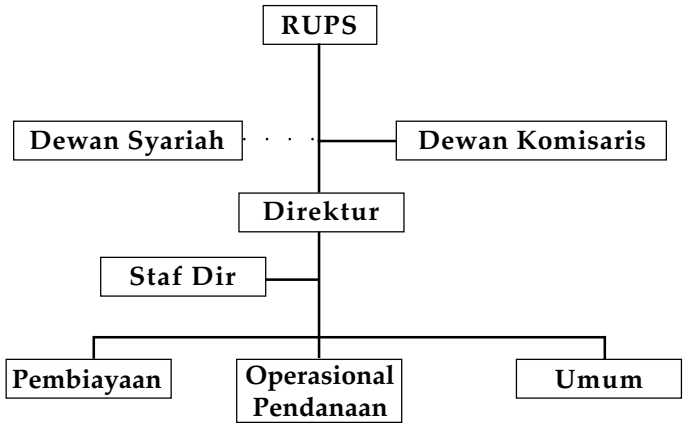

Struktur organisasi pada gambar 4 adalah struktur organisasi dari BPRS dengan jumlah asset Rp. 1,9 milyar per akhir tahun 1999, merupakan asset tertinggi kedua BPRS di Jatim,

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

didirikan lima tahun yang lalu. Dua orang direksi memimpin 15 orang pegawai, yang dibagi menjadi dua bagian dengan beberapa seksi. BPRS ini juga memiliki kantor pelayanan kas, yang secara fungsional bertanggung jawab kepada kepala bagian marketing. Fungsi personalia, legal dan audit dirangkap oleh kepala bagian dan direksi. Dalam kasus lain, BPRS dengan total asset lebih rendah mempunyai struktur organisasi serupa namun memiliki bagian yang lebih banyak (empat bagian; bagian umum, pemasaran, kasir/teller, dan akutansi), dengan beberapa seksi (sub-bagian).

Gambar 4
Struktur Organisasi dengan Bagian BPR Syariah

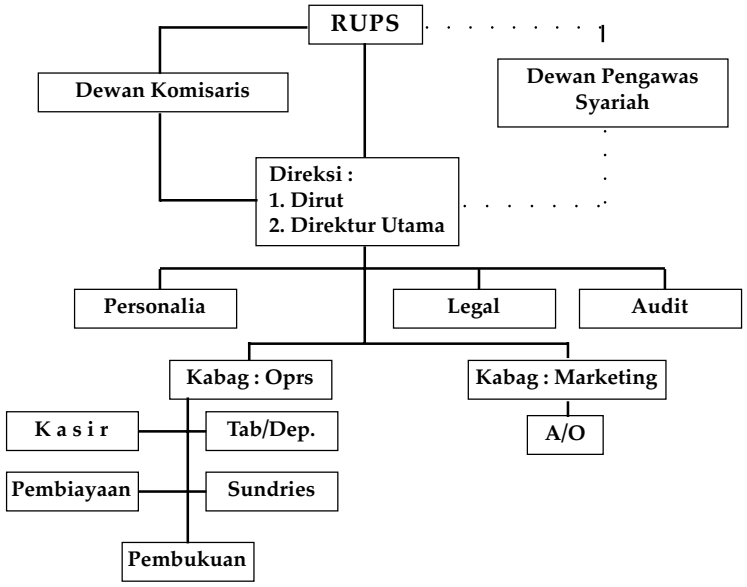

Bentuk model organisasi ke tiga (Gambar 5) adalah struktur organisasi dari BPRS terbesar di Jawa Timur yang didirikan setelah diberlakukan Undang-Undang Perbankan No 7 tahun 1992 dan berbadan hukum perseroan terbatas. BPRS yang didirikan pada tahun 1994 ini memiliki jumlah asset sebesar Rp.3,077 milyar dengan jumlah pegawai sebanyak 22 orang dan memiliki satu kantor unit pelayanan. BPRS ini memiliki bagian perencanaan, penelitian dan pengembangan, namun untuk bagian pembiayaan (kredit pada sistem konvensional), disatukan dalam bagian yang sama dengan seksi yang berbeda. Dalam bagian pembiayaan terdapat seksi-seksi legal support (adm.pembiayaan), appraisal (analis pembiayaan), *credit support*, dan remedial (pembiayaan bermasalah).

Gambar 5.
Struktur Organisasi dengan Kantor Cabang BPR Syariah

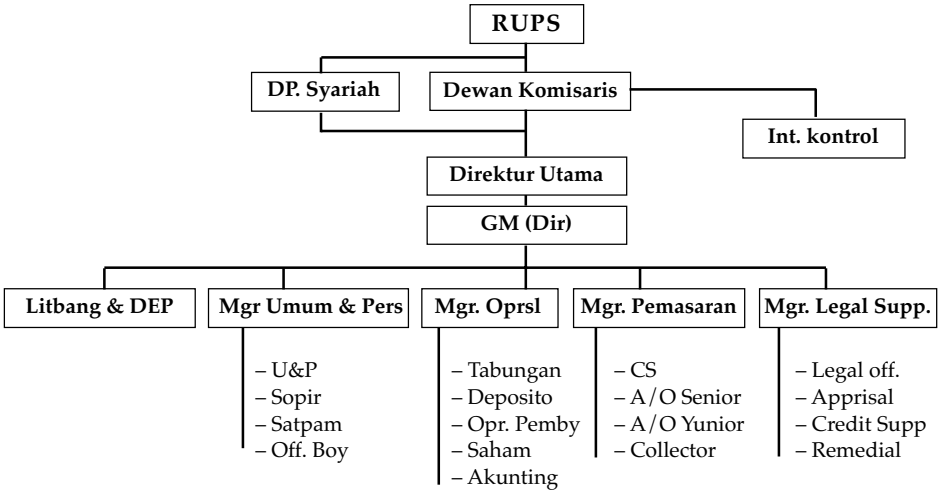

BPRS telah memiliki internal kontrol namun penempatan internal kontrol pada struktur organisasi BPRS beragam. Terkadang internal kontrol ditempatkan di atas direktur utama seperti pada gambar 5, atau di bawah direktur utama seperti pada gambar 4. Dari dua macam penempatan internal kontrol pada BPRS di atas nampaknya terdapat perbedaan pengertian internal kontrol, yang pertama sebagai fungsi dari operasional direktur dan yang lainnya sebagai fungsi dari pengawasan dewan komisaris.

3.2.2. Kepemilikan dan Dewan Komisaris

Jumlah rata-rata pemegang saham BPRS adalah 57 pemegang saham, dengan tertinggi 170 pemegang saham dan terendah 4 pemegang saham. BPRS dengan 4 pemegang saham merupakan BPRS yang baru setahun beroperasi yang sebelumnya adalah telah beroperasi sebagai BPR konvensional, sehingga dari sisi variasi pemilikan saham masih berciri BPR konvensional. Di lain pihak BPRS yang mempunyai pemegang saham 170 adalah BPRS yang memiliki asset terbesar di Jatim dengan sistem kepemilikan yang terbuka. Komitmen dari pendiri BPRS di Jawa Timur adalah untuk melibatkan masyarakat umum seluas-luasnya dalam memiliki saham BPRS, hal ini terlihat dari variasi jumlah pemegang sahamnya pada angka dua digit. Selain itu BPRS di Jatim pada umumnya didirikan oleh salah satu ormas Islam dan kepemilikannya sangat terbuka.

Jumlah dewan komisaris pada BPRS rata-rata 4 orang, dan seluruh dewan komisaris berasal dari pemegang saham, yang pada umumnya para pelopor pendirian BPRS.

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Bila dilihat dari latar belakang pengalaman di bidang perbankan maka anggota dewan komisaris mayoritas tidak mempunyai pengalaman. Hanya 19% dari seluruh komisaris yang mempunyai latar belakang pendidikan/pengalaman di bidang perbankan, dengan tingkat pendidikan pada umumnya sarjana (81%).

Tabel III.6 :
Kepemilikan BPR dan Pegawai BPR Syariah

	BPRS**)
Jml BPRS	**6**
Kepemilikan	
Rata-rata pemegang saham	57,0
% BPR dgn 1 pemegang saham	0,0
% BPR dgn 2 pemegang saham	0,0
% BPR dgn 3-5 pemegang shm	16,7
% BPR dgn >5 pemegang shm	83,3
Rata2 jmlh BPR dgn pgm shm >50%	0,0
Dewan komisaris	
% BPR dgn 1 org komisaris	0,0
% BPR dgn 2 org komisaris	16,7
% BPR dgn > 2 org komisaris	83,3
Pengalaman di perbankan	
% rata2 dari komisaris	19,2
Tdk berpengalaman (% BPR)	66,7
Pendidikan < = SLTA	
% rata2 dari komisaris	19,2
Jumlah komisaris (% BPR)	50,0
Pegawai BPR	
Jml rata2	13,0
Jml rata2 direktur	2,0
Jml rata2 pegawai tetap.	9,0
Direktur BPR	
% BPR dgn 1 org direktur	16,7
% BPR dgn 2 org direktur	83,3
% BPR dgn > 2 org direktur	0,0
Pengalaman di perbankan	
% rata2 dari direktur	55,0
Jumlah direktur (% BPR)	83,0
Pendidikan < = SLTA	
% rata2 dari direktur	0,0
Jumlah direktur (% BPR)	0,0
Pegawai Tetap	
% BPR dgn 2-9 peg.tetap	66,7
% BPR dgn 10-19 peg.tetap	33,3
% BPR dgn > 20 org peg.tetap	0,0
Pengalaman di perbankan	
% rata2 dari peg.tetap	16,4
Jlh peg.tetap tdk pengalaman (% BPR)	33,3
Pendidikan < = SLTA	
% rata2 dari peg.tetap	36,4
Seluruh peg.tetap < = SLTA (% BPR)	0

**) Angka prosentase diperoleh dari membandingkan dengan total BPRS di Jatim.

Pada struktur organisasi BPRS terdapat Dewan Pengawas Syariah yang memiliki anggota rata-rata 3 orang. Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memastikan produk yang dihasilkan oleh BPRS dan sistem operasional yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan syariah Islam. Mereka rata-rata memiliki latar belakang pengetahuan agama Islam yang baik dan merupakan orang yang dihormati karena pengetahuan agama Islamnya baik. Namun pada umumnya mereka tidak mempunyai pengalaman di bidang perbankan, kecuali pada satu BPRS, tingkat pendidikan dewan pengawas umumnya adalah sarjana, namun ada juga yang hanya berlatar belakang pondok pesantren (sekolah informal yang lebih dominan memberikan pengetahuan agama Islam).

3.2.3. Komposisi Manajemen dan Pegawai BPRS

Manajemen BPRS umumnya terdiri dari dua orang direktur (83%), hanya satu BPRS yang masih dipimpin oleh satu direktur yakni BPRS hasil konversi dari BPR konvensional dengan total asset sebesar Rp.0,4 milyar per Desember 1999.

Mayoritas (83%) BPRS dipimpin oleh direktur yang mempunyai latar belakang pengalaman di bidang perbankan, dengan tingkat pendidikan formal minimal sarjana muda dan 50% lebih direktur-direktur BPRS tersebut memiliki pengalaman di bidang perbankan.

Rata-rata jumlah pegawai BPRS adalah 14 orang, yang terdiri dari 11 orang pegawai tetap (termasuk direktur), dan 3 orang pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap pada umumnya sebagai tenaga kolektor tabungan dan pembiayaan (kredit). Tingkat pendidikan pegawai tetap BPRS umumnya di atas SLTA (64%), dan belum memiliki pengalaman di bidang perbankan.

3.2.4. Wewenang Manajemen

Untuk menilai tingkat wewenang manajemen (direksi) BPRS maka dinilai kewenangan mengambil keputusan dari direksi dalam 6 bidang yaitu: penerimaan staf baru, pembelian asset tetap, manajemen asset dan liabilities, persyaratan perkreditan, serta persetujuan kredit.

Dalam menganalisa tingkat wewenang manajemen BPRS berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil survey dapat dibagi empat tingkatan level manajemen yaitu; (1), wewenang yang tinggi tanpa keterlibatan dari pemilik atau komisaris, (2), wewenang yang relatif tinggi dengan keterlibatan pemilik atau komisaris pada beberapa bidang seperti yang disebut sebelumnya, (3), wewenang manajemen yang relatif rendah dengan keterlibatan pemilik atau komisaris melebihi 50% dari bidang, (4), wewenang rendah karena pemilik atau komisaris terlibat dalam pengambilan keputusan operasional di semua bidang.

Tabel III.7 :
Wewenang Manajemen BPR Syariah

	BPRS**)
Jml BPR	**6**
Keterlibatan Pemilik (% BPR)	
Keterlibatan dlm operasional	0,0
Wewenang manajemen:	
Tinggi	50,0
Relatif Tinggi	50,0
Relatif Rendah	0,0
Rendah	0,0
Manajemen Umum (% BPR)	
Keberadaan rencana tahunan	100,0
Keberadaan rencana training	100,0
Keberadaan anggaran training	100,0
Keberadaan job discription	100,0
Keberadaan sistem internal	66,7
Keberadaan manual:	
Adm. Dan pembukuan	100,0
Analis kredit	100,0
Prosedur pesetujuan kredit	100,0
Batas pinjaman	83,0
Pinjaman ke pihak terkait	66,0
Pengawasan pinjaman	100,0
Manajemen keuangan/pinjaman	
Keberadaan kebijakan:	
Manajemen likuiditas	83,0
BMPK	100,0
BMPK ke pihak terkait	50,0
PPAP	100,0
Penghapusan kredit macet	50,0
Eksekusi agunan:	
Tidak Pernah	100,0
Pernah lebih dari satu kali	0,0
Pernah dgn hasil yg memuaskan	0,0
Lima outstanding kredit terbesar	
< 10% dari portofolio kredit	33,0
> 30% dari portofolio kredit	17,0

**) Angka prosentase diperoleh dari membandingkan dengan total BPRS di Jatim.

Keterlibatan pemilik dalam pengambilan keputusan bidang operasional BPRS dapat melalui anggota dewan komisaris, direksi, atau bentuk campur tangan lainnya. Berdasarkan hasil survey ternyata BPRS di Jatim dapat dimasukkan dalam dua macam tingkat kewenangan yakni tingkat kewenangan "*tinggi*" dan "*relatif tinggi*" masing-masing adalah 50% (lihat tabel III.8).

Bentuk keterlibatan pada 3 BPRS dengan tingkat kewenangan "relatif tinggi" adalah dalam bidang pembelian aktiva tetap, penerimaan pegawai, dan manajemen sumber dan penyaluran dana.

Tabel III.8 :
Indikator Manajemen terhadap Penggolongan
Kinerja Pembiayaan (kredit)

	Kelas Kinerja Kredit				Total Syariah
	A Syariah	B Syariah	C Syariah	D Syariah	
Jml BPR	2	1	2	1	6
Kewenang manajemen:					
Rendah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relatif Rendah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relatif Tinggi	50,0	100,0	50,0	100,0	66,7
Tinggi	50,0	0,0	50,0	0,0	33,3
Manajemen Umum (% BPR)					
Keberadaan sistem Internal	50,0	100,0	100,0	0,0	66,7
Keberadaan manual:					
Analis kredit	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Prosedur pesej kre	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Batas pinjaman	50,0	100,0	100,0	100,0	83,3
Pinj. ke phk terkait	50,0	100,0	100,0	0,0	66,7
Pengawasan pinj.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Mnjmn keuangan/pinjaman.					
Keberadaan kebijakan:					
Mjmn likuiditas	100	100,0	100,0	100,0	100,0
BMPK	50	100,0	100,0	100,0	83,3
BMPK pihak terkait	50	100,0	100,0	0,0	33,3
Pencegahan krdt mct	100	100,0	100,0	100,0	100,0
Penghapusan krd mct	0	100,0	100,0	100,0	33,3
5 outstanding krd terbsr					
< 10% dr port. Kredit	50,0	100,0	100,0	0,0	33,3
> 30% dr port. Kredit	0,0	0,0	0,0	100,0	16,7

**) Angka prosentase diperoleh dari membadingkan dengan total BPRS di Jatim.
– Kredit Non lancar: A: < 5%, B: 5 - < 10%, C: 10-25%, D: >25%.

Hal yang menarik jika variabel kewenangan dihubungkan dengan variabel kualitas aktiva produktif. Walau sedikit lebih sulit melihat fenomena ini, karena BPRS beroperasi pada tingkat kewenangan tinggi dan relatif tinggi. BPRS dengan tingkat kewenang tinggi mempunyai NPL lebih kecil dari 5% sedangkan BPRS beroperasi dengan kewenangan relatif tinggi mempunyai NPL lebih besar dari 5%.

Temuan ini tidak dapat diartikan bahwa campur tangan pemilik, khususnya dalam keputusan pemberian pembiayaan (kredit), akan mempengaruhi kinerja kreditnya. Namun

demikian, hal ini menunjukan bahwa banyaknya campur tangan pemilik dalam operasional BPRS tidak membantu meningkatkan kinerja kreditnya.

Direksi mempunyai kewenangan yang sangat rendah dalam membeli aktiva tetap, sebanyak 83% BPRS melakukannya atas persetujuan dari pemilik. Mayoritas kewenangan dalam penerimaan pegawai tidak dipengaruhi oleh komisaris (67%). Untuk manajemen sumber dan penyaluran dana biasanya diserahkan kepada direksi. Keterlibatan pemilik dalam manajemen dana hanya ada pada satu BPRS (16%). Kewenangan yang paling tinggi bagi direksi ada pada penentuan tingkat bunga, dan penentuan persyaratan pinjaman (masing-masing 100%).

3.2.5. Manajemen Umum

Manajemen BPRS dapat dilihat dari rencana tahunan BPRS dan uraian tugas (*job discription*). Target BPRS dalam rencana kerja tahunan adalah peningkatan cakupan pelayanan, disusul dengan peningkatan kualitas SDMnya, peningkatan laba, modal disetor dan kinerja BPRS khususnya di bidang pembiayaan, baik penyaluran maupun penagihan. Pada umumnya BPRS sangat menyadari bahwa sistem yang mereka tawarkan kepada masyarakat relatif baru, untuk itu dalam rencana kerja tahunan kebanyakan BPRS mencantumkan tujuan utama adalah lebih memperkenalkan sistem pelayanan melalui pembukan unit-unit pelayanan baru kemudian peningkatan kualitas SDM, sedangkan target kuantitatif menjadi tujuan operasional nomer dua. Target kuantitatif dapat berupa peningkatan penyaluran pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan lain-lain. Tabel berikut ini memperlihatkan 10 tujuan yang sering dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS.

Tabel III.9 :
Rangking Tujuan pada Rencana kerja Tahunan

Faktor R = Rangking N = Jumlah BPR	BPRS Jatim	
	R	N=6
Menigkatkan penghimpunan dana, asset	–	–
Meningkatkan pemberian pembiayaan/kredit	–	–
Meningkatkan kemampuan SDM	2	2
Meningkatkan kualitas aktiva produktif	–	–
Meningkatkan pendapatan / BEP	3	1
Meningkatkan/menjaga tingkat kesehatan bank	3	1
Mendirikan/mempeluas unit layanan	1	4
Mengembangkan program komputerisasi kantor	2	2
Meneriman pegawai baru–	–	
Meningkatkan motivasi/disiplin pegawai	–	–
Meningkatkan manajemen/internal kontrol	–	–
Meningkat modal disetor	3	1

Semua BPRS telah memiliki uraian tugas para pegawainya yang menjelaskan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan tanggungjawab masing-masing pegawai. Namun demikian keberadaan dari uraian tugas tidak menjamin BPRS memiliki kinerja kredit baik. Oleh karena itu diperlukan komitmen manajemen bank untuk melaksanakan *job manual* secara disiplin agar dapat dicapai kinerja yang baik.

3.2.6. Manajemen Keuangan dan Kredit

Pembahasan mengenai manajemen keuangan dan perkreditan dilakukan dengan melihat praktek penerapan kedua jenis manajemen tersebut dalam operasional BPRS. Untuk manajemen keuangan dilihat melalui penerapan manajemen likuiditas, sedangkan manajemen kredit menyangkut aspek-aspek perkreditan seperti; penyebab, strategi untuk menghindari kredit bermasalah, tindakan yang dilakukan jika terjadi kemacetan, BMPK, penghapusbukuan, dan eksekusi jaminan. Pada bagian akhir diungkapkan masalah utama yang dihadapi dalam operasional BPRS.

A. Manajemen likuiditas

Manajemen likuiditas terutama berhubungan dengan penyediaan kas untuk menyelesaikan hutang jangka pendek dan untuk itu perlu pencocokan antara hutang lancar dengan tagihan lancar. Biasanya bank akan membuat proyeksi aliran kas sesuai dengan jatuh tempo (jangka waktu) hutang dan tersedianya kas yang diperoleh dari tagihan lancar.

Tabel III.10 :
Ranking terhadap Manajemen Likuiditas

Faktor R = Rangking N = Jumlah BPR	BPRS Jatim	
	R	N = 6
Uang tunai/Simpanan pada bank lain .. % dari DPK	1	5
Berdasarkan aliran kas sesuai dgn jangka waktunya	2	2
Likuiditas seperti pada CAMEL	2	2
BMPK kpd pihak terkait, meningkatkan kolektibilitas, mobilisasi tabungan.		–
Program penjaminan simpanan		–
Ketersedian modal tambahan, pinjaman dr phk terkait		–
Lainnya dgn jawan tdk terinci		–

Bentuk pelaksanaan manajemen likuiditas yang dilakukan oleh BPR adalah sebagai berikut (lihat tabel III.10):

a. Melakukan praktek manajemen likuiditas yang benar seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas (33% BPRS).

b. Menempatkan dana pada bank lain sebesar prosentase tertentu (biasanya dari 5% s.d 20%) dari dana yang berhasil dimobilisasi (83% BPRS).

c. Menggunakan dua rasio likuiditas pada CAMEL yang diterapkan oleh BI (33% BPRS). *Cash rasio* dan *LDR* dapat membantu untuk melihat posisi likuiditas BPRS tapi kurang tepat untuk mengukur kewajiban hutang jangka pendek, khususnya yang bersifat harian.

B. Manajemen Kredit

Faktor tertinggi yang **menyebabkan** pembiayaan (kredit) macet adalah kondisi ekonomi dan kegagalan usaha, baru kemudian faktor yang berhubungan dengan karakter, dan faktor eksternal lainnya.

Tabel III.11 :
Pengalaman BPR : Faktor yang menyebabkan kegagalan kredit

Faktor R = Rangking N = Jumlah BPR	BPRS Jatim	
	R	N=6
FAKTOR YG BERHUB. DGN KARAKTER	2	2
Umum	–	2
Alamat berubah tanpa pemberitahuan	–	–
Kredit digunakan berbeda dgn kontrak	–	–
Kredit digunakan oleh pihak lain	–	–
Jaminan dijual oleh debitur	–	–
KONDISI EKONOMI & KEGAGALAN BISNIS	1	3
FAKTOR INTERNAL BANK	–	–
Analisis dan prosedur kredit yg tdk memadai	–	–
Tdk ada atau kurangnya jaminan tetap	–	–
Kolusi dan campur tangan pihak luar	–	–
Tindakan terlambat, monitoring dan kurang bimbingan	–	–
FAKTOR EKTERNAL LAINNYA	3	1
Bencana alam atau pada manusia	–	–
Jaminan dijual hilang atau rusak	–	–
Tidak memakai jaminan	4	1

Secara umum dapat disimpulkan bahwa BPRS lebih dapat melihat karakter debiturnya, namun demikian tetap diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa karakter calon nasabahnya, di samping pertimbangan ada tidaknya agunan.

Strategi yang dilakukan oleh BPRS untuk menghindari pembiayaan (kredit) macet adalah sebelum pemberian pembiayaan dilakukan analisis kelayakan, kemudian dilanjutkan tindakan-tindakan pengawasan/ pemantauan setelah pemberian kredit (lihat tabel III.12).

Tabel III.12 :
Rangking Strategi untuk Menghindari Kredit Macet

Strategi R = Rangking N = Jumlah BPR	BPRS	
	R	N = 6
Monitoring kontinu, hubungan dan bimbingan secara pribadi	2	3
Informasi yg cukup dan analisa kredit yang Memadai (5C)	1	6
Jaminan yg cukup, dan jaminan yang mudah dijual	3	2
Berhati-hati dlm memilihan peminjan dan persetujuan kredit yg selektif	4	1
Meningkatkan kemampuan petugas kredit dan meningkatkan prosedur kredit	–	–
Penagihan kredit yg intensip dan membentu tim penyelamat kredit	4	1
Membuat komite kredit dan menyakinkan akan adanya keputusan kredit yg transparan	–	–
Pembentukan cadangan penghapusan kredit macet yg cukup dan penghapus-bukuannya	–	–
Rescheduling, restructuring dan reconditioning thd kredit bermasalah	–	–
Lainnya atau jawaban tidak dirinci	4	1

Tindakan yang diambil menajemen terhadap debitur jika mulai terjadi tanda-tanda kemacetan adalah diawali dengan kunjungan lebih sering terhadap debitur dan memberikan alternatif penyelesaian tunggakan, menagih secara langsung dan dapat juga dengan mengenakan pinalti terhadap keterlambatan angsuran. Di samping itu dikirim surat peringatan formal kepada debitur penunggak (lihat tabel III.13).

Tabel III.13:
Rangking tindakan yang diambil jika terjadi kemacetan

Tindakan R = Rangking N = Jumlah BPR	BPRS	
	R	N = 6
Kunjungan berkala, upaya penagihan dan Bimbingan	1	6
Menerapkan pinalti	3	1
Mengirimkan surat peringatan formal	1	6
Rescheduling, restructuring dan reconditioning thd kredit	2	5
Mengurangi pinalti dan bunga pinjaman	–	–
Mengikat jaminan	–	–
Lainnya atau tidak merinci jawaban	–	–

Ada praktek unik dari salah satu BPRS dalam usaha penagihan kredit, yaitu apabila surat peringatan pertama tidak mendapat tanggapan, maka dikirimkan surat peringatan yang tidak menggunakan amplop dan dikirimkan bukan melalui pos tapi melalui ketua RT atau kepala dusunnya. Hal ini akan menimbulkan rasa malu bagi debiturnya karena tunggakan angsurannya diketahui oleh ketua RT atau Kepala Dusun.

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Menurut mereka cara ini lebih efektif dibandingkan surat peringatan tersebut dikirimkan melalui pos.

Pengenaan denda jarang dilakukan oleh BPRS dan toleransi pengenaan denda pada masing-masing BPRS cukup beragam yaitu antara satu hari sampai dengan tiga bulan terhitung sejak terlambat. Pengenaan denda terkadang setelah atau bersamaan dengan upaya penagihan lainnya, sedangkan besarnya pengenaan finalti disesuaikan dengan kemampuan membayar debitur.

Sebelum melakukan eksekusi jaminan biasanya BPRS melakukan upaya penyelamatan seperti; penjadwalan, restrukturisasi, dan rekondisi.

Tabel III.14 :
Ranking pinjaman kepada pihak terkait

Kebijaksanaan R = Rangking N = Jumlah BPR	B P R S	
	R	N = 6
Menerapkan peraturan BI	1	6
Menyediakan bunga rendah, jangka waktu dan persyaratan yg lebih baik	3	1
Menerapkan peraturan kredit umumnya, sesuai dengan kemampuan membayar	2	2
Menerapkan aturan jaminan yang baku	–	–
Hanya melayani keb yg sangat mendesak	3	1
Tidak menyediakan kredit pd pihak terkait	–	–
Menerapkan jumlah maks. Pinjaman Individual	–	–

Pembiayaan (kredit) kepada pihak terkait tidak digolongkan sebagai penyebab terjadi kredit bermasalah. Sebanyak 33% BPRS memberikan kebijakan tertentu kepada pihak terkait dalam bentuk kemudahan dalam persyaratan pembiayaan (kredit). Namun semua BPRS dalam memberikan pembiayaan (kredit) kepada pihak terkait selalu memperhatikan BMPK yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, karena menyadari jika melebihi BMPK akan mengurangi penilaian tingkat kesehatan BPRnya (lihat tabel III.14).

Seluruh BPRS menerapkan peraturan BPMK di mana untuk debitur individual tidak boleh meminjam lebih dari 20% modal BPR (lihat tabel III.15).

Tujuan utama dari pemberlakuan pembatasan pemberian kredit (*legal lending limit*) adalah untuk menyebar resiko yang mungkin timbul dalam pemberian kredit. Salah satu alternatif yang ditawarkan oleh DR.Hendrik Prins (konsultan GTZ) untuk penghitungan BMPK adalah memberi batasan kredit kepada lima debitur pembiayaan terbesar dalam portofolio kredit BPRS tidak boleh lebih dari 20% total portofolio kredit.

Tabel III.15 :
Ranking kebijakan BMPK

Kebijakan R = Rangking N = Jumlah BPR	B P R S	
	R	N = 6
Menerapkan peraturan BI	1	6
Mengetatkan kewenangan manajemen dalam menyetujui pemeberian kredit	–	–
Diberikan kewenangan yg jelas oleh komisaris dan direktur	–	–
Menerapkan yang lebih ketat dibandingkan dgn peraturan BI	–	–
Membatasi pemberian kredit sesuai dgn Keb. peminjam (analisis kredit yg benar)	–	–
Menerapkan maks. kredit bagi debitur individual	–	–
Lainnya atau tidak merinci jawaban	–	–

Perbedaan porsi 5 pembiayaan besar dalam portofolio pembiayaan diantara BPRS kinerja terbaik sangat kecil (7%) jika dibandingkan dengan dan BPRS dengan kinerja terburuk (29%). Hal ini jelas sekali mengambarkan bahwa BPRS dengan kinerja buruk memiliki resiko pembiayaan yang tinggi karena portofolio pembiayaan (kredit) mereka terserap kepada segelintir peminjam.

Ditemukan juga hal yang menarik adalah menghubungkan pelanggaran 20% porsi 5 pembiayaa (kredit) terbesar dengan tingkat campur tangan pemilik dalam operasional bank. BPRS mempunyai kinerja paling buruk beroperasi dengan tingkat kewenangan relatif tinggi melanggar batas 20% 5 debitur terbesar, sedangkan BPRS yang beroperasi dengan tingkat kewenangan tinggi tidak melanggar.

Bidang lainnya yang dapat digali dari manajemen perkreditan BPRS adalah kebijakan dan praktek penghapusan kredit macet dan pengalaman eksekusi jaminan. BPRS kecil cenderung tidak menghapuskan kredit macet dari portofolio kreditnya karena alasan antara lain:

a. Masih mengharapkan dibayar walaupun sebenarnya sudah tidak ada harapan lagi;

b. Cadangan penghapusan aktiva produktif yang kurang.

Semua BPRS belum memiliki aturan intern penghapusan kredit macet. Pelaksanaan penghapuskan kredit yang dilakukan oleh BPRS adalah dengan persetujuan dari komisaris dan telah melewati waktu sejumlah bulan setelah dikategorikan macet atau dihapuskan diakhir tahun buku. Hal ini merupakan temuan penting jika dihubungkan jumlah BPRS yang non sehat (lihat tabel III.16).

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Tabel III.16 :
Ranking aturan penghapus-bukuan kredit macet

Aturan R = Rangking N = Jumlah BPR	B P R S	
	R	N = 6
Menerapkan aturan yg sdh ada	1	6
Menghapusbukan sisa kredit jika jaminan tidak cukup atau tdk mudah dipasarkan		
Pengapusbukuan harus disetujui oleh pemilik dan dewan komisaris	3	1
Penghapusbukuan berdasarkan pada kapasitas PPAP	–	–
Penghapusbukuan setelah kredit (.. bln) diklasifikasi macet	2	3
Menagih tunggakan setelah kredit di-Hapusbukuan	–	–
Menyediakan cadangan kredit macet dalam jumlah yang cukup	3	1
Menghapusbukan kredit macet pada akhir tahun buku	–	–
Lainnya tidak merinci jawaban	–	–

BPRS menerima agunan dalam bentuk tanah, gedung, kendaraan bermotor, atau aktiva tetap lainnya (seperti becak, sepeda, alat elektronik, dan perabot rumah). Sedikit sekali yang mau menerima jaminan deposito dan jaminan pribadi (*personal guarantee*). Beberapa BPRS menyediakan kredit tanpa agunan. Agunan (collateral) bagi BPRS adalah bidang yang tidak dapat diramal oleh manajemen BPRS. Kejadian yang sering dialami oleh BPRS adalah; peminjam menjual jaminan, jaminan rusak dalam kecelakaan atau hilang karena dicuri. Secara internal, mereka juga mengalami kesulitan karena tidak didukung sistem hukum untuk mengeksekusi agunan (lihat tabel III.17).

Seluruh BPRS tidak mempunyai pengalaman dalam melakukan eksekusi jaminan melalui jalur formal karena akan mengeluarkan biaya yang besar dan tidak sebanding dengan nilai yang akan didapat, ditambah lagi membutuhkan waktu yang lama dan pelik karena masih rendahnya penegakan hukum oleh aparat peradilan. Oleh karena itu beberapa BPRS menempuh cara kekeluargaan dalam menyelesaian eksekusi agunan.

Masalah utama yang hadapi oleh manajemen dalam menjalankan operasional BPRS adalah masalah penagihan dan kredit macet, serta persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Masalah kedua terbanyak adalah rendahnya mobilisasi modal dan dana dari masyarakat dan minimnya fasilitas penunjang operasional kantor (lihat tabel III.18).

Seluruh BPRS telah menggunakan perangkat komputer, namun penggunaannya mayoritas hanya terbatas pada kegiatan administrasi dan pelaporan kepada BI. Beberapa

Tabel III.17 :
Pengalaman dan pendapat tentang mengesekusi jaminan

BPR dgn pengalaman eksekusi R = Rangking N = Jumlah BPR	B P R S R	 N = 0
Tidak puas: Rendahnya transparansi, terlalu mahal, dan prosedurnya panjang	–	–
Puas : Kerjasama yg baik dgn pengadilan dan lembaga pelelangan	–	–
Tidak puas : Alasan lainnya	–	–
Masih dalam proses	–	–
BPR tanpa pengalaman eksekusi	**R**	**N = 5**
Tdk Effisien : Terlalu mahal u/ kredit kecil terlalu berbelit-belit dan lama	1	2
Lebih menyukai eksekusi informal bekerja sama dgn debitur	1	2
Tidak ada kredit macet, belum dibutuhkan	–	–
Tidak pengalaman, tdk mengerti prosedurnya	–	–
Memperburuk citra BPR, dikritik krn terlalu kejam	2	1

BPRS menggunakan program yang mereka kembangkan sendiri dengan perusahaan pemasok perangkat lunak namun belum ada standar baku yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan perangkat lunak (program). Program yang dikembangkan meliputi bidang; akunting, administrasi kredit dan tabungan. BPRS yang menggunakan program

Tabel III.18 :
Masalah Utama yang diungkapkan oleh Direktur BPRS

M a s a l a h R = Rangking N = Jumlah BPR	B P R S R	 N = 5
OPERASIONAL		
Penagihan dan kredit macet	1	4
Rendahnya mobilisasi dana dan modal	2	3
Persaingan	1	4
Ekspansi kredit, over likuid	–	–
Pengambilan dan eksekusi jaminan	–	–
Citra BPR buruk dan rendahnya kepercayaan	–	–
Kurang Promosi	3	2
Pemilik terlalu banyak sulit menambah modal	3	2
SDM		
Rendahnya kemampuan pegawai	2	3
Rendahnya kualitas pegawai baru	–	–
Rendahnya disiplin dan motivasi pegawai	–	–
ORGANISASI		
Rendahnya struktur organisasi & pembagian peg.	4	1
Sedikitnya ruang dan fasilitas kantor	2	3
Akunting yg lemah dan mslh pajak akuntansi	–	–
Rendahnya wewenang dan campur tangan phk luar	–	–
Tidak effektifnya dewan komisaris	4	1

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

adalah BPRS yang relatif besar mengingat investasi untuk perangkat lunak dan perangkat keras relatif mahal.

Nampaknya perlu dilakukan standarisasi perangkat lunak yang menyangkut akuntansi yang terintregrasi dengan tabungan, deposito dan perkreditan, karena program tersebut akan sangat membantu manajemen dalam menganalisa dan memudahkan transaksi keuangan lainnya.

3.2.7. Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan

Seluruh BPRS menyiapkan anggaran untuk kegiatan pelatihan untuk level direktur, staf pembiayaan (kredit), staf adminitratif dan staf operasional lainnya.

Di level direksi semua BPRS membutuhkan training yang menyangkut manajemen BPRS antara lain: kepemimpinan, perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan. Kebutuhan training tersebut dihubungkan dengan beberapa hambatan yang selama ini mereka merasakan bahwa pengelolaan BPRSnya belum maksimal. Jenis training penting lainnya yang teridentifikasi adalah training manajemen resiko, sedangkan topik training hukum, perpajakan, internal kontrol, pemasaran, dan akuntansi jarang peminatnya (lihat tabel III.19).

Tabel III.19 :
Kebutuhan Training bagi Direktur BPRS

Masalah R = Rangking N = Jumlah BPR	B P R S	
	R	N = 6
Tidak membutuhkan Training	–	–
Manajemen BPR, Internal Kontrol	4	1
Manajemen Umum (Syariah) , Leadership, Perencanaan Strategis & pengambilan Keputusan.	1	6
Manajemen Risiko dan keuangan	2	3
Manajemen Sumber Daya Manusia	3	2
Aspek hukum dan perpajakan	4	1
Pemasaran	4	1
Akuntansi	4	1
Lainnya : Pendidikan Formal, Ekonomi makro Dan moneter	–	–

Jenis pelatihan yang teridentifikasi bagi staf pembiayaan (kredit) BPRS adalah pelatihan kredit secara umum berikut pengadministrasinya, analisa kredit, penagihan dan penyelamatan kredit (lihat tabel III.20).

Tabel III.20 :
Kebutuhan Training bagi Staf Pembiayaan BPRS

Masalah R = Rangking N= Jumlah BPR	B P R S	
	R	N = 6
Tidak membutuhkan Training	–	–
Kredit secara umum & administrasi Training AO	1	4
Analisis Kredit, resiko dan usaha	2	3
Markerting dan custumer relations	–	–
Penagihan kredit dan penyelamatan kredit	3	2
Pengawasan dan monitoring kredit	3	2
Aplikasi komputer	2	3
Lainnya: Aspek manajemen BPRS	–	–

Tabel III.21 :
Kebutuhan Training bagi Staf BPRS Lainnya

Masalah R = Rangking N= Jumlah BPR	B P R S	
	R	N = 6
Tidak membutuhkan Training	–	–
Analisis keuangan dan manajemen	4	1
Akuntansi	4	1
Perangkat keras dan lunak	–	–
Pelaporan umum dan keuangan	3	2
Hubungan dengan nasabah dan pemasaran	3	2
Aspek hukum dan perpajakan	3	2
Penanganan uang palsu	–	–
Magang di BPRS lainnya	2	3
Manajemen Oprs.	1	6
Lainnya	–	–

Kebutuhan pelatihan bagi staf keuangan dan administrasi lainnya seperti yang tercermin pada tabel tabel III.21 menunjukkan bahwa training yang paling diminati oleh staf keuangan dan administrasi adalah manajemen bank syariah. Mereka menyadari bahwa pengetahuan mereka masih minim dalam pengelolaan bank dengan prinsip syariah karena sampai saat ini penyelenggaraan pelatihan manajemen BPRS sangat jarang diadakan. Mengenai bentuk pelatihan dengan pola magang di bank syariah (BU atau BPR) yang lebih maju ternyata merupakan pola yang menarik. Jenis pelatihan lain yang diharapkan untuk staf keuangan dan administrasi adalah pemasaran, pelaporan, hukum dan perpajakan.

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

IV. Kondisi Persaingan

4.1. Pelayanan kepada Nasabah

BPRS menyediakan pelayanan pembiayaan, tabungan dan deposito berjangka kepada para nasabahnya. Selain produk umum tersebut terdapat juga layanan lainnya seperti; asuransi takaful (1 BPRS) dan pemesanan barang (*Istina*) (1 BPRS).

Semua BPR menyediakan pelayanan **tabungan** yang memberikan kesempatan/ kebebasan kepada nasabahnya untuk menyetor dan menarik secara harian. Produk tabungan yang ditawarkan relatif lebih beragam yaitu 83% BPRS mempunyai produk tabungan lebih dari satu jenis dan 17% BPRS hanya memiliki satu jenis tabungan. Berbeda dengan praktek BPR konvensional yang menetapkan suku bunga, BPRS menerapkan bagi hasil (*mudharabah*) bagi produk tabungan. Dalam penetapan tingkat bagi hasil tidak ada perbedan yang nyata antar sesama BPRS. Penetapan pembagian keuntungan yang lebih besar bagi nasabah merupakan faktor yang menarik bagi nasabah untuk menabung.

Dalam penetapan besar nisbah bagi hasil, memperhatikan besarnya keuntungan (bunga) yang ditawarkan oleh pesaingnya, seperti BPR konvensional lainnya, dan bank komersial yang beroperasi di wilayahnya. Perbedaan nisbah yang ditawarkan dalam wilayah tertentu dengan wilayah lainnya menunjukan situasi persaingan BPR yang ketat karena di setiap wilayah harus diterapkan strategi yang berbeda untuk menghadapi pesaing yang berbeda.

Ada dua cara BPRS menentukan tingkat bagi hasil tabungan yakni: *Pertama*, saldo terakhir langsung dikalikan dengan nisbah. *Kedua*, saldo terakhir langsung dikalikan prosentase *(dibobot)* tertentu untuk selanjutnya dikalikan dengan nisbah. Prosentase bobot adalah porsi dari nominal rekening tabungan tertentu yang benar-benar dianggap dapat disalurkan kembali oleh bank kepada pihak yang membutuhkannya. Besar prosentase bobot tabungan berkisar antara 80% s.d 90%. 50% BPRS yang beroperasi di Jatim menggunakan sistem pembobotan, 33% BPRS besar dan 67% BPRS kecil.

Dua BPRS besar menawarkan tabungan yang tidak dibayar bagi hasil. Tabungan ini dibuka untuk menampung zakat yang diserahkan oleh nasabahnya. Bentuknya dapat berupa tabungan zakat atau hanya berupa rekening penampungan (rekening *asnaf*). Karena sifatnya adalah zakat (seperti sumbangan) pengelolaan tabungan ini diserahkan kepada bank dan tidak ada bagi hasil.

Seluruh BPRS mempunyai produk **deposito** dengan berbagai macam jangka waktu, mulai dari satu bulan sampai dengan satu tahun. Deposito yang ditawarkan oleh BPRS secara umum sama dengan bentuk deposito umum BPR konvensional, kecuali bentuk keuntungan yang ditawarkan kepada penyimpan yakni dengan sistem bagi hasil. Nisbah

Tabel IV.1 :
Aspek pelayanan BPR Syariah

Uraian	BPR Syariah
Jumlah BPR	6
Produk tabungan	
% BPR d/ 1 produk tabungan	16,6
% BPR d/ > 2 produk tabungan	83,4
Nisbah rata2 produk utama	52 : 50
Deposito	
% BPR d/ produk deposito	100,0
Nisbah rata2 produk deposito	65,2 : 34,8
Produk kredit/pembiayaan	
% BPR d/ 1-2 produk kredit	50,0
% BPR d/ > 3 produk kredit	50,0
Rata2 margin terendah	40,0
Rata2 margin tertinggi	53,4
Margin rata2 dua produk utama	6,0
% produk d/ 5 - 27%	-
% produk d/ 30 - 36%	-
% produk d/ 37 - 48%	50,0
% produk d/ 51 - 100%	50,0
Rata2 jangka waktu paling singkat (bln)	4,0
Rata2 jangka waktu paling panjang (bln)	33,0
Jangka waktu kredit pada 2 produk	6,0
% produk d/ 1 - 3 bulan	-
% produk d/ 4 - 10 bulan	16,7
% produk d/ 12 bulan	50,0
% produk d/ 18 - 24 bulan	16,7
% produk d/ 30 - 60 bulan	16,7
Frekuensi cicilan:	
% BPR hanya dgn bulanan saja	83,3
% BPR hanya dgn harian dan mingguan	0,0
% BPR dgn bulanan dan lainnya	16,7

Ket: d/ = dgn; margin = bagi hasil pada BPRS;

rata-rata untuk produk deposito dengan jangka waktu satu tahun 65,2% untuk nasabah dan 34.8% untuk bank. Seperti juga pada tabungan, 50% BPRS menggunakan *sistem bobot* dalam perhitungan pembagian keuntungan, yang besar "**bobot**" antara 75% untuk deposito satu bulan sampai dengan 100% untuk deposito satu tahun. Walaupun BPRS memiliki pasar tersendiri yakni masyarakat yang tidak menghendaki sistem bunga, besar kecilnya nisbah yang ditawarkan kepada masyarakat juga mempertimbangkan tingkat keuntungan (*bunga*) yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya sebagai pesaingnya yang beroperasi di wilayah yang sama.

Jenis **pembiayaan** yang paling populer saat ini di BPRS adalah bentuk jual beli dengan *mark up* yakni Murabahah dan Baiu Bitaman Ajil. Besarnya margin yang dikenakan untuk pembiayaan dengan sistem jual beli dengan mark up adalah terendah 40% pertahun dan tertinggi 53,4% pertahun.

Sementara ini pembiayaan dengan bentuk bagi hasil (*mudharabah*) hampir tidak ada BPRS yang menyalurkannya lagi. Hal ini mungkin disebabkan karena produk ini masih belum begitu populer di masyarakat atau BPRS sangat selektif sekali dalam menyalur pembiayaan mudharabah karena sulit menemukan peminjam yang layak, khususnya yang mempunyai karakter yang betul-betul baik. Outstanding pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan lama, dengan kolektibilitas kurang begitu menggembirakan. Ada 50% BPRS yang menyalurkan jenis pembiayaan mudharabah, dari BPRS yang menyalurkan mudharabah 67%-nya hanya memiliki 1 rekening pembiayaan mudharabah. Nisbah pembagian keuntungan pembiayaan mudharabah secara rata-rata 56% untuk peminjam dan 44% untuk bank.

BPRS menawarkan kepada masyarakat satu jenis pembiayaan tanpa harus membayar margin atau bagi hasil yang disebut pembiayaan *Qardhul Hasan.* Satu BPRS mempunyai outstanding pembiayaan jenis ini, sedangkan BPRS lainnya belum memiliki dengan alasan belum menemukan calon penerima yang layak. Berhubung jenis pembiayaan ini tidak dikenakan margin atau bagi hasil maka sumber dana diambilkan dari dana yang dihimpun dalam tabungan zakat atau rekening *asnaf*. Jumlahnya penyalurannya relatif kecil sekali mengingat penyalurannya berasal dari zakat yang disalurkan melalui BPR syariah.

Jangka waktu pembiayaan mayoritas BPRS (murabahah) rata-rata antara empat bulan sampai dengan 33 bulan. Satu BPRS besar mempunyai pembiayaan murabahah dengan jangka waktu terlama 5 tahun (60 bulan). Mayoritas produk pembiayaan yang ditawarkan berjangka waktu 12 bulanan (50%), dengan cicilan bulanan.

4.2. Jangkauan Operasional

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai jangkauan **wilayah** BPRS dan menjelaskan **nasabah** yang dapat dijangkau yakni, jumlah nasabah yang berhasil diraih dalam kegiatan operasional BPRS baik untuk pendanaan maupun pemberian pembiayaan.

4.2.1 Jangkauan Wilayah

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada masyarakat berpenghasilan kecil di pedesaan, lokasi kantor BPRS berada pada lokasi yang strategis dimana selalu mudah diakses di jalan raya, dekat dengan pasar tradisisonal atau pusat perdagangan. Hal ini dapat dilihat pada tabel IV.2. ternyata bahwa seluruh BPRS berada di ibu kota kecamatan dan di pinggir jalan raya serta sebagian besar (66,7%) berlokasi di pasar tradisional atau

pusat perdagangan. Tidak ada BPRS yang berada di ibukota kabupaten/kotamadya. Bila dilihat dari jarak ke ibukota kotamadya/kabupaten maka rata-rata jarak ke ibukota kotamadya/ kabupaten 16 km. Jarak antara BPRS dengan ibukota kabupaten/kotamadya mayoritas (83%) kurang dari 25 KM.

Tabel IV.2 :
Jangkauan geografis dan persaingan BPR Syariah

Uraian	BPR Syariah
	6
Lokasi	
Jarak Rata2 (Km) ke Ibukota Kab/Kodya	16,0
% BPR dalam Ibukota Kab/Kodya	0,0
% BPR > 25 km ke Ibukota Kab/Kodya	16,7
Jarak Rata2 (Km) ke Kecamatan	0,8
% BPR di Kecamatan	100,0
% BPR > 5 km ke kecamatan	0,0
% BPR di prs.tradisonal/pusat perdag.	66,7
% BPR pada jln utama	100,0
% BPR di daerah turis	0,0
Jangkauan geografis	
% BPR d/ lebih dari 1 kantor	50,0
Jumlah rata2 kecamatan yang dilayani	12,4
% BPR melayani 1 - 4 kecamatan	0,0
% BPR melayani => 10 kecamatan	67,7
Tabungan pd. kantor pusat BPR di kec.pusat	
% Rata2 jumlah tabungan	30,0
% BPR d/ 100% terkonsentrasi	0,0
% BPR d/ < 50% terkonsentrasi	44,2
Kredit pd. kantor pusat BPR di kec. pusat	
% Rata2 portofolio kredit/pembiayaan	46,8
% BPR d/ 100% terkonsentrasi	0,0
% BPR d/ < 50% terkonsentrasi	33,4
Situasi persaingan	
% BPR: yg merasa tdk mempunyai saingan	0,0
% BPR: > 2 pesaing	100,0
Lembaga pesaing yg disebutkan:	
% BPR: Bank komersial	33,4
% BPR: BRI unit	83,4
% BPR: BPR lainnya	83,4
% BPR: LDKP	0,0
% BPR: Koperasi dan lembaga keu. Lainnya	83,4

Walaupun BPRS tidak beroperasi di Ibukota kabupaten, namun nasabahnya dapat berasal dari Ibukota kabupaten/kodya. Baik tabungan maupun penyaluran pembiayaan BPRS tidak ada yang terkonsentrasi sepenuhnya di kecamatan tempat kedudukan bank dengan jumlah kecamatan yang dilayani oleh BPRS rata-rata 12,4 kecamatan.

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Tidak dijumpai hubungan antara jarak BPRS ke ibukota kabupaten dengan jumlah asset, namun relatif mempunyai hubungan dengan besar NPL-nya. BPRS yang berjarak 10 KM dari ibukota kabupaten 67% adalah BPRS kecil dan 33% adalah BPRS besar. Satu BPRS dengan jarak 20 s.d 30 KM tergolong BPRS besar. BPRS dengan jarak 10 KM dari ibukota kabupaten memiliki NPL yang relatif tinggi, mereka masuk kelas kinerja kredit C dan D. Sementara BPRS dengan jarak 15 KM s.d 30 KM memiliki NPL relatif rendah dengan masuk kelas kinerja kredit A dan B.

Pada tabel VI.2 juga dapat dijelaskan bahwa 50% BPRS memiliki lebih dari satu kantor bank, 50% lainnya hanya memiliki satu kantor. BPRS yang memiliki lebih dari satu kantor memiliki asset rata-rata Rp.2.2 milyar, sedangkan BPRS yang hanya memiliki satu kantor saja memiliki asset rata-rata Rp.321 juta. Jumlah kecamatan yang dilayani juga berbanding lurus dengan total asset BPRS. BPRS besar (kelas asset C) rata-rata melayani 17 kecamatan, sedangkan BPRS kecil (kelas asset A) rata-rata melayani 7 kecamatan.

4.2.2. Jangkauan Nasabah

BPRS rata-rata memiliki 512 rekening **pembiayaan** dengan rata-rata baki debet sebesar Rp. 1,8 juta. Jumlah rekening pinjaman per BPRS bervariasi antara 102 - 1496 rekening dengan baki debet rata-rata antara Rp. 553 ribu - Rp. 4,14 juta. Sebanyak 64% dari rekening pembiayaan adalah baki debet BPRS di bawah Rp.1 juta (lihat tabel VI.3).

Jumlah nasabah yang dilayani berhubungan erat dengan besar asset BPRS yaitu semakin besar asset BPRS maka semakin banyak jumlah nasabahnya dan saldo debetnya. Pada BPRS besar (kelas asset C) rata-rata melayani 945 debitur dengan outstanding rata-rata Rp.1,6 juta, sedangkan BPRS kecil (kelas asset A) rata-rata melayani 165 nasabah dengan outstanding rata-rata sebesar Rp.985 ribu.

Dengan mengabaikan BPRS yang NPLnya paling rendah dan baru didirikan, BPRS dengan kinerja paling baik (kelas kredit A) dapat melayani lebih banyak nasabah peminjan (1.496 rekening) dengan rata-rata baki debet yang lebih besar (Rp. 1,2 juta) dibandingkan BPRS dengan kinerja paling buruk (D) yang hanya memiliki 102 nasabah peminjam dengan baki debet rata-rata $\pm$ Rp. 0,6 juta.

Penyaluran pembiayaan BPRS terutama untuk pembiayaan produktif. Pembiayaan modal kerja dan invenstasi mencapai 88% dari total rekening pembiayaan atau mencapai 97% dari nominal pembiayaan yang disalurkan. Untuk tujuan konsumsi hanya 5% dari total rekening atau 2% dari total nominal. Sektor usaha dominan yang dibiayai adalah sektor perdagangan yang mencapai 77% dari jumlah baki debet di akhir bulan Desember 1999. Sektor usaha kedua terbanyak yang dilayani adalah pertanian mencapai 12%, sektor jasa 8%, dan industri kecil dan kerajian hanya 4% masing-masing dari baki debet pembiayaan (lihat tabel III.3).

Tabel IV.3 :
Konsumen dijangkau BPR Syariah

Uraian	BPR Syariah
	6
Portofolio kredit/pembiayaan	
Rata-rata jumlah rekening	512,0
Rata2 % rekening < Rp. 1 juta	64,0
Rata2 % rekening > Rp. 5 juta	6,4
Rata2 nilai per rekening (Rp.juta)	1,8
Rata2 % nilai < Rp. 1 juta	21,0
Rata2 % nilai > Rp. 5 juta	43,2
Tabungan	
Rata-rata rekening	1.434,0
Rata2 % rekening < Rp. 0.5 juta	89,2
Rata2 % rekening > Rp. 1 juta	8,5
Rata2 jlh nilai (Rp. 000)	354,0
Rata2 % nilai < Rp. 0.5 juta	21,0
Rata2 % nilai > Rp. 1 juta	71,0
Deposito	
Rata-rata rekening	26,0
Rata2 % rekening < Rp. 1 juta	21,5
Rata2 % rekening > Rp. 5 juta	44,3
Rata2 jlh nilai (Rp.juta)	9,7
Rata2 % nilai < Rp. 1 juta	1,7
Rata2 % nilai > Rp. 5 juta	91,0
Pinj. Berdsrkan tujuan/Sektor)	
KMK / Investasi	
Rata2 % rekening	88,4
Rata2 % nilai	96,7
Konsumsi	
Rata2 % rekening	4,9
Rata2 % nilai	2,1
Perdagangan	
Rata2 % rekening	80,3
Rata2 % nilai	76,6
Pertanian	
Rata2 % rekening	9,7
Rata2 % nilai	11,5
Jasa	
Rata2 % rekening	5,9
Rata2 % nilai	8,2

Jumlah rekening **tabungan** pada BPRS rata-rata adalah 1.424 rekening dengan variasi antara 167 rekening pada BPRS dengan asset paling kecil sampai dengan 3.570 rekening pada BPRS paling besar. Rata-rata nominal tabungan BPRS adalah Rp. 354.074, yang bervariasi dari Rp.54.000 di BPRS dengan asset paling kecil sampai dengan Rp.19,1 juta di BPRS dengan asset paling besar (lihat tabel III.3).

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Sebagian besar rekening tabungan nasabah BPRS adalah yang bersaldo dibawah Rp.500 ribu mencapai 89% dari total rekening tabungan, namun prosentase nilainya hanya 21% dari total tabungan. Jika dibandingkan antara nilai tabungan dengan jumlah rekening tabungan bersaldo di atas Rp.1 juta, walaupun prosentase rekeningnya kecil hanya 8,5% namun prosentase nilainya mencapai 71% dari total tabungan BPRS.

Produk **deposito** walaupun agak jarang digunakan tetapi mampu menghimpun dana lebih banyak dari tabungan. BPRS besar khususnya sangat memahami bahwa deposito adalah instrumen utama dalam memobilisasi dana. Semua BPRS menawarkan produk deposito, dengan rata-rata jumlah rekening deposito BPRS adalah 26 rekening, yang bervariasi dari hanya 1 rekening yakni pada BPRS paling buruk kinerjanya sampai dengan 89 rekening deposito pada BPRS dengan asset paling besar. Rata-rata nominal depositonya Rp.9,7 juta (lihat tabel III.3).

Sebagian besar rekening deposito nasabah BPRS adalah bernominal kurang dari Rp.5 juta yang mencapai 44,3% dari total rekening deposito, dan merupakan 91% dari total nominal deposito. Jika dibandingkan dengan deposito kurang dari Rp.1 juta prosentase rekeningnya sebesar 21,5% dengan prosentase nominalnya hanya 1,7% dari total deposito BPRS.

Produk deposito berjangka adalah faktor yang strategis untuk perkiraan pertumbuhan BPRS. BPRS dengan asset lebih dari Rp.1 milyar sampai dengan Rp.5 milyar berhasil menghimpun tabungan Rp.893,1 juta dari 3.570 penabung. BPRS yang sama dapat menghimpun dana dari deposito sebesar Rp.1,1 milyar dari hanya 89 deposan. BPRS ini mempunyai 18 deposan yang memiliki nominal deposito rata-rata Rp.46 juta. Sebanyak 39% nasabahnya mendepositokan dananya dengan nominal lebih dari Rp.5 juta yang memberikan sumbangan 91% terhadap total deposito. BPRS kecil rata-rata hanya mempunyai 7 nasabah dengan nominal deposito rata-rata Rp. 6,2 juta yang merupakan 3 kali lebih rendah dibanding rata-rata deposito BPRS besar.

4.3. Persaingan

Berdasarkan hasil survey ternyata tidak terjadi persaingan antar BPRS tetapi justru lembaga keuangan formal dan informal yang sudah lama beroperasi di tempat BPRS yang bersangkutan ternyata jadi pesaing mereka. Alasan yang diungkap dalam persaingan adalah; *pertama*, masyarakat belum begitu tahu mengenai bank dengan sistem syariah; *kedua*, masyarakat terbiasa dengan sistem perbankan konvensional dengan bunga menarik; *ketiga*, lembaga keuangan formal telah lebih dahulu hadir di daerah tempat mereka beroperasi; *keempat*, pelayanan yang diberikan oleh lembaga pesaing lebih baik; *kelima*, terdapat lembaga keuangan informal yang juga beroperasi dengan sistem syariah.

Tabel IV.4 :
Pelayanan dan jangkauan berdasarkan kelas asset

	Kelas Asset		Total Syariah
	A BPR Syariah	C BPR Syariah	
Jml BPR	3	3	6
Jasa-jasa			
Bunga tabungan < 12%			
Bunga tabungan > 12%			
Nisbah Tabungan (BPRS)	50 : 50	50 : 50	50 : 50
Bunga Deposito < 15%			
Bunga Deposito > 15%			
Nisbah Deposito (BPRS)	60 : 40	55 : 40	58 : 42
Jangkauan goegrafis			
% BPR d/ > 1 kantor	0,0	100,0	50
Rata2 kec. Yg dilayani	7,7	17,0	12,4
% BPR melayani => 10 kec.	66,7	100,0	66,7
Tab. pd. kantor pusat BPR di kec. Pusat			
% BPR d/ > 75% terkons.	66,6	33,4	50,0
% BPR d/ < 50% terkons.	0,0	66,6	33,3
Kredit pd. kantor pusat BPR di kec. Pusat			
% BPR d/ > 75% terkonsentrasi	0,0	100,0	50,0
% BPR d/ < 50% terkonsentrasi	0,0	0,0	0,0
Tdk ada saingan	0,0	0,0	0,0
Konsumen yg dilayani			
Rata2 jml rek. Kredit	165	858	512
Rata2 nilai Kredit (Rp. Juta)	0,2	1,5	0,8
Rata2 jml rek. Tabungan	355	2.494	1424
Rata2 nilai tab. (Rp. 000)	85.097	623.051	354.074
Rata2 jml rek. Deposito	7	46	26
Rata2 nilai Dep. (Rp.juta)	41,0	610,0	326

Mayoritas BPRS menghadapi minimal 3 pesaing utama (83%) yakni:

a. Bank Umum (d.h.i BRI-Unit desa dan KC/KCP[4] BCA) adalah pesaing dalam menghimpun dana masyarakat karena lebih dahulu beroperasi dan produk yang ditawarkan sangat bersaing, dengan pelayanan yang lebih cepat.

b. BPR konvensional adalah pesaing baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dana kepada masyarakat.

4 KC/KCP adalah kantor cabang dan kantor cabang pembantu

c. KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dan lembaga keuangan informal seperti *Baitul Maal Watamwil* (**BMT**) adalah pesaing dalam menghimpun maupun dalam menyalurkan dana kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil survey tingkat persaingan terhadap kelas asset dan NPL BPRS dapat diindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat persaingan pada BPRS kecil (kelas asset A) semakin kecil NPL, sebaliknya semakin tinggi tingkat tingkat persaingan pada BPRS besar (kelas asset C) semakin besar NPL.

V. Pengawasan, Perlindungan Simpanan dan Asosiasi BPR

5.1. Pengawasan oleh Bank Indonesia

Dalam sub-bab pengawasan akan diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan; pelaksanaan pemeriksaan *on-site*, jangka waktu, jumlah pemeriksa yang terlibat, dan saran perbaikan tugas pengawasan BPRS oleh Bank Indonesia.

Seluruh BPRS diperiksa kurang dari 1 tahun, kecuali satu BPRS yang baru beroperasi dengan sistem syariah. Hasil survey menunjukan tidak ada hubungan antara volume dan kinerja BPRS dengan frekuensi pemeriksaan (lihat tabel V.1).

Ukuran asset tidak menjadi pertimbangan untuk menentukan banyaknya pemeriksa. Hal ini dapat dimaklumi karena tingkat asset BPRS yang paling besar hanya berada di kelas asset C (Rp.3,077 milyar).

Jumlah pemeriksa pada BPRS dengan kinerja kredit paling buruk (D) sebanyak 3 org dibandingkan dengan 3 kelas lainnya sebanyak 2 orang. BPRS umumnya diperiksa selama 3-4 hari (60%), dan diperiksa selama 5-7 hari (40%).

Lama pemeriksaan tergantung dari besarnya asset BPRS, yakni seluruh BPRS kecil dan 30% BPRS besar diperiksa 3-4 hari kerja, dan 70% BPRS besar diperiksa 5-7 hari kerja.

Bank Indonesia memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada semua BPRS diperiksa. Satu BPRS belum menerima LHP pada saat dilakukan survey.

Sebagaimana terlihat di tabel V.2, rekomendasi difokuskan pada tiga saran perbaikan pengawasan. Saran tertinggi adalah peningkatan kualitas SDM pengawas BI khususnya pemahaman terhadap operasi BPRS. Masih rendahnya pemahaman pengawas BI terhadap BPRS dapat dimaklumi karena sistem syariah relatif baru dikenal. Saran kedua adalah peningkatan frekuensi dan kontinuitas pemeriksaan yakni, antara 1-4 kali setahun. Saran ketiga, BPRS juga membutuhkan adanya bimbingan dan bantuan teknis sebagai kelanjutan dari pemeriksaan *on site*.

Tabel V.1
Pengawasan, Pelindungan Simpanan dan Asosiasi

Uraian	BPR Syariah
	6
Pengawasan langsung BI/ on-Site supervision	
Terakhir kali dilaksanakan:	
% BPR < 1 thn yll	83,3
% BPR 1-2 thn yll	0,0
% BPR > 2 thn yll	0,0
Rata2 hari pemeriksaan	5,0
% BPR 1-2 hari	0,0
% BPR 3-4 hari	60,0
% BPR 5-7 hari	40,0
Rata2 jml pengawas	2,0
% BPR 2 pengawas	80,0
% BPR 3-4 pengawas	20,0
Meneriman Laporan hasil pemeriksaan (% BPR)	80,0
Publikasi TKS hasil pemeriksaan (% BPR Setuju)	83,3
Diaudit oleh accountant public	
% BPR yg blm diaudit	50,0
% BPR < 1 thn yll	66,7
% BPR> 1 thn yll	33,3
Perlindungan simpanan/Deposit protection	
U/ mengukur keamanan simpanan:	
% BPR yg menekankan pentingnya jaminan simp.	83,3
% BPR: asuransi simpanan saja	0,0
% BPR: pencegahan saja	16,7
% BPR: kombinasi dari kedua di atas	83,3
Organisasi asuransi simp.:	
% BPR: Pemerintah	66,7
% BPR: Bank Indonesia	16,7
% BPR: Institusi khusus	16,7
% BPR: Kerjasama BPR	0,0
% BPR: BPR dan Pemerintah	0,0
Siap membayar premi asuransi (% BPR)	100,0
Asosiasi BPR	
% BPR yang menjadi anggota	100,0
% BPR: bayaran u/ jasa khusus	100,0

Satu BPRS mengharapkan BI memberikan masukan secara berkala kepada mereka sebagai hasil evaluasi dari laporan bulanan yang telah disampaikan. Masukan ini akan dipergunakan oleh BPRS untuk merencanakan tindakan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

Mereka juga menyatakan bahwa rekomendasi pemeriksaan BI tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena kurangnya dukungan dari pemilik. Untuk itu disarankan agar BI memantau secara ketat pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan.

Seluruh BPRS mendukung publikasi hasil pemeriksaan BI, kecuali satu BPRS (17%). BPRS yang berkinerja paling buruk dengan tingkat kelas asset kecil mendukung publikasi tingkat kesehatan hasil pemeriksaan.

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Tabel V.2 :
Rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan BPR(S)

BPR Syariah 6	Rekomendasi
3	*Meningkatkan frekuensi dan kontinuitas dari pemeriksaan dan bimbingan.*
3	*Menambahkan/meningkatkan bimbingan sbg bagian dari on site supervision*
–	*Menidentifikasi dan membantu secara aktif dalam menemukan solusi masalah dijumpai.*
1	*Memberikan masukan kepada BPR/BPRS baik secara bulanan maupun triwulanan dari Lapbul*
–	*Mengawasi secara ketat pelaksanaan penerapan rekomendasi pengawasan, termasuk melibatkan pengurus .*
6	*Meningkatkan profesionalitas staff (termasuk menambah pengetahuan di bidang operasional BPR syariah), atau mendelegasikan kepengawas/ akuntan publik*

Dari 83% BPRS yang mendukung publikasi hasil pemeriksaan mengemukan alasan antara lain bahwa publikasi hasil pemeriksaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku nasabah potensial, sehingga meningkatkan citra BPRS. Selain itu juga disarankan adanya sistem peringkat BPR termasuk BPRS yang disebarluaskan kepada masyarakat.

Tabel V.3 :
Argumen pro & kontra publikasi tingkat kesehatan bank

BPR Syariah 5	Argumen PRO
4	Memotivasi/menekan BPR untuk secara serius meningkatkan tingkat kesehatannya
5	Penting u/ mengiformasikan ke publik karena kesehatan bank adalah faktor penentu kepercayaan masyarakat.
4	Memungkinkan perbandingan antar BPR dan pesaingan timbul persaingan sehat
3	Bank yg sehat membutuhkan keterbukaan, meningkatkan image bagi BPR Sehat.
	Jawaban Ya lainya, dlmbentuk rangking BPR; menginformasikan kemajuan dari bimbingan BI; Ya, hanya u/ diinformasikankepada nasabah saja; YA, terhadap laporan keuangan yang dipublikasi.

BPR Syariah 1	KONTRA Arguments
1	Rahasia dan kebutuhan internal antara BI & BPR
1	Menghambat peningkatan kesehatan bagi BPR KS dan TS
1	Memprovokasi bank untuk di-rush, dan mempengaruhi BPR lainnya.
1	Umumnya menyebabkan image BPR menjadi negatif
	Lainnya: Hasil penilaian BI bisa jadi salah; lebih baik mengenakan sanksi yg berat kpd BPR non Sehat; Masyarakat desa belum mengerti informasi kesehatan BPR; Laporan Laba Rugi telah dipublikasikan.

Adapun alasan BPRS yang menolak publikasi hasil pemeriksaan BPR karena sifatnya sangat rahasia dan seharusnya hanya diketahui oleh BPRS dan Bank Indonesia. Argumen lainnya yang lebih kuat dan saling terkait adalah publikasi ini akan menyebabkan *rush* yang kemungkinan juga akan membawa dampak negatif terhadap BPRS yang lain.

5.2. Audit oleh Akuntan Publik

BPRS yang diaudit oleh akuntan publik adalah 66% BPRS besar (kelas asset C), dan 34% BPR kecil (kelas asset A) (lihat tabel V.4). Untuk BPRS kecil pemeriksaan oleh akuntan

Tabel V.4 :
Pengawasan, Perlindungan Simpanan dan Assosiasi Berdasarkan Asset

Uraian	Kelas Asset		Total BPR Syariah
	A	C	
Jml BPRS	3	3	6
BI Pengawasan lsg (on-Site sup.)			
Terakhir kali dilaksanakan			
% BPR < 1 thn yll	100,0	100,0	100,0
% BPR 1-2 thn yll	0,0	0,0	0,0
% BPR > 2 thn yll	0,0	0,0	0,0
Rata2 hari pemeriksaan	3,5	5,3	4,6
% BPR 1-2 hari	0,0	0,0	0,0
% BPR 3-4 hari	100,0	33,3	60,0
% BPR 5-7 hari	0,0	66,7	40,0
Rata2 jml pengawas	2,5	2,0	2,2
% BPR 2 pengawas	50,0	100,0	80,0
% BPR 3-4 pengawas	50,0	0,0	20,0
Meneriman LHP (% BPR)	100,0	66,7	83,3
Publikasi TKS hsl pmrksn (% BPR Setuju)	66,7	100,0	83,3
Diaudit oleh accountant public			
% BPR yg blm diaudit	66,7	33,3	50,0
% BPR < 1 thn yll	100,0	50,0	83,3
% BPR> 1 thn yll	0,0	50,0	16,7
Perlindungan simpanan			
U/ mengukur keamanan simpanan:			
% BPR yg menekankan pentingnya jmnn simp.	100,0	100,0	100,0
% BPR: asuransi simpanan	0,0	0,0	0,0
% BPR: ukuran pencegahan	0,0	33,3	16,7
% BPR: kombinasi dari keduanya	100,0	66,7	83,3
Pengelola asuransi simp.			
% BPR: Pemerintah	33,3	66,6	66,7
% BPR: Bank Indonesia	33,3	33,3	16,7
% BPR: Institusi khusus	33,3	0,0	16,7
% BPR: Kerjasama antar BPR	0,0	0,0	0,0
% BPR: BPR dan Pemerintah	0,0	0,0	0,0
Siap membayar premi asuransi (% BPR)	100,0	100,0	100,0
Asosiasi BPR			
% BPR yang menjadi anggota	100,0	100,0	100,0
Siap membayar iuran			
Rata2 Iuran ang. blnan (Rp.000)	23,3	35,0	28,0
% BPR: bayaran u/ jasa khusus	100,0	100,0	100,0

publik hanya terbatas pada pemeriksaan pajak. BPRS yang pernah diperiksa oleh akuntan publik 34% adalah dengan kinerja baik (kelas kinerja kredit A), sedangkan 66% berkinerja buruk (kelas kinerja kredit C) (lihat tabel V.5).

5.3. Perlindungan Simpanan

Perlindungan simpanan diajukan beberapa alternatif pilihan yang diklasifikasikan menjadi 3 pilihan, yaitu a) memperbaiki perlindungan simpanan melalui asuransi simpanan, b) memperbaiki kualitas SDM dan c) mengurangi risiko kredit dengan menekankan pada

Tabel V.5
Pengawasan, Perlindungan Simpanan dan Asosiasi Berdasarkan kinerja Kredit

Uraian	Kelas Kinerja Kredit				Total BPR Sy.
	A BPR Sy.	B BPR Sy.	C BPR Sy.	D BPR Sy.	
Jml BPR	2	1	2	1	6
BI on-Site supervision					
Terakhir kali dilaksanakan					
% BPR < 1 thn yll	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
% BPR 1-2 thn yll	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
% BPR > 2 thn yll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rata2 hari pemeriksaan	5,0	4,0	4,0	4,0	4,6
% BPR 1-2 hari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% BPR 3-4 hari	50,0	100,0	50,0	100,0	60,0
% BPR 5-7 hari	50,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Rata2 jml pengawas	2,0	2,0	2,0	3,0	2,2
% BPR 2 pengawas	100,0	2,0	100,0	0,0	80,0
% BPR 3-4 pengawas	0,0	0,0	0,0	100,0	20,0
LHP diterima (% BPR)	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
Publikasi TKS hsl pemerik. (Setuju % BPR)	100,0	100,0	100,0	100,0	83,3
Diaudit o/ akuntan publik					
% BPR yg blm diaudit	50,0	100,0	0,0	100,0	50,0
% BPR < 1 thn yll	50,0	0,0	50,0	0,0	33,3
% BPR > 1 thn yll	0,0	0,0	50,0	0,0	16,7
Perlindungan simpanan					
U/ mengukur keamanan simpanan:					
% BPR yg menekankan					
pentingnya jmnn simp.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
% BPR: asuransi simpanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% BPR: ukuran pencegahan	50,0	0,0	0,0	0,0	16,7
% BPR: kombinasi dr diatas	50,0	100,0	100,0	100,0	83,3
Organisasi asuransi simp.					
% BPR: Pemerintah	100,0	0,0	50,0	100,0	66,7
% BPR: Bank Indonesia	0,0	100,0	0,0	0,0	16,7
% BPR: Institusi khusus	0,0	0,0	50,0	0,0	16,7
% BPR: Kerjasama BPR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% BPR: BPR dan Pemerintah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Siap membayar premi asuransi (% BPR)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Asosiasi BPR					
% BPR yg menjadi anggota	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Siap membayar iuran					
Iuran blnan rata2 (Rp.000)	35,0	0,0	22,5	25,0	28,0
% BPR: Bayaran u/ jasa khusus	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

analisis kredit dan jaminan. Dua pilihan terakhir dapat dijadikan sarana preventif dalam memperbaiki kinerja dan membatasi kerugian atas penyaluran pembiayaan, serta memberikan perlindungan bagi penghimpunan dana pihak ketiga. Pilihan pertama akan memberikan rasa aman bagi masyarakat penyimpan dana dan memiliki dampak meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sebagian besar BPRS memilih untuk menggunakan gabungan sarana preventif dan asuransi simpanan (83%). Hanya satu (17%) BPRS yang menggunakan sarana preventif. Sarana preventif adalah yang berhubungan dengan aspek-aspek perkreditan dan kualitas SDM.

Mayoritas BPRS mengharapkan pemerintah menjadi motor penggerak lembaga penjamin simpanan (67%), seperti pelaksanaan jaminan pemerintah yang masih berlaku saat ini. Sedangkan lembaga lain yang diharapkan untuk menjadi motor penggerak lembaga penjaminan adalah Bank Indonesia (17%) dan lembaga yang dibentuk secara khusus (17%). Pilihan pemerintah menjadi lembaga ideal ada pada 33% BPRS kecil dan 67% BPRS besar.

5.4. Asosiasi BPR

Seluruh BPRS menjadi anggota **Asbisindo**, dan hanya satu yang tidak tergabung dalam **Perbarindo**. Asbisindo adalah asosiasi yang beranggotakan BPR yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, sedangkan Perbarindo merupakan asosiasi yang beranggotakan BPR tanpa melihat sistem operasi maupun kepemilikan. 80% direktur BPRS menghendaki iuran bulanan keanggotaan pada Perbarindo dibatasi antara Rp. 20.000 s.d Rp.25.000, namun ada juga BPRS (20%) bersedia membayar Rp.50.000 perbulan (lihat tabel V.5).

Selain menjadi anggota Perbarindo, BPRS juga tergabung pada Asbisindo (Asosiasi BPR Syariah), dan selaku anggota juga membayar iuran keanggotaan. Mayoritas (60%) BPRS menghendaki iuran bulanan kepada Asbisindo sebesar Rp.50.000. Satu BPRS menginginkan iuran Rp.25.000 dan satu BPR menginginkan iuran bulanan Rp.200.000,00 dengan alasan bahwa keberadaan BPR dengan sistem syariah relatif masih baru baik di mata masyarakat luas maupun bagi pengelola BPRS. Untuk itu perlu promosi yang dapat dilakukan melalui Asbisindo, seminar, ceramah-ceramah dan pelatihan kepada SDM BPRS, yang kesemuanya itu membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit.

Seluruh BPRS bersedia untuk membayar *fee* tambahan terhadap jasa tambahan yang kemungkinan akan diberikan oleh asosiasi di masa mendatang. Salah satu fungsi dan jasa yang diharapkan BPRS di masa datang dari asosiasi adalah untuk meningkatkan aktivitasnya dalam bidang *pengembangan SDM* dengan cara memfasilitasi atau menyediakan pelatihan. Pernyataan ini sesuai dengan fakta di lapangan bahwa kualitas SDM merupakan rintangan utama untuk meningkatkan operasi BPRS.

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Tabel V.6 :
Fungsi dan Jasa yang diharapkan oleh Asosisasi BPR(S)

BPR Syariah 6	Fungsi dan Jasa
6	Memfokuskan diri pada Sumber Daya Manusia BPR dengan mengkoordinir / menyediakan training.
6	Menyediakan jasa konsultasi, khususnya pada BPR yang berkinerja buruk
4	Mengorganisasikan dan menyalurkan kepentingan dan aspirasi seluruh anggotanya
1	Menidentifikasi dan memfasilitasi akses terhadap dana murah
–	Mengorganisasikan pertukaran informasi melalui media yang beragam
3	Mengukung peningkatan image BPR / termasuk mempromosikan BPR syariah (pada BPR syariah)
2	Mengembangkan/memfasilitasi bentuk dari lembaga perlidungan/penjaminan simpanan, atau mendelegasikan kepengawas/ akuntan publik
–	Memfasilitasi kerjasama antar BPR
–	Membangun sistem informasi (seperti DKM Bank Indonesia) peminjam-peminjam nakal
–	Mengembangkan standar pengajian dan sistem kerja
–	Berfungsi sebagai pengawas BPR, menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia

Jasa konsultasi adalah jasa lainnya yang dibutuhkan oleh BPRS. Nampaknya asosiasi BPR di Jawa Timur berhasil menciptakan kesadaran bagi anggotanya untuk memanfaatkan asosiasi tempat berkonsultasi masalah operasional BPRS. Fungsi ketiga yang diharapkan BPRS (4 BPRS) adalah dapat *mengorganisasi dan menyalurkan kebutuhan dan aspirasi* seluruh anggotanya. Jasa lain yang diharapkan adalah mengidentifikasi dan memfasilitasi anggota untuk mengakses dana murah (lihat tabel V.6).

VI. Kesimpulan dan Saran

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Kondisi Internal

a. Struktur asset BPRS sebagian besar terdiri dari portofolio pembiayaan sebesar 67%, penempatan pada bank lain sebesar 26%, sedangkan struktur kewajiban terdiri dari deposito sebesar 26%, tabungan sebesar 29% dan modal disetor sebesar 21%.

b. Pendapatan BPRS terutama berasal dari kegiatan pembiayaan yang disalurkan yakni 88% dari total pendapatan, sedangkan pengeluaran biaya operasional mencapai 99% dari total biaya BPRS. Biaya paling banyak yang dikeluarkan BPRS adalah biaya penghimpunan dana yakni sebesar 28% dari total biaya.

c. Kebanyakan BPRS tidak dapat memenuhi ketentuan PPAP, sehingga hal ini merupakan masalah serius yang harus segera dibenahi.

d. Penyebab tingkat keuntungan BPRS rendah adalah rendahnya efisiensi, sehingga margin yang diperoleh terlalu kecil. Salah satu bentuk rendahnya efisiensi adalah jumlah pegawai BPRS lebih banyak 2 atau 3 kali lipat dibandingkan dengan BRI unit di wilayah yang sama yang assetnya lebih besar empat kali dari BPRS.

e. Kelebihan likuiditas adalah kondisi yang dialami oleh BPRS besar karena berhasil menghimpun dana dari deposito, namun kesulitan memberikan pembiayaan (kredit) baru. Sebaliknya bagi BPRS kecil mengalami kekurangan modal karena kesulitan dalam memobilisasi dana dari masyarakat.

f. BPRS dengan tingkat kewenangan relatif tinggi berkinerja lebih buruk dibandingkan BPRS yang menikmati kewewenangan tinggi.

g. Pemahaman terhadap fungsi internal kontrol masih beragam, yakni sebagai fungsi pengawasan direktur dan yang lainnya sebagai fungsi pengawasan dari dewan komisaris.

h. BPRS sulit melakukan eksekusi jaminan secara formal sehingga BPRS cenderung menghindari eksekusi jaminan melalui jalur hukum karena biayanya terlalu mahal, tidak efisien, dan kurang transparan. BPRS lebih menyukai eksekusi jaminan dilakukan secara kekeluargaan karena prosesnya lebih cepat dan tidak banyak mengeluarkan biaya.

i. Pemahaman BPRS mengenai manajemen likuiditas belum baik yakni dengan menganggap manajemen likuiditas adalah rasio likuiditas yang digunakan dalam rasio CAMEL dan penempatkan dana likuid sebesar prosentase tertentu pada bank lain. Hanya 33% manajemen BPR yang memahami manajemen likuiditas dengan benar dengan melaksanakan *maturity profile*.

j. Faktor yang menyebabkan kredit macet adalah faktor *eksternal*, seperti kegagalan usaha dan karakter dari debitur yang menyebabkan kredit macet, dan faktor *internal* seperti ketidakmampuan dalam melakukan analisis yang baik, kurang dipenuhinya prosedur pemberian kredit yang baik dan kurang atau tidak ada agunan tambahan. Mayoritas BPR tidak memiliki standar *penghapusan kredit macet (write off).* BPR kecil tidak melakukan *write-off*, karena mengharapkan masih akan dibayar di samping itu kecilnya pembentukan PPAP.

k. Kebutuhan pelatihan mencakup berbagai aspek operasional BPR, mulai dari level direksi sampai dengan staf operasional. Tetapi pelatihan yang dilakukan selama ini belum membawa perbaikan operasional secara secara berarti.

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

6.1.2. Persaingan

a. Masalah kekurangan modal dan kelebihan likuiditas dikarenakan rendahnya orientasi pasar BPRS dan kurangnya promosi dapat diatasi dengan jiwa kewirausahaan, pengembangan produk, dan pemasaran yang baik.

b. Prosedur yang berbelit-belit dan panjang merupakan masalah utama dalam penyaluran kredit BPRS dan di lain pihak lembaga keuangan pesaing dapat menawarkan layanan lebih cepat.

6.1.3. Pengawasan

a. Terbatasnya jumlah dan kurangnya kemampuan pengawas BI dalam bidang operasional BPRS.

b. Pengelolaan aktiva produktif belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pemenuhan PPAP, dan penghapusan kredit macet.

6.2. Saran

6.2.1. Prioritas Kebijakan

a. Peraturan perbankan agar diterapkan dengan tegas sehingga dapat membersihkan BPRS-BPRS yang sudah tidak dapat disehatkan kembali. Menguatkan industri BPRS antara lain melalui sistem perlindungan simpanan dan pemberdayaan asosiasi BPR akan sulit dilaksanakan jika BPR-BPR yang tidak sehat tidak dibersihkan. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan yang cepat dan tepat untuk lebih menjadikan industri BPRS sehat, dapat tumbuh secara berkelanjutan, memiliki citra yang baik, dan dapat duduk sebanding dengan BPR konvensional.

b. Mendukung peningkatkan lembaga keuangan mikro bukan bank dan konversi ke BPRS untuk mengisi gap pasar keuangan di tingkat pedesaan yaitu dengan memperjelas status hukum dan peraturan operasional yang pasti sehingga memungkinkan lembaga keuangan mikro seperti BMT, BKD dan LDKP dapat mengembangkan diri serta memperluas wilayah pelayanan di tingkat pedesaan. Diharapkan juga lembaga keuangan mikro bukan bank dapat meningkatkan statusnya menjadi BPR apabila operasionalnya makin berkembang dan memenuhi persyaratan menjadi BPR, atau sebaliknya.

6.2.2. Bantuan Teknis yang Diprioritaskan

a. Mengembangkan sistem pelatihan manajemen untuk meningkatkan kemampuan lembaga BPR. Untuk itu diperlukan beberapa persiapan yang menyangkut materi, tenaga pelatih yang baik, dan evaluasi terhadap dampak pelatihan yang dikemas dalam bentuk

sistem pelatihan dengan melibatkan asosiasi BPR. Dengan adanya monitoring tersebut diharapkan pelatihan yang dilakukan dapat diperbaiki dari waktu ke waktu dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kemampuan lembaga BPR.

b. Mengembangkan sistem konsultasi manajemen yang dapat mendukung pengembangan BPRS melalui asosiasi BPR. Konsultasi manajemen melalui asosiasi tersebut memiliki dua keuntungan. *Pertama*, BPR mengharapkan asosiasi BPR memberikan pelatihan bagi SDMnya dan bantuan teknis di mana mereka bersedia membayar jasa konsultasi yang diberikan. *Kedua*, menguatkan asosiasi BPR dengan mengembangkan manajemen konsultasi.

c. Mendukung peningkatan efisiensi melalui komputerisasi kerena dapat menggantikan pekerjaan operasional semi manual dan memperpendek waktu pengerjaan pelaporan. Oleh sebab itu, komputerisasi harus menjadi bagian dari rencana pengembangan kelembagaan BPRS.

6.2.3. Prioritas Pengawasan

a. Konsentrasi pemeriksaan hendaknya pada BPR yang kurang sehat dan tidak sehat, serta perlu peningkatan kemampuan pengawas mengenai operasional BPRS.

b. Berkaitan dengan CAMEL, disarankan untuk lebih meningkatkan pembobotan pada KAP dan pemenuhan PPAP.

Tabel II.1a :
Klasifikasi Sampel BPR Konvesional dan Syariah
Di Jawa Timur

	Jml BPR Konv.	BPR Konv.	BPRS
Jml BPR	**115**	72	6
Tipe BPR			
% BPR Sebelum Pakto 88	15,0	11,1	100,0
% BPR Setelah Pakto 88	80,0	76,4	0,0
% BPR Ex-LDKP	20,0	12,5	0,0
Status Hukum			
% Perusahaan Terbatas	77,0	68,0	100,0
% Perusahaan Daerah	27,0	18,1	0,0
% Koperasi	11,0	13,9	0,0
Tahun Beroperasi			
Rata2 beroperasi	**115,0**	8,4	4,0
% BPR 1 -3 tahun	26,0	19,5	17,0
% BPR 5 -9 tahun	70,0	65,3	83,0
% BPR 10 thn dan lebih	19,0	15,3	0,0
Asset			
Rata2 (Rp. milyar)	**115,0**	3,8	1,2
% BPR < Rp.500 juta	29,0	26,4	50,0
% BPR Rp.500 - < 1 Milyar	29,0	23,6	0,0
% BPR Rp.1 - Rp.5 Milyar	36,0	31,9	50,0
% BPR > Rp.5 Milyar	21,0	18,1	0,0
% Portofolio kredit/Asset			
Prosentase %	**115,0**	68,0	67,0
% BPR < 60%	35,0	30,6	50,0
% BPR > 85%	29,0	23,6	17,0
Rata-rata outstanding kredit			
Rata2 (Rp. juta)	**115,0**	3,4	1,6
% BPR < Rp 1 juta	29,0	18,1	33,0
% BPR > Rp.2 juta	45,0	36,1	17,0
% Kredit Non Lancar			
Rata2 (%)	**115,0**	15,8	18,0
% BPR < 10%	55,0	51,4	50,0
% BPR > 25%	29,0	23,6	17,0

Keterangan:
Angka prosentase pd BPR konvensional prosentase di jatim thd jumlah BPR kolom sampel, sedangkan BPRS nilai baris dibandingkan dengan total BPRS di Jatim

Table II.2a :
Variasi Assets, Portofolio Kredit dan Kualitas Aktiva Kredit
dari BPR Konvensional dan Syariah di Jawa Timur per Desember 1999

	BPR Konvensional	BPR Syariah
Jumlah BPR	422	6
Jumlah Kantor	453	10
Asset *)		
Rata-rata Asset (Rp. Jutaan)	1.672	1.240
% BPR < Rp. 1 Milyar	56,1	50,0
% BPR > Rp. 5 Milyar	5,1	–
% BPR-LDKP < Rp.1 Milyar	100	–
Portofolio Kredit/Asset *)		
Rata-rata %	70,5	64
% BPR < 50%	18,1	17
% BPR > 85%	20,5	17
Rata2 kredit/rata2 asset (%)	68	67
Kredit Non performing *)		
% Rata-rata	19,1	18
% BPR < 10%	48,6	50
% BPR > 25%	20,7	17

*) dgn 414 BPR konvensional selisih 8 BPR dikeluarkan krn Dicabut dan atau akan dicabut izin usahanya untuk BPRS dari masing-masing individu BPRS

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Tabel III.1a :
Neraca Gabungan berdasarkan Kelas Asset (dlm Rp. Juta)

Uraian	Asset Class								Total	
	A		B		C		D			
	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS
Jml BPR	29	3	29	0	36	3	21	0	115	6
ASSETS										
Kas	147,9	25,9	358,4	-	1.428,0	37,9	3.137,1	-	5.071,4	63,8
ABA/BI	935,8	93,5	4.426,2	-	21.629,2	1.813,4	66.918,6	-	93.909,9	1.906,9
Portofolio kredit	6.544,4	488,3	13.102,1	-	61.206,9	4.526,0	182.473,3	-	263.326,6	5.014,3
Lancar(%)	80,9	83,7	78,8	-	89,3	92,2	87,6	-	87,4	88,0
Kurang Lancar (%)	6,2	4,4	4,8	-	3,3	3,2	3,6	-	3,7	3,8
Diragukan (%)	6,8	11,3	9,4	-	4,6	4,4	4,6	-	4,8	7,9
Macet (%)	6,0	0,7	7,0	-	2,9	0,2	4,2	-	4,1	0,5
(-) PPAP	(185,2)	(9,3)	(587,9)	-	(2.071,8)	(152,5)	(2.377,9)	-	(5.222,8)	(161,8)
Asset Tetap	1.256,3	151,4	2.122,1	-	8.053,9	180,2	15.395,6	-	26.828,0	331,6
(-) Penyusutan	(427,3)	(30,1)	(646,9)	-	(3.444,0)	(100,4)	(5.735,4)	-	(10.253,6)	(130,6)
Asset lainnya	389,3	245,7	815,9	-	4.138,0	170,0	7.324,7	-	12.667,8	415,8
TOTAL ASSETS	8.661,2	965,4	19.589,9	-	90.940,2	6.474,6	267.136,0	-	386.327,4	7.439,9
HUTANG/LIABILITIES										
Hutang Lancar	49,7	2,6	105,6	-	606,1	25,1	2.270,1	-	3.031,5	27,6
Tabungan	2.108,4	260,2	4.939,9	-	25.990,7	1.869,2	44.679,4	-	77.718,4	2.129,4
Deposito	1.163,2	116,8	3.138,9	-	27.132,7	1.830,4	184.502,2	-	215.937,1	1.947,2
ABP/BI/kredit	1.424,4	12,1	3.678,9	-	14.276,1	1.127,0	8.473,2	-	27.852,7	1.139,0
Kewajiban lainnya	226,3	6,2	687,7	-	2.007,9	57,4	7.119,9	-	10.041,9	63,6
EQUITY										
Modal disetor	3.121,9	619,5	4.815,4	-	11.770,5	921,8	11.745,2	-	31.453,0	1.541,3
Modal Lainnya	487,5	16,8	117,9	-	1.335,5	98,6	675,0	-	2.615,9	115,4
Cadangan	339,8	0,0	464,2	-	4.032,4	185,0	7.093,5	-	11.930,0	185,0
LABA/RUGI										
Akumulasi	(521,9)	(50,8)	(738,5)	-	(317,8)	21,1	(3.309,5)	-	(3.410,8)	(29,7)
Thn berjalan	261,8	(18,0)	902,9	-	4.106,0	339,1	3.887,0	-	9.157,7	321,1
TOTAL PASIVA	8.661,2	965,4	19.589,9	-	90.940,0	6.474,6	267.136,0	-	386.327,4	7.439,9
Tunai / Asset	2%	3%	2%	-	2%	1%	1%	-	1%	1%
ABA / Asset	11%	10%	23%	-	24%	28%	25%	-	24%	26%
Kredit / Asset	76%	51%	67%	-	67%	70%	68%	-	68%	67%
Akt.Tetap bersih / Ass	10%	13%	8%	-	5%	1%	4%	-	4%	3%
TAB / Passiva	24%	27%	25%	-	29%	29%	17%	-	20%	29%
DEP / Passiva	13%	12%	16%	-	30%	28%	69%	-	56%	26%
MDL Disetor / Pass	36%	64%	25%	-	13%	14%	4%	-	8%	21%
Laba (Ak / current) / Pass	-3%	-7%	1%	-	4%	6%	0%	-	1%	4%

A: < Rp.500jt, B:Rp.500. -<Rp1M ;C: Rp1M - Rp5M; D: > Rp5M

Tabel III.2a :
Neraca Gabungan berdasarkan kelas kredit non lancar (dlm juta)

Uraian	Asset Class								Total	
	A		B		C		D			
	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS
Jml BPR	40	2	15	1	31	2	29	1	115	6
ASSETS										
Kas	2.224,2	9,4	329,1	20,2	1.125,4	23,4	1.392,7	10,6	5.071,4	63,8
ABA/BI	51.886,7	210,5	3.130,5	373,6	26.564,7	1.307,8	12.328,0	15,0	93.909,9	1.906,9
Fotofolio kredit	145.830,0	1.995,7	22.996,6	1.048,5	50.323,9	1.913,6	44.176,1	56,4	263.326,6	5.014,3
Lancar (%)	98,7	99,8	92,9	93,5	80,9	83,3	54,9	32,1	87,4	77,2
KL (%)	0,4	0,2	2,6	4,0	5,2	5,9	13,4	11,0	3,7	5,3
D (%)	0,6	0,0	3,7	2,1	9,7	10,7	14,4	51,3	4,8	16,0
Macet (%)	0,3	0,0	0,8	0,4	4,1	0,3	17,3	5,7	4,1	1,6
(-) PPAP	(1.505,5)	(112,2)	(1.099,7)	(16,3)	(1.882,2)	(32,7)	(735,4)	(0,6)	(5.222,8)	(161,8)
Asset Tetap	7.710,2	115,0	2.155,6	37,3	9.011,7	157,2	7.950,4	22,1	26.828,0	331,6
(-) Penyusutn	(3.621,0)	(10,4)	(822,0)	(16,0)	(3.643,4)	(93,7)	(2.167,2)	(10,5)	(10.253,6)	(130,6)
Asset lainnya	5.027,0	219,5	633,8	19,4	4.973,8	158,0	2.033,3	18,8	12.667,8	415,8
TTL ASSETS	207.551,7	2.427,5	27.323,9	1.466,8	86.473,8	3.433,8	64.977,9	111,9	386.327,4	7.439,9
LIABILITIES										
Htg Lancar	2.237,5	6,5	75,3	0,7	515,1	20,5	203,7	0,0	3.031,5	27,6
Tabungan	35.636,3	895,9	7.617,3	207,3	28.107,1	975,3	6.357,8	50,9	77.718,4	2.129,4
Deposito	123.176,2	501,8	9.425,4	343,0	30.145,8	1.101,7	53.189,6	0,8	215.937,1	1.947,2
ABA/BI/loans	12.205,6	341,3	3.715,8	685,7	5.904,3	100,0	6.027,0	12,1	27.852,7	1.139,0
Kewajiban lainnya	5.941,9	29,9	685,8	21,3	2.038,1	10,3	1.375,7	2,1	10.041,9	63,6
EQUITY										
Modal disetor	11.285,4	577,9	2.931,3	155,0	12.150,4	714,6	5.084,9	93,7	31.453,0	1.541,3
Modal Lainnya	1.005,5	0,0	225,0	0,0	1.044,8	113,6	340,6	1,8	2.615,9	115,4
Cadangan	3.309,3	25,7	777,0	0,0	2.861,1	159,3	4.982,6	0,0	11.930,0	185,0
LABA/RUGI										
Akumulasi	4.070,3	0,0	577,6	21,1	1.428,9	(0,3)	(9.487,7)	(50,5)	(3.410,8)	(29,7)
Thn berjalan	8.683,5	48,6	1.292,5	32,8	2.277,9	238,8	(3.096,1)	0,9	9.157,7	321,1
LIABILITIES & EQUITY	207.551,7	2.427,5	27.323,9	1.466,8	86.473,8	3.433,8	64.977,9	111,9	386.327,4	7.439,9
Kas/Asset	1%	0%	1%	1%	1%	1%	2%	10%	1%	1%
ABA&BI /Asset	25%	9%	11%	25%	31%	38%	19%	13%	24%	26%
Kredit/Asset	70%	82%	84%	71%	58%	56%	68%	50%	68%	67%
Akt.tetap/Asset	2%	4%	5%	1%	6%	2%	9%	10%	4%	3%
ABP/Passiva	6%	14%	14%	47%	7%	3%	9%	11%	7%	15%
Tab/Passiva	17%	37%	28%	14%	33%	28%	10%	46%	20%	29%
Dep/Passiva	59%	21%	34%	23%	35%	32%	82%	1%	56%	26%
Mdl dstr/Pass	5%	24%	11%	11%	14%	21%	8%	84%	8%	21%
LR/Passiva	7%	3%	7%	4%	4%	7%	-19%	-108%	1,5%	3,9%

Kredit non lancar: A: <5 %, B: 5 -< l0%, C: 10 – 25%, D: > 25%

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Gambar III.1a :
Struktur Neraca Rata-Rata
BPR Konvensional dan Syariah

Kelas Asset A					
Pos Nrc	Konv	Syariah	Pos Nrc	Konv	Syariah
Kas	2%	4%	Tb & Dp	37%	40%
ABA	11%	11%	ABP/BI	15%	4%
Pembiayaan	73%	54%	Equity	53%	37%
			Profit	–9%	–16,0%

Kelas Kinerja Kredit A					
Pos Nrc	Konv	Syariah	Pos Nrc	Konv	Syariah
Kas	2%	1%	Tb & Dp	58%	52%
ABA	10%	8%	ABP/BI	12%	9%
Pembiayaan	79%	62%	Equity	19%	38%
			Profit	7%	5%*)

Kelas Asset B					
Pos Nrc	Konv	Syariah	Pos Nrc	Konv	Syariah
Kas	2%		Tb & Dp	42%	
ABA	21%		ABP/BI	18%	
Pembiayaan	66%		Equity	29%	
			Profit	7%	

Kelas Kinerja Kredit B					
Pos Nrc	Konv	Syariah	Pos Nrc	Konv	Syariah
Kas	2%	1%	Tb & Dp	49%	38%
ABA	10%	25%	ABP/BI	16%	47%
Pembiayaan	79%	71%	Equity	24%	14%
			Profit	9%	4%

Kelas Asset C					
Pos Nrc	Konv	Syariah	Pos Nrc	Konv	Syariah
Kas	2%	1%	Tb & Dp	57%	54%
ABA	22%	25%	ABP/BI	17%	23%
Pembiayaan	67%	73%	Equity	19%	22%
			Profit	4%	5%

Kelas Kinerja Kredit C					
Pos Nrc	Konv	Syariah	Pos Nrc	Konv	Syariah
Kas	2%	2%	Tb & Dp	52%	49%
ABA	25%	26%	ABP/BI	13%	2%
Pembiayaan	61%	68%	Equity	27%	23%
			Profit	7%	6%

Kelas Asset D					
Pos Nrc	Konv	Syariah	Pos Nrc	Konv	Syariah
Kas	2%		Tb & Dp	80%	
ABA	27%		ABP/BI	5%	
Pembiayaan	65%		Equity	8%	
			Profit	4%	

Kelas Kinerja Kredit D					
Pos Nrc	Konv	Syariah	Pos Nrc	Konv	Syariah
Kas	2%	10%	Tb & Dp	47%	46%
ABA	21%	13%	ABP/BI	20%	11%
Pembiayaan	64%	50%	Equity	42%	41%
			Profit	–13%	–44%

BPR di Jatim					
Pos Nrc	Konv	Syariah	Pos Nrc	Konv	Syariah
Kas	2%	3%	Tb & Dp	50%	47%
ABA	21%	18%	ABP/BI	17%	13%
Pembiayaan	67%	64%	Equity	29%	30%
			Profit	0.1%	3%**)

*) BPR syariah hasil konversi dan beroperasi kurang dari 1 tahun dikeluarkan dari perhitungan
**) BPR syariah yang mengalami masalah struktural dikeluarkan dari perhitungan

Tabel III.3a :
Laporan Laba Rugi berdasarkan Kelas Asset (Rp.juta)

Uraian	Asset Class								Total	
	A		B		C		D			
	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS
Jumlah BPR	29	3	29	0	36	3	21		115	6
INCOME										
Bunga bank	266,8	26,3	987,1	-	6.145,6	125,9	12.934,0	-	20.333,5	152,2
Pdptn kredit	2.355,5	99,0	4.829,7	-	22.678,7	1.418,2	49.765,9	-	79.629,9	1.517,3
Pdptn oprs. Lainnya	174,4	0,8	309,6	-	1.348,2	17,2	2.777,4	-	4.609,7	18,0
Pdptn oprs. total	2.796,8	130,8	6.126,5	-	30.172,5	1.561,4	65.477,3	-	104.573,0	1692,
Pdptn non oprs.	14,1	22,9	48,2	-	819,3	7,8	875,7	-	1.757,4	30,7
TOTAL INCOME	2.810,9	153,7	6.174,6	-	30.991,8	1.569,2	66.353,0	-	106.330,4	1.722,9
BIAYA										
Bga u/ BI/bank lain	261,2	0,0	870,7	-	2.475,6	212,6	2.408,1	-	6.015,6	212,6
Bunga kpd nasabah	503,0	25,0	1.157,4	-	9.848,2	363,1	37.687,7	-	49.196,3	388,1
Biaya pegawai	877,1	71,8	1.667,4	-	5.698,9	298,5	7.672,3	-	15.916,0	370,3
Penghapusan	158,4	30,5	207,4	-	1.096,6	160,1	1.375,1	-	2.837,5	190,5
Biaya oprs. Lainnya	696,6	32,2	1.138,2	-	5.970,8	171,3	10.198,9	-	18.004,5	203,5
Biaya oprs. Total	2.496,3	159,4	5.041,1	-	25.090,2	1.205,6	59.342,0	-	91.969,5	1.365,1
Biaya non oprsl.	25,5	10,2	52,9	-	909,9	4,6	457,4	-	1.445,7	14,8
TOTAL BIAYA	2.521,8	169,7	5.093,9	-	26.000,1	1.210,2	59.799,4	-	93.425,2	1.379.8
LABA/RUGI										
Sblm pajak	289,1	(16,0)	1.080,7	-	4.991,8	358,9	6.553,7	-	12.915,2	34,0
Setelah pajak	261,8	(18,0)	904,3	-	4.120,3	355,5	3.895,1	-	9.181,4	325,9
Bunga bank	9%	18%	16%	-	20%	8%	19%	-	19%	9%
Pedapatan kredit	84%	66%	78%	-	73%	90%	75%	-	75%	88%
Pendaptan oprs lain	6%	1%	5%	-	4%	1%	4%	-	4%	1%
Pdptn non Opsr.	1%	15%	1%	-	3%	0%	1%	-	2%	2%
Bunga ke BI/Bank	10%	0%	17%	-	10%	18%	4%	-	6%	15%
Bunga kpd nasabah	20%	15%	23%	-	38%	30%	63%	-	53%	28%
Bya. Pegawai	35%	42%	33%	-	22%	25%	13%	-	17%	27%
Penghapusan	6%	18%	4%	-	4%	13%	2%	-	3%	14%
Biaya oprs. Lainnya	28%	19%	22%	-	23%	14%	17%	-	19%	15%
Total Biaya	99%	94%	99%	-	97%	100%	99%	-	98%	99%
Biaya Non Oprs.	1%	6%	1%	-	3%	0%	1%	-	2%	1%

A: < Rp. 500 juta, B: Rp. 500 -< Rp.1Milyar, C: Rp. 1M - Rp.5 M, D: > Rp. 5M

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Tabel III.4a :
Laporan Laba Rugi berdasarkan Kelas Kredit Non Lancar (Rp juta)

Uraian	Kinerja Kredit								Total	
	A		B		C		D			
	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS
Jumlah BPR	40	2	15	1	31	2	29	1	115	6
PENDAPATAN										
Bunga bank	10.111,3	15,1	934,9	5,0	6.389,8	132,1	2.897,5	0,0	20.333,5	152,2
Pdptn kredit	37.367,9	570,5	9.378,6	255,9	18.539,4	677,3	14.343,9	13,6	79.629,9	1.517,3
Pdptn opsl lain	1.370,2	2,0	663,9	15,3	846,2	0,7	1.729,5	0,0	4.609,7	18,0
Ttl pdptn oprsl	48.849,3	592,3	10.977,4	276,2	25.775,4	810,1	18.970,9	13,6	104.573,0	1.692,2
Ttl pdpt non oprs	443,2	0,0	552,8	0,0	452,5	12,5	308,9	18,3	1.757,4	30,7
PENDAPATAN TOTAL	49.292,6	592,3	11.530,2	276,2	26.227,9	822,6	19.279,8	31,8	106.330,4	1.722,9
BIAYA										
Bunga kpd BI/bank	2.792,1	85,0	790,8	78,7	1.549,7	49,0	883,0	0,0	6.015,6	212,6
Bunga kpd Nasabah	21.180,5	156,2	3.000,7	54,5	10.269,7	174,7	14.745,5	2,6	49.196,3	388,1
Biaya pegawai	6.149,4	104,9	1.913,9	49,2	5.255,8	199,0	2.596,5	17,2	15.916,0	370,3
Penghapusan	953,1	103,2	754,1	20,6	903,7	61,7	226,5	5,1	2.837,5	190,5
Bya oprsl lainnya	6.488,9	74,9	2.782,0	37,0	4.954,7	87,1	3.778,8	4,5	18.004,5	203,5
Total biaya Operasional	37.564,1	524,2	9.241,5	240,0	22.933,6	571,5	22.230,3	29,4	91.969,5	1.365,1
Biaya non Operasional	357,9	3,0	663,1	0,0	376,2	10,3	48,5	1,5	1.445,7	14,8
BIAYA TOTAL	37.922,0	527,2	9.904,6	240,0	23.309,8	581,8	22.278,8	30,9	93.425,2	1.379,9
LABA/RUGI										
Sebelum pajak	11.370,6	65,0	1.625,6	36,2	2.918,1	240,8	(2.999,1)	0,9	12.915,2	343,0
Setelah pajak	8.683,5	65,0	1.295,2	21,1	2.297,9	238,8	(3.095,1)	0,9	9.181,4	325,9
Bunga bank	21%	3%	8%	2%	24%	16%	15%	0%	19%	9%
Pedapatan kredit	76%	97%	81%	93%	71%	82%	74%	43%	75%	88%
Pendaptan oprs lain	3%	0%	5%	6%	3%	0%	9%	0%	4%	1%
Pdptn non Opsr.	1%	0%	6%	0%	2%	2%	2%	57%	2%	2%
Bunga ke BI/Bank	7%	16%	8%	33%	7%	8%	4%	0%	6%	15%
Bunga kpd nasabah	56%	30%	30%	23%	44%	30%	66%	8%	53%	28%
Bya. Pegawai	16%	20%	19%	20%	23%	34%	12%	56%	17%	27%
Penghapusan	3%	20%	8%	9%	4%	11%	1%	16%	3%	14%
Biaya oprs. Lainnya	17%	14%	28%	15%	21%	15%	17%	15%	19%	15%
Total Biaya	99%	99%	93%	100%	98%	98%	100%	95%	98%	99%
Biaya Non Oprs.	1%	1%	7%	0%	2%	2%	0%	5%	2%	1%

Kredit non lancar: A: <5 %, B: 5 -< l0%, C: 10 - 25%, D: > 25%

Gambar III.2a :
Struktur Pendapatan dan Ongkos Rata-Rata
BPR Konvensional dan Syariah

Kelas Asset A					
Pos L/R	Konv	Syariah	Pos L/R	Konv	Syariah
Bunga Bank Pend. Kredit	10% 83%	28% 50%	Bya. pendanaan Bya. Opr lainnnya*)	27% 81%	13% 81%

Kelas Kinerja Kredit A					
Pos L/R	Konv	Syariah	Pos L/R	Konv	Syariah
Bunga Bank Pend. Kredit	19% 77%	36% 62%	Bya. pendanaan Bya. Opr lainnnya*)	46% 53%	31% 67%

Kelas Asset B					
Pos L/R	Konv	Syariah	Pos L/R	Konv	Syariah
Bunga Bank Pend. Kredit	16% 79%		Bya. pendanaan Bya. Opr lainnnya*)	37% 62%	

Kelas Kinerja Kredit B					
Pos L/R	Konv	Syariah	Pos L/R	Konv	Syariah
Bunga Bank Pend. Kredit	6% 86%	2% 93%	Bya. pendanaan Bya. Opr lainnnya*)	33% 64%	56% 44%

Kelas Asset C					
Pos L/R	Konv	Syariah	Pos L/R	Konv	Syariah
Bunga Bank Pend. Kredit	22% 72%	6% 91%	Bya. pendanaan Bya. Opr lainnnya*)	48% 50%	49% 51%

Kelas Kinerja Kredit C					
Pos L/R	Konv	Syariah	Pos L/R	Konv	Syariah
Bunga Bank Pend. Kredit	20% 74%	14% 83%	Bya. pendanaan Bya. Opr lainnnya*)	45% 54%	31% 65%

Kelas Asset D					
Pos L/R	Konv	Syariah	Pos L/R	Konv	Syariah
Bunga Bank Pend. Kredit	24% 72%		Bya. pendanaan Bya. Opr lainnnya*)	65% 34%	

Kelas Kinerja Kredit D					
Pos L/R	Konv	Syariah	Pos L/R	Konv	Syariah
Bunga Bank Pend. Kredit	20% 73%	0% 43%	Bya. pendanaan Bya. Opr lainnnya*)	42% 58%	8% 87%

BPR di Jatim					
Pos L/R	Konv	Syariah	Pos L/R	Konv	Syariah
Bunga Bank Pend. Kredit	19% 74%	17% 71%	Bya. pendanaan Bya. Opr lainnnya*)	44% 54%	31% 66%

*) Biaya operasional lainnya termasuk biaya penghapusan kredit macet.

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Tabel III.5a :
Kelas Asset terhadap Indikator Terpilih

	Kelas Asset*)							
	A		B		C		D	
	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS
Jml BPR (%)	25	50	25	0	31	50	19	0
Rata-rata Tahun Operasi	6,6	3,0	5,4	0	9,8	5,0	14,0	0
Rata-rata Asset (Rp.juta)	0,3	0,3	0,7	0	2,5	2,2	12,7	0
% Portofolio kredit/Asset								
Rata2 %	74,6	53,6	68,1	0	68,4	73,5	65,7	0
% BPR < 60%	13,8	50,0	31,0	0	38,9	0,0	38,1	0
% BPR > 85%	27,6	0,0	20,7	0	27,8	17,0	23,8	0
Rata-2 outstanding kredit								
Rata2 (Rp. juta)	1,2	1,0	1,3	0	3,1	2,3	7,1	0
% BPR < Rp 1 juta	44,8	33,0	41,4	0	8,6	0	4,8	0
% BPR > Rp.2 juta	13,8	0,0	17,2	0	54,2	17	80,9	0
% Kredit Non Lancar								
Rata2 (%)	20,4	28,0	23,6	0	13,1	12	9,6	0
% BPR < 10%	37,9	17,0	34,4	0	55,6	33	66,7	0
% BPR > 25%	37,9	17,0	34,5	0	16,7	0	9,5	0

Keterangan:

– ***)** Dlm klasifikasi asset BPR konvensional jumlah BPR klasifikasikan berjumlah 115 BPR, yg beroperasi di Jatim, Bali dan NTB.

– A: < Rp.500 juta; B: 500 - < Rp.1 M; C: Rp.1 M - Rp.5 M, D: > Rp.5 M

Tabel III.6a :
Kepemilikan BPR dan Pegawai BPR Konvesional dan Syariah
Di Jawa Timur

	Jml sampel BPR Konv.	BPR Konv.*) di Jatim	BPRS**)
Jml BPR	**115**	**72**	**6**
Kepemilikan			
Rata-rata pemegang saham	115	7,9	57,0
% BPR dgn 1 pemegang saham	10	9,7	0,0
% BPR dgn 2 pemegang saham	36	25,0	0,0
% BPR dgn 3-5 pemegang shm	42	38,9	16,7
% BPR dgn >5 pemegang shm	27	26,4	83,3
Rata2 jmlh BPR dgn pgm shm >50%	114	4,1	0,0
Dewan komisaris			
% BPR dgn 1 org komisaris	3	2,8	0,0
% BPR dgn 2 org komisaris	57	51,4	16,7
% BPR dgn > 2 org komisaris	54	45,8	83,3
Pengalaman di perbankan			
% rata2 dari komisaris	114	29,7	19,2
Jumlah komisaris (% BPR)	64	48,6	66,7
Pendidikan <= SLTA			
% rata2 dari komisaris	114	37,3	19,2
Jumlah komisaris (% BPR)	56	45,8	50,0
Pegawai BPR			
Jml rata2	114	18,3	13,0
Jml rata2 direktur	114	1,6	2,0
Jml rata2 pegawai tetap.	114	14,6	9,0
Direktur BPR			
% BPR dgn 1 org direktur	49	40,3	16,7
% BPR dgn 2 org direktur	61	56,9	83,3
% BPR dgn > 2 org direktur	4	2,8	0,0
Pengalaman di perbankan			
% rata2 dari direktur	114	50,9	55,0
Jumlah direktur (% BPR)	49	41,7	83,0
Pendidikan <= SLTA			
% rata2 dari direktur	114	28,5	0,0
Jumlah direktur (% BPR)	18	13,9	0,0
Pegawai Tetap			
% BPR dgn 2-9 peg.tetap	54	52,8	66,7
% BPR dgn 10-19 peg.tetap	29	25,0	33,3
% BPR dgn > 20 org peg.tetap	31	22,3	0,0
Pengalaman di perbankan			
% rata2 dari peg.tetap	144	13,7	16,4
Jlh peg.tetap tdk pengalaman (% BPR)	68	61,1	33,3
Pendidikan <= SLTA			
% rata2 dari peg.tetap	144	58,6	36,4
Seluruh peg.tetap <= SLTA (% BPR)	12	8,3	0

*) Angka prosentase diperoleh dari membandingkan dgn jumlah sampel BPR konv di Jatim dgn kolom sampel BPR konvensional secara secara keseluruhan (Jatim, Bali, dan NTB)

**) Angka prosentase diperoleh dari membadingkan dengan total BPRS di Jatim.

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Tabel III.7a :
Wewenang Manajemen BPR Syariah dan Konvensional
Di Jawa Timur

	Jml sampel BPR Konv.	BPR Konv.*) di Jatim	BPRS**)
Jml BPR	**115**	**72**	**6**
Keterlibatan Pemilik (% BPR)			
Keterlibatan dlm operasional	56	52,8	0,0
Wewenang manajemen:			
Tinggi	30	29,2	50,0
Relatif Tinggi	24	25,0	50,0
Relatif Rendah	46	36,1	0,0
Rendah	15	9,7	0,0
Manajemen Umum (% BPR)			
Keberadaan rencana tahunan	114	100,0	100,0
Keberadaan rencana training	88	70,8	100,0
Keberadaan anggaran training	80	65,3	100,0
Keberadaan job discription	111	100,0	100,0
Keberadaan sistem internal	77	69,5	66,7
Keberadaan manual:			
Adm. Dan pembukuan	107	95,8	100,0
Analis kredit	105	93,1	100,0
Prosedur pesetujuan kredit	111	97,2	100,0
Batas pinjaman	106	93,1	83,0
Pinjaman ke pihak terkait	96	86,1	66,0
Pengawasan pinjaman	93	80,6	100,0
Manajemen keuangan/pinjaman			
Keberadaan kebijakan:			
Manajemen likuiditas	103	91,4	83,0
BMPK	100	91,7	100,0
BMPK ke pihak terkait	77	69,4	50,0
PPAP	108	100,0	100,0
Penghapusan kredit macet	62	55,6	50,0
Eksekusi agunan:			
Tidak Pernah	81	68,1	100,0
Pernah lebih dari satu kali	9	6,9	0,0
Pernah dgn hasil yg memuaskan	11	33,3	0,0
Lima outstanding kredit terbesar			
< 10% dari portofolio kredit	68	54,3	33,0
> 30% dari portofolio kredit	11	12,9	17,0

*) Angka prosentase diperoleh dari membandingkan dgn jumlah sampel BPR konv di Jatim dgn kolom sampel BPR konvensional secara secara keseluruhan

**) Angka prosentase diperoleh dari membandingkan dengan total BPRS di Jatim.

Tabel III.8a :
Indikator Manajemen terhadap Penggolongan
Kinerja Pembiayaan (kredit)

	Jml BPR Konv.	Kelas Kinerja Kredit								Total	
		A		B		C		D			
		BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS
Jml BPR	114	40	2	15	1	31	2	28	1	114	6
Kewenang manajemen:											
Rendah	30	37,5	0,0	20,0	0,0	16,1	0,0	24,1	0,0	26,1	0,0
Relatif Rendah	24	22,5	0,0	40,0	0,0	12,9	0,0	17,2	0,0	20,9	0,0
Relatif Tinggi	46	25,0	50,0	33,3	100,0	61,3	50,0	41,4	100,0	40,0	66,7
Tinggi	15	15,0	50,0	6,7	0,0	9,7	50,0	17,2	0,0	13,0	33,3
Manajemen Umum (% BPR)											
Keberadaan sistem											
Internal	77	70,0	50,0	80,0	100,0	67,7	100,0	55,2	0,0	67,0	66,7
Keberadaan manual:											
Analis kredit	105	95,0	100,0	100,0	100,0	93,5	100,0	79,3	100,0	91,3	100,0
Prosedur pesej kre	111	97,5	100,0	100,0	100,0	100	100,0	89,7	100,0	96,5	100,0
Batas pinjaman	106	97,5	50,0	93,3	100,0	93,5	100,0	82,8	100,0	92,2	83,3
Pinj. ke phk terkait	96	87,5	50,0	93,3	100,0	80,6	100,0	75,9	0,0	83,5	66,7
Pengawasan pinj.	93	85	100,0	86,7	100,0	90,3	100,0	62,1	100,0	80,9	100,0
Mnjmn keuangan/pinjaman.											
Keberadaan kebijakan:											
Mjmn likuiditas	103	94,7	100	100,0	100,0	96,8	100,0	78,6	100,0	92,0	100,0
BMPK	100	97,4	50	80,0	100,0	86,7	100,0	85,7	100,0	89,3	83,3
BMPK pihak terkait	77	67,5	50	73,3	100,0	67,7	100,0	64,3	0,0	67,5	33,3
Pencegahan krdt mct	108	100	100	100,0	100,0	96,7	100,0	92,9	100,0	97,3	100,0
Penghapusan krd mct	62	62,5	0	66,7	100,0	53,3	100,0	39,3	100,0	54,9	33,3
5 outstanding krd terbsr											
< 10% dr port. Kredit	68	70,3	50,0	87,7	100,0	58,3	0,0	46,2	0,0	63,6	33,3
> 30% dr port. Kredit	11	5,4	0,0	6,7	0,0	6,9	0,0	23,1	100,0	10,3	16,7

*) Angka prosentase diperoleh dari membandingkan dgn jumlah sampel BPR konv di Jatim,NTB, Bali dgn kolom sampel BPR konvensional secara secara keseluruhan

**) Angka prosentase diperoleh dari membandingkan dengan total BPRS di Jatim.

– Kredit Non lancar: A: < 5%, B: 5 - < 10%, C: 10-25%, D: >25%.

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Tabel III.9a :
Rangking Tujuan pada Rencana kerja Tahunan

Faktor R = Rangking N = Jumlah BPR	Total BPR Konv.		BPR Konv. Jatim		BPRS Jatim	
	R	N = 107	R	N = 69	R	N = 6
Menigkatkan penghimpunan dana, asset	1	59	1	35	-	-
Meningkatkan pemberian pembiayaan/kredit	2	45	2	25	-	-
Meningkatkan kemampuan SDM	3	32	3	22	2	2
Meningkatkan kualitas aktiva produktif	4	29	3	22	-	-
Meningkatkan pendapatan / BEP	5	17	5	14	3	1
Meningkatkan/menjaga tingkat kesehatan bank	6	13	6	11	3	1
Mendirikan/mempeluas unit layanan	7	8	7	5	1	4
Mengembangkan program komputerisasi kantor	8	7	8	4	2	2
Meneriman pegawai baru	9	5	-	3	-	-
Meningkatkan motivasi/disiplin pegawai	10	5	-	3	-	-
Meningkatkan manajemen/internal kontrol	-	-	8	4	-	-
Meningkat modal disetor	-	-	8	4	3	1

Tabel III.10a :
Ranking terhadap Manajemen Likuiditas

Faktor R = Rangking N = Jumlah BPR	Total BPR Konv.		BPR Konv. Jatim		BPRS Jatim	
	R	N = 99	R	N = 69	R	N = 6
Uang tunai/Simpanan pada bank lain .. % dari DPK	1	28	2	11	1	5
Berdasarkan aliran kas sesuai dgn jangka waktunya	2	19	1	15	2	2
Likuiditas seperti pada CAMEL	3	15	3	10	2	2
BMPK kpd pihak terkait, meningkatkan kolektibilitas, mobilisasi tabungan.	4	12	4	5		-
Program penjaminan simpanan	5	5	4	5		-
Ketersedian modal tambahan, pinjaman dr phk terkait	6	4	6	4		-
Lainnya dgn jawan tdk terinci		16		11		-

Tabel III.11a :
Pengalaman BPR: Faktor yang menyebabkan kegagalan kredit

Faktor R = Rangking N = Jumlah BPR	Total BPR Konv.		BPR Konv. Jatim		BPRS Jatim	
	R	N = 108	R	N = 69	R	N = 6
FAKTOR YG BERHUB. DGN KARAKTER	1	87	1	48	2	2
Umum		37		24		2
Alamat berubah tanpa pemberitahuan		21		7		-
Kredit digunakan berbeda dgn kontrak		15		8		-
Kredit digunakan oleh pihak lain		7		5		-
Jaminan dijual oleh debitur		7		4		-
KONDISI EKONOMI & KEGAGALAN BISNIS	2	72	2	44	1	3
FAKTOR INTERNAL BANK	3	55	3	38	-	-
Analisis dan prosedur kredit yg tdk memadai		30		20		-
Tdk ada atau kurangnya jaminan tetap		10		6		-
Kolusi dan campur tangan pihak luar		8		7		-
Tindakan terlambat, monitoring dan kurang bimbingan		7		5		
FAKTOR EKSTERNAL LAINNYA	4	42	4	23	3	1
Bencana alam atau pada manusia		34		19		-
Jaminan dijual hilang atau rusak		8		4		-
Tidak memakai jaminan		-		-		1

Tabel III.12a
Rangking Strategi untuk Menghindari Kredit Macet

Strategi R = Rangking N = Jumlah BPR	Total		Jatim		BPRS	
	R	N = 110	R	N = 72	R	N = 6
Monitoring kontinu, hubungan dan bimbingan secara pribadi	1	41	1	31	2	3
Informasi yg cukup dan analisa kredit yang Memadai (5C)	2	37	2	26	1	6
Jaminan yg cukup, dan jaminan yang mudah dijual	3	28	3	16	3	2
Berhati-hati dlm memilihan peminjan dan persetujuan kredit yg selektif	4	27	3	16	4	1
Meningkatkan kemampuan petugas kredit dan meningkatkan prosedur kredit	5	11	5	8	-	-
Penagihan kredit yg intensip dan membentu tim penyelamat kredit	6	11	6	7	4	1
Membuat komite kredit dan menyakinkan akan adanya keputusan kredit yg transparan	7	5	7	3	-	-
Pembentukan cadangan penghapusan kredit macet yg cukup dan penghapus-bukuannya	8	5	7	3	-	-
Rescheduling, restructuring dan reconditioning thd kredit bermasalah	9	4	9	1	-	-
Lainnya atau jawaban tidak dirinci	-	7	-	4	4	1

Tabel III.13a :
Rangking tindakan yang diambil jika terjadi kemacetan

Tinndakan R = Rangking N = Jumlah BPR	Total		Jatim		BPRS	
	R	N = 107	R	N = 70	R	N = 22
Kunjungan berkala, upaya penagihan dan Bimbingan	1	35	2	25	1	6
Menerapkan pinalti	1	35	1	28	3	1
Mengirimkan surat peringatan formal	3	17	3	11	1	6
Rescheduling, restructuring dan reconditioning thd kredit	3	17	4	9	2	5
Mengurangi pinalti dan bunga pinjaman	5	16	5	8	-	-
Mengikat jaminan	6	5	6	4	-	-
Lainnya atau tidak merinci jawaban	-	12	-	8	-	-

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Tabel III.14a :
Ranking pinjaman kepada pihak terkait

Kebijaksanaan	Total		Jatim		BPRS	
R = Rangking N = Jumlah BPR	R	N = 79	R	N = 53	R	N = 6
Menerapkan peraturan BI	**1**	49	**1**	42	**1**	6
Menyediakan bunga rendah, jangka waktu dan persyaratan yg lebih baik	**2**	15	**3**	2	**3**	1
Menerapkan peraturan kredit umumnya, sesuai dengan kemampuan membayar	**3**	11	**2**	4	**2**	2
Menerapkan aturan jaminan yang baku	**4**	5	**2**	4	**-**	-
Hanya melayani keb yg sangat mendesak	**-**	-	**-**	-	**3**	1
Tidak menyediakan kredit pd pihak terkait	**5**	5	**2**	4	**-**	-
Menerapkan jumlah maks. Pinjaman Individual	**6**	4	**3**	2	**-**	-

Tabel III.15a :
Ranking kebijakan BMPK

Kebijakan	Total		Jatim		BPRS	
R = Rangking N = Jumlah BPR	R	N = 91	R	N = 67	R	N = 6
Menerapkan peraturan BI	1	67	1	45	1	6
Mengetatkan kewenangan manajemen dalam menyetujui pemeberian kredit	2	13	2	7	-	-
Diberikan kewenangan yg jelas oleh komisaris dan direktur	3	6	3	4	-	-
Menerapkan yang lebih ketat dibandingkan dgn peraturan BI	4	3	4	3	-	-
Membatasi pemberian kredit sesuai dgn Keb. peminjam (analisis kredit yg benar)	5	3	5	2	-	-
Menerapkan maks. kredit bagi debitur indidual	6	3	6	1	-	-
Lainnya atau tidak merinci jawaban	-	8	-	6	-	-

Tabel III.16a :
Ranking aturan penghapus-bukuan kredit macet

A t u r a n R = Rangking N = Jumlah BPR	Total		Jatim		BPRS	
	R	N = 65	R	N = 42	R	N = 6
Menerapkan aturan yg sdh ada	**1**	13	**1**	9	**1**	6
Menghapusbukan sisa kredit jika jaminan tidak cukup atau tdk mudah dipasarkan	**2**	11	**1**	9		
Pengapusbukuan harus disetujui oleh pemilik dan dewan komisaris	**3**	11	**3**	6	**3**	1
Penghapusbukuan berdasarkan pada kapasitas PPAP	**4**	9	**3**	6	**-**	-
Penghapusbukuan setelah kredit (.. bln) diklasifikasi macet	**5**	8	**5**	4	**2**	3
Menagih tunggakan setelah kredit di-Hapusbukuan	**6**	4	**6**	3	**-**	-
Menyediakan cadangan kredit macet dalam jumlah yang cukup	**7**	3	**7**	1	**3**	1
Menghapusbukan kredit macet pada akhir tahun buku	**8**	2	**7**	1	**-**	-
Lainnya tidak merinci jawaban	**-**	4	**-**	3	**-**	-

Tabel III.17a :
Pengalaman dan pendapat tentang mengesekusi jaminan

BPR dgn Pengalaman Eksekusi R = Rangking N = Jumlah BPR	Total		Jatim		BPRS	
	R	N = 32	R	N = 23	R	N = 0
Tidak puas: Randahnya tranfaransi, terlalu mahal, dan prosedurnya panjang	1	20	1	15	-	-
Puas: Kerjasama yg baik dgn pengadilan dan lembaga pelelangan	2	5	4	1	-	-
Tidak puas:Alasan lainnya	3	4	2	4	-	-
Masih dalam proses	4	3	3	3	-	-
BPR tanpa Pengalaman Eksekusi	**R**	**N = 73**	**R**	**N = 42**	**R**	**N = 5**
Tdk Effisien: Telalu mahal u/ kredit kecil Terlalu berbelit-belit dan lama	1	39	1	26	1	2
Lebih menyukai eksekusi informal bekerja sama dgn debitur	2	17	2	9	1	2
Tidak ada kredit macet, belum dibutuhkan	3	12	3	7	-	-
Tidak pengalaman, tdk mengerti prosedurnya	4	4	-	-	-	-
Memperburuk citra BPR, dikritik krn terlalu kejam	5	1	-	-	2	1

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Tabel III.18a :
Masalah Utama yang diungkapkan oleh Direktur BPR

Masalah	Total		Jatim		BPRS	
R = Rangking N = Jumlah BPR	R	N = 99	R	N = 70	R	N = 5
OPERATIONAL						
Penagihan dan kredit macet	**1**	61	**1**	44	**1**	4
Rendahnya mobilisasi dana dan modal	**3**	22	**3**	14	**2**	3
Persaingan	**5**	18	**6**	10	**1**	4
Ekspansi kredit, over likuid	**8**	9	**7**	8	**-**	-
Pengambilan dan eksekusi jaminan	**9**	8	**8**	6	**-**	-
Citra BPR buruk dan rendahnya kepercayaan	**11**	6	**9**	5	**-**	-
Kurang Promosi	**-**	-	**-**	-	**3**	2
Pemilik terlalu banyak sulit menambah modal	**-**	-	**-**	-	**3**	2
SDM						
Rendahnya kemampuan pegawai	**2**	33	**2**	19	**2**	3
Rendahnya kualitas pegawai baru	**4**	20	**3**	14	**-**	-
Rendahnya disiplin dan motivasi pegawai	**6**	15	**5**	11	**-**	-
ORGANISASI						
Rendahnya struktur organisasi & pembagian peg.	**7**	11	**12**	3	**4**	1
Sedikitnya ruang dan fasilitas kantor	**9**	8	**10**	4	**2**	3
Akunting yg lemah dan mslh pajak akuntansi	**11**	6	**10**	4	**-**	-
Rendahnya wewenang dan campur tangan phk luar	**13**	4	**12**	3	**-**	-
Tidak effektifnya dewan komisaris	**13**	4	**14**	2	**4**	1

Tabel III.19a :
Kebutuhan Training bagi Direktur BPR

Masalah	Total		Jatim		BPRS	
R = Rangking N = Jumlah BPR	R	N = 106	R	N = 67	R	N = 6
Tidak membutuhkan Training	-	22	-	14	**-**	-
Manajemen BPR, Internal Kontrol	**1**	35	**1**	21	**-**	1
Manajemen Umum (Syariah) , Leadership, Perencanaan Strategis & pengambilan keputusan.	**2**	27	**2**	14	**1**	6
Manajemen Risiko dan keuangan	**3**	12	**5**	5	**2**	3
Manajemen Sumber Daya Manusia	**4**	11	**3**	8	**3**	2
Aspek hukum dan perpajakan	**4**	11	**3**	8	**4**	1
Pemasaran	**6**	4	**6**	3	**4**	1
Akuntansi	**6**	4	**6**	3	**4**	1
Lainnya: Pendidikan Formal, Ekonomi makro dan moneter	**-**	6	**-**	2	**-**	-

Tabel III.20a :
Kebutuhan Training bagi Staf Pembiayaan BPR

Masalah	Total		Jatim		BPRS	
R = Rangking N = Jumlah BPR	R	N = 106	R	N = 67	R	N = 6
Tidak membutuhkan Training	-	7	-	5	**-**	-
Kredit secara umum & administrasi Training AO	**1**	35	**1**	20	**1**	4
Analisis Kredit, resiko dan usaha	**2**	27	**2**	16	**2**	3
Markerting dan custumer relations	**3**	12	**3**	14	**-**	-
Penagihan kredit dan penyelamatan kredit	**4**	11	**3**	14	**3**	2
Pengawasan dan monitoring kredit	**4**	11	**5**	11	**3**	2
Aplikasi komputer	**6**	4	**-**	-	**2**	3
Lainnya: Aspek manajemen BPR	**6**	4	**-**	3	**-**	-

Tabel III.21a :
Kebutuhan Training bagi Staf BPR Lainnya

Masalah	Total		Jatim		BPRS	
R = Rangking N = Jumlah BPR	R	N = 106	R	N = 67	R	N = 6
Tidak membutuhkan Training	-	7	-	13	**-**	-
Analisis keuangan dan manajemen	**1**	33	**1**	22	**4**	1
Akuntansi	**2**	28	**2**	21	**4**	1
Perangkat keras dan lunak	**3**	23	**4**	12	**-**	-
Pelaporan umum dan keuangan	**4**	21	**5**	10	**3**	2
Hubungan dengan nasabah dan pemasaran	**5**	20	**3**	15	**3**	2
Aspek hukum dan perpajakan	**6**	11	**6**	9	**3**	2
Penanganan uang palsu	**7**	5	**7**	4	**-**	-
Magang di BPR lainnya					**2**	**3**
Manajemen Oprs.					1	6
Lainnya	**-**	6	**-**	6	**-**	-

Tabel IV.1a :
Aspek Pelayanan BPR Konvensional dan Syariah

	Jumlah BPR	BPR Konvensional		BPR
	Konv.	Jatim	Total	Syariah
Jumlah BPR	113	72	113	6
Produk tabungan				
% BPR d/ 1 produk tabungan	66	63,4	58,9	16,6
% BPR d/ > 2 produk tabungan	20	16,9	17,9	83,4
Bunga (margin) rata2 produk utama	110	11,6	11,6	52 : 50
% BPR d/ bunga 6 -< 10%	14	17,1	12,7	-
% BPR d/ bunga 10-< 11%	29	30,0	26,4	-
% BPR d/ bunga 12%	45	22,9	40,9	-
% BPR d/ bunga > 12 - 16%	22	29,9	20,0	-
Deposito				
% BPR d/ produk deposito	105	97,2	91,2	100,0
Bunga (margin) rata2 produk deposito	103	15,4	16,1	65,2 : 34,8
% BPR d/ bunga (margin) 8 -< 12%	11	14,3	10,7	-
% BPR d/ bunga (margin) 12 -< 15%	38	40,0	36,9	-
% BPR d/ bunga (margin) 15 - 18%	32	28,6	31,1	-
% BPR d/ bunga (margin) > 20 - 38%	22	17,2	21,4	-
Produk kredit/pembiayaan				
% BPR d/ 1-2 produk kredit	63	45,8	45,1	50,0
% BPR d/ > 3 produk kredit	35	33,3	31,0	50,0
Rata2 bunga (margin) terendah	111	29,2	31,0	40,0
Rata2 bunga (margin) tertinggi	102	43,9	44,4	53,4
Bunga (margin) rata2 dua produk utama	No:	136,0	213,0	6,0
% produk d/ 5 - 27%	34	20,6	16,0	-
% produk d/ 30 – 36%	94	42,6	44,1	-
% produk d/ 37 – 48%	66	27,9	30,1	50,0
% produk d/ 51 - 100%	19	8,8	8,9	50,0
Rata2 jangka waktu paling singkat (bln)	108	8,4	9,1	4,0
Rata2 jangka waktu paling panjang (bln)	101	25,5	26,1	33,0
Jangka waktu kredit pada 2 produk	No:	133	209	6,0
% produk d/ 1 - 3 bulan	27	12,0	12,9	-
% produk d/ 4 - 10 bulan	28	15,8	13,4	16,7
% produk d/ 12 bulan	85	42,1	40,7	50,0
% produk d/ 18 – 24 bulan	35	14,3	16,7	16,7
% produk d/ 30 – 60 bulan	34	15,8	16,3	16,7
frekuensi cicilan:				
% BPR hanya dgn bulanan saja	67	57,7	60,4	83,3
% BPR hanya dgn harian dan mingguan	9	2,8	6,1	0,0
% BPR dgn bulanan dan lainnya	35	39,4	31,5	16,7

Ket: d/ = dgn; margin = bagi hasil pada BPRS;

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Tabel IV.2a :
Jangkauan geografis dan persaingan BPR Konvensional dan Syariah

		BPR Konvensional		BPR
		Jatim	Total	Syariah
Jumlah BPR		72	114	6
Lokasi				
Jarak Rata2 (Km) ke Ibukota Kab/Kodya	112	16,1	17,2	16,0
% BPR dalam Ibukota Kab/Kodya	18	16,1	7,7	0,0
% BPR > 25 km ke Ibukota Kab/Kodya	24	22,2	21,4	16,7
Jarak Rata2 (Km) ke Kecamatan	113	1,3	1,5	0,8
% BPR di Kecamatan	76	66,7	67,3	100,0
% BPR > 5 km ke kecamatan	7	5,6	6,2	0,0
% BPR di prs.tradisonal/pusat perdag.	79	73,6	69,9	66,7
% BPR pada jln utama	107	97,2	94,7	100,0
% BPR di daerah turis	18	9,7	15,9	0,0
Jangkauan geografis				
% BPR d/ lebih dari 1 kantor	15	13,2	13,2	50,0
Jumlah rata2 kecamatan yang dilayani	114	12,2	9,2	12,4
% BPR melayani 1 - 4 kecamatan	40	15,3	35,1	0,0
% BPR melayani => 10 kecamatan	36	48,6	31,6	67,7
Tabungan pd. kantor pusat BPR di kec.pusat				
% Rata2 jumlah tabungan	111	49,7	57,4	30,0
% BPR d/ 100% terkonsentrasi	13	2,9	11,7	0,0
% BPR d/ < 50% terkonsentrasi	54	60,0	48,6	44,2
Kredit pd. kantor pusat BPR di kec. pusat				
% Rata2 portofolio kredit/pembiayaan	112	40,6	50,5	46,8
% BPR d/ 100% terkonsentrasi	8	-	7,1	0,0
% BPR d/ < 50% terkonsentrasi	24	29,6	21,4	33,4
Situasi persaingan				
% BPR: yg merasa tdk mempunyai saingan	17	16,7	14,8	0,0
% BPR: > 2 pesaing	55	43,0	47,8	100,0
Lembaga pesaing yg disebutkan:				
% BPR: Bank komersial	70	56,9	64,3	33,4
% BPR: BRI unit	50	50,0	43,5	83,4
% BPR: BPR lainnya	43	36,1	37,4	83,4
% BPR: LDKP	18	4,2	15,7	0,0
% BPR: Koperasi dan lembaga keu. Lainnya	43	30,6	37,4	83,4

Tabel IV.3a :
Konsumen dijangkau BPR Konvensional dan Syariah

	Jumlah BPR	BPR Konvensional		BPR
	Konv.	Jatim	Total	Syariah
		72	115	6
Portofolio kredit/pembiayaan				
Rata-rata jumlah rekening	113	816,0	887,0	512,0
Rata2 % rekening < Rp. 1 juta	109	49,1	51,3	64,0
Rata2 % rekening > Rp. 5 juta	109	13,7	13,0	6,4
Rata2 nilai per rekening (Rp.juta)	113	3,4	2,9	1,8
Rata2 % nilai < Rp. 1 juta	111	19,6	22,9	21,0
Rata2 % nilai > Rp. 5 juta	111	34,0	8,5	43,2
Tabungan				
Rata-rata rekening	111	2.235,0	3.383,0	1.434,0
Rata2 % rekening < Rp. 0.5 juta	111	86,2	83,7	89,2
Rata2 % rekening > Rp. 1 juta	111	4,4	6,7	8,5
Rata2 jlh nilai (Rp. 000)	111	512,0	437,0	354,0
Rata2 % nilai < Rp. 0.5 juta	111	26,1	30,2	21,0
Rata2 % nilai > Rp. 1 juta	111	63,3	57,6	71,0
Deposito				
Rata-rata rekening	107	99,0	107,0	26,0
Rata2 % rekening < Rp. 1 juta	107	16,6	20,1	21,5
Rata2 % rekening > Rp. 5 juta	107	44,8	38,4	44,3
Rata2 jlh nilai (Rp.juta)	107	25,1	18,3	9,7
Rata2 % nilai < Rp. 1 juta	107	5,5	8,2	1,7
Rata2 % nilai > Rp. 5 juta	107	74,2	66,6	91,0
Pinj. Berdsrkan tujuan/Sektor)				
KMK/Investasi				
Rata2 % rekening	115	79,5	75,7	88,4
Rata2 % nilai	115	81,2	77,7	96,7
Konsumsi				
Rata2 % rekening	112	14,9	19,1	4,9
Rata2 % nilai	112	11,8	16,7	2,1
Perdagangan				
Rata2 % rekening	111	49,3	52,4	80,3
Rata2 % nilai	111	48,7	51,8	76,6
Pertanian				
Rata2 % rekening	111	16,8	13,9	9,7
Rata2 % nilai	111	17,6	13,4	11,5
Jasa				
Rata2 % rekening	111	8,5	8,3	5,9
Rata2 % nilai	111	11,5	11,7	8,2

Tabel IV.4a :
(Pelayanan dan jangkauan berdasarkan kelas asset)

	Jml BPR	Kelas Asset								Total	
		A		B		C		D			
		BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS
Jml BPR		29	3	29		35	3	21		114	6
Jasa-jasa											
Bunga tabungan < 12%	43	22,2		41,4		51,5		46,9		39,1	
Bunga tabungan > 12%	22	29,6		20,6		17,2		10,6		20,0	
Nisbah Tabungan (BPRS)	6		50 : 50		-		50 : 50		-		50 : 50
Bunga Deposito < 15%	49	22,7		46,2		54,2		65,0		47,6	
Bunga Deposito > 15%	22	31,8		19,2		20,0		15,0		21,4	
Nisbah Deposito (BPRS)			60 : 40		-		55 : 40				58 : 42
Jangkauan goegrafis											
% BPR d/ > 1 kantor	15	-	0,0	6,4	-	22,8	100,0	23,8	-	13,2	50
Rata2 kec. Yg dilayani	114	5,5	7,7	6,1	-	10,5	17,0	16,2	-	9,2	12,4
% BPR melayani => 10 kec.	36	24,1	66,7	17,2	-	40,0	100,0	47,6	-	31,6	66,7
Tab. pd. kantor pusat BPR di kec. Pusat											
% BPR d/ > 75% terkons.	32	44,4	66,6	34,4	0,0	20,0	33,4	15,0	0,0	28,8	50,0
% BPR d/ < 50% terkons.	54	25,9	0,0	41,3	0,0	65,7	66,6	60,0	0,0	48,6	33,3
Kredit pd. kantor pusat BPR di kec. Pusat											
% BPR d/ > 75% terkonsentrasi	45	62,9	0,0	44,8	0,0	27,8	100,0	25,0	0,0	40,2	50,0
% BPR d/ < 50% terkonsentrasi	24	7,4	0,0	13,8	0,0	33,3	0,0	30,0	0,0	21,4	0,0
Tdk ada saingan	17	31,0	0,0	13,8	0,0	5,6	0,0	9,5	0,0	14,8	0,0
Konsumen yg dilayani											
Rata2 jml rek. Kredit	113	266	165	486	0,0	882	858	2.307	0,0	887	512
Rata2 nilai Kredit (Rp. Juta)	113	1,2	0,2	1,4	0,0	3,1	1,5	6,9	0,0	2,9	0,8
Rata2 jml rek. Tabungan	111	589	355	1.738	0,0	2.975	2.494	10.495	0,0	3.383	1424
Rata2 nilai tab. (Rp. 000)	111	383	85.097	197	0,0	677	623.051	466	0,0	437	354.074
Rata2 jml rek. Deposito	107	12	7	21	0,0	87	46	378	0,0	107	26
Rata2 nilai Dep. (Rp.juta)	107	4,8	41,0	10,3	0,0	13,9	610,0	52,0	0,0	18,3	326

Tabel V.1a :
Pengawasan, Pelindungan Simpanan dan Asosiasi berdasarkan Provinsi

	Jumlah BPR Konv.	BPR Konvensional		BPR Syariah
		Jatim	Total	
	BPR	72	114	6
Pengawasan langsung BI/ on-Site supervision				
Terakhir kali dilaksanakan:				
% BPR < 1 thn yll	56	50,0	49,1	83,3
% BPR 1-2 thn yll	37	37,5	32,5	0,0
% BPR > 2 thn yll	21	12,5	18,4	0,0
Rata2 hari pemeriksaan	114	3,6	3,7	5,0
% BPR 1-2 hari	18	18,3	15,8	0,0
% BPR 3-4 hari	72	60,6	63,2	60,0
% BPR 5-7 hari	24	21,1	21,1	40,0
Rata2 jml pengawas	114	2,3	2,3	2,0
% BPR 2 pengawas	79	67,6	69,9	80,0
% BPR 3-4 pengawas	34	32,4	30,1	20,0
Meneriman Laporan hasil pemeriksaan (% BPR)	109	94,4	95,6	80,0
Publikasi TKS hasil pemeriksaan (% BPR Setuju)	58	47,2	50,4	83,3
Diaudit oleh accountant public				
% BPR yg blm diaudit	95	79,2	82,6	50,0
% BPR < 1 thn yll	14	15,3	12,2	66,7
% BPR> 1 thn yll	6	5,6	5,2	33,3
Perlindungan simpanan/Deposit protection				
U/ mengukur keamanan simpanan:				
% BPR yg menekankan pentingnya jaminan simp.	47	45,9	41,2	83,3
% BPR: asuransi simpanan saja	8	11,1	7,0	0,0
% BPR: pencegahan saja	47	54,1	58,8	16,7
% BPR: kombinasi dari kedua di atas	39	34,8	34,2	83,3
Organisasi asuransi simp.:				
% BPR: Pemerintah	54	54,9	47,8	66,7
% BPR: Bank Indonesia	26	18,3	23,0	16,7
% BPR: Institusi khusus	18	21,1	15,9	16,7
% BPR: Kerjasama BPR	9	4,2	8,0	0,0
% BPR: BPR dan Pemerintah	6	1,4	5,3	0,0
Siap membayar premi asuransi (% BPR)	110	98,6	95,7	100,0
Asosiasi BPR				
% BPR yang menjadi anggota	109	91,7	94,8	100,0
% BPR: bayaran u/ jasa khusus	105	90,3	85,2	100,0

Tabel V.2a :
Rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan BPR

BPR Konv. (69)	BPR Sy. (6)	Rekomendasi
20	3	*Meningkatkan frekuensi dan kontinuitas dari pemeriksaan dan bimbingan.*
12	3	*Menambahkan/meningkatkan bimbingan sbg bagian dari on site supervision*
11	-	*Menidentifikasi dan membantu secara aktif dalam menemukan solusi masalah dijumpai.*
4	1	*Memberikan masukan kepada BPR/BPRS baik secara bulanan maupun triwulanan dari Lapbul*
3	-	*Mengawasi secara ketat pelaksanaan penerapan rekomendasi pengawasan, termasuk melibatkan pengurus*
3	6	*Meningkatkan profesionalitas staff (termasuk menambah pengetahuan di bidang operasional BPR syariah), atau mendelegasikan kepengawas/ akuntan publik*
3	-	*Perduli dgn pengawasan dan bimbingan yg konsiten oleh tim pengawas yang berbeda*
		Rekomendasi tunggal lainnya
		Menerapkan peraturan secara ketat (law enforcement)
		Lebih berkonsentrasi pada bank yang KS danTS
		Melaksanakan standar pengawasan yg seragam ke seluruh BPR
		Menyediakan manual untuk manejemen dan analisis data TKS BPR
		Menyediakan metode yg konsisten dalam menghitung kolektibilitas.
		Mengerti, tidak memaksa dan campur tangan

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Tabel V.3a :
Agumen pro & kontra publikasi tingkat kesehatan bank

BPR Konv. (54)	BPR Sy. (5)	Rekomendasi
20	4	Memotivasi/menekan BPR untuk secara serius meningkatkan tingkat kesehatannya
15	5	Penting u/ mengiformasikan ke publik karena kesehatan bank adalah faktor penentu kepercayaan masyarakat.
9	4	Memungkinkan perbandingan antar BPR dan pesaingan timbul persaingan sehat
5	3	Bank yg sehat membutuhkan keterbukaan, meningkatkan image bagi BPR Sehat.
		Jawaban Ya lainnnya, dlmbentuk rangking BPR; meninformasikan kemajuan dari bimbingan BI; Ya, hanya u/ diinformasikankepada nasabah saja; YA, terhadap laporan keuangan yang dipublikasi.
BPR (46)	**BPR Sy. (1)**	**KONTRA Arguments**
17	1	Rahasia dan kebutuhan internal antara BI & BPR
11	1	Menghambat peningkatan kesehatan bagi BPR KS dan TS
10	1	Memprovokasi bank untuk di-rush, dan mempengaruhi BPR lainnya.
3	1	Umumnya menyebabkan image BPR menjadi negatif
		Lainnya : Hasil penilaian BI bisa jadi salah; lebih baik mengenakan sanksi yg berat kpd BPR non Sehat; Masyarakat desa belum mengerti informasi kesehatan BPR; Laporan Laba Rugi telah dipublikasikan.

Tabel V.4a :
Pengawasan, Perlindungan Simpanan dan Assosiasi Berdasarkan Asset

	Jml BPR	Kelas Asset								Total	
		A		B		C		D			
	Konv.	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS
Jml BPR		29	3	28	0	36	3	21	0	114	6
BI Pengawasan lsg (on-Site sup.)											
Terakhir kali dilaksanakan											
% BPR < 1 thn yll	56	55,10	100,0	46,40	0,0	50,00	100,0	42,90	0,0	49,10	100,0
% BPR 1-2 thn yll	37	27,60	0,0	35,70	0,0	33,30	0,0	33,30	0,0	32,50	0,0
% BPR > 2 thn yll	21	17,20	0,0	17,90	0,0	16,70	0,0	23,80	0,0	18,40	0,0
Rata2 hari pemeriksaan	114	3,30	3,5	3,90	0,0	3,80	5,3	3,90	0,0	3,70	4,6
% BPR 1-2 hari	18	25,00	0,0	13,80	0,0	8,30	0,0	19,00	0,0	15,80	0,0
% BPR 3-4 hari	72	50,00	100,0	72,40	0,0	77,80	33,3	42,90	0,0	63,20	60,0
% BPR 5-7 hari	24	25,00	0,0	13,80	0,0	13,90	66,7	38,10	0,0	21,10	40,0
Rata2 jml pengawas	114	2,00	2,5	2,10	0,0	2,40	2,0	2,70	0,0	2,30	2,2
% BPR 2 pengawas	79	92,90	50,0	85,70	0,0	58,30	100,0	38,10	0,0	69,90	80,0
% BPR 3-4 pengawas	34	7,10	50,0	14,30	0,0	41,70	0,0	61,90	0,0	30,10	20,0
Meneriman LHP (% BPR)	109	96,60	100,0	92,90	0,0	94,40	66,7	100,00	0,0	95,60	83,3
Publikasi TKS hsl pmrksn (% BPR Setuju)	58	48,30	66,7	37,90	0,0	50,00	100,0	71,40	0,0	50,40	83,3
Diaudit oleh accountant public											
% BPR yg blm diaudit	95	82,80	66,7	93,10	0,0	91,70	33,3	52,40	0,0	82,60	50,0
% BPR < 1 thn yll	14	3,40	100,0	3,40	0,0	5,60	50,0	47,60	0,0	12,20	83,3
% BPR> 1 thn yll	6	13,80	0,0	3,40	0,0	2,80	50,0	-	0,0	5,20	16,7
Perlindungan simpanan											
U/ mengukur keamanan simpanan:											
% BPR yg menekankan pentingnya jmnn simp.	47	48,3	100,0	38,0	0,0	42,9	100,0	33,3	0,0	41,2	100,0
% BPR: asuransi simpanan	8	10,3	0,0	6,9	0,0	8,6	0,0	-	0,0	7,0	0,0
% BPR: ukuran pencegahan	47	51,7	0,0	62,0	0,0	57,1	33,3	76,7	0,0	58,8	16,7
% BPR: kombinasi dari keduanya	39	38,0	100,0	31,1	0,0	32,3	66,7	33,3	0,0	34,2	83,3
Pengelola asuransi simp.											
% BPR: Pemerintah	54	64,3	33,3	41,4	0,0	37,1	66,6	52,4	0,0	47,8	66,7
% BPR: Bank Indonesia	26	14,3	33,3	24,1	0,0	28,6	33,3	23,8	0,0	23,0	16,7
% BPR: Institusi khusus	18	14,3	33,3	20,7	0,0	20,0	0,0	4,8	0,0	15,9	16,7
% BPR: Kerjasama antar BPR	9	7,1	0,0	6,9	0,0	5,7	0,0	14,3	0,0	8,0	0,0
% BPR: BPR dan Pemerintah	6	-	0,0	6,9	0,0	8,6	0,0	4,8	0,0	5,3	0,0
Siap membayar premi asuransi (% BPR)	110	93,1	100,0	100,0	0,0	94,4	100,0	95,2	0,0	95,7	100,0
Asosiasi BPR											
% BPR yang menjadi anggota	109	86,2	100,0	93,1	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	94,8	100,0
Siap membayar iuran					0,0						
Rata2 Iuran ang. blnan (Rp.000)	103	31,2	23,3	39,1	0,0	40,3	35,0	42,8	0,0	38,1	28,0
% BPR: bayaran u/ jasa khusus	105	86,2	100,0	89,7	0,0	83,3	100,0	81,0	0,0	85,2	100,0

Tabel V.5a :
Pengawasan, Perlinungan Simpanan dan Asosiasi
Berdasarkan kinerja Kredit

	Jml BPR	Kelas Kinerja Kredit								Total	
		A		B		C		D			
	Konv.	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS	BPR Konv.	BPRS
Jml BPR		39	2	15	1	31	2	29	1	114	6
BI on-Site supervision											
Terakhir kali dilaksanakan											
% BPR < 1 thn yll	56	48,8	100,0	40,0	100,0	48,4	50,0	55,2	100,0	49,1	100,0
% BPR 1-2 thn yll	37	35,9	0,0	40,0	0,0	19,4	50,0	37,9	0,0	32,5	0,0
% BPR > 2 thn yll	21	15,4	0,0	20,0	0,0	32,3	0,0	6,9	0,0	18,4	0,0
Rata2 hari pemeriksaan	114	3,4	5,0	3,7	4,0	4,0	4,0	3,9	4,0	3,7	4,6
% BPR 1-2 hari	18	20,5	0,0	20,0	0,0	9,7	0,0	13,8	0,0	15,8	0,0
% BPR 3-4 hari	72	64,1	50,0	53,3	100,0	64,5	50,0	65,5	100,0	63,2	60,0
% BPR 5-7 hari	24	15,4	50,0	26,7	0,0	25,8	50,0	20,7	0,0	21,1	40,0
Rata2 jml pengawas	114	2,3	2,0	2,3	2,0	2,4	2,0	2,2	3,0	2,3	2,2
% BPR 2 pengawas	79	65,8	100,0	73,3	2,0	67,7	100,0	75,9	0,0	69,9	80,0
% BPR 3-4 pengawas	34	34,2	0,0	26,7	0,0	32,3	0,0	24,1	100,0	30,1	20,0
LHP diterima (% BPR)	109	89,7	100,0	100,0	100,0	96,8	50,0	100,0	100,0	95,6	100,0
Publikasi TKS hsl pemerik. (Setuju % BPR)	58	52,5	100,0	66,7	100,0	41,9	100,0	48,3	100,0	50,4	83,3
Diaudit o/ akuntan publik											
% BPR yg blm diaudit	95	75,0	50,0	93,3	100,0	83,9	0,0	86,2	100,0	82,6	50,0
% BPR < 1 thn yll	14	20,0	50,0	-	0,0	12,9	50,0	6,9	0,0	12,2	33,3
% BPR > 1 thn yll	6	5,0	0,0	6,7	0,0	3,2	50,0	6,9	0,0	5,2	16,7
Perlindungan simpanan											
U/ mengukur keamanan simpanan:											
% BPR yg menekankan pentingnya jmnn simp.	47	41,1	100,0	40,0	100,0	35,5	100,0	48,3	100,0	41,2	100,0
% BPR: asuransi simpanan	8	2,6	0,0	20,0	0,0	-	0,0	13,8	0,0	7,0	0,0
% BPR: ukuran pencegahan	47	58,9	50,0	60,0	0,0	64,5	0,0	51,7	0,0	58,8	16,7
% BPR: kombinasi dr diatas	39	38,5	50,0	20,0	100,0	35,5	100,0	34,5	100,0	34,2	83,3
Organisasi asuransi simp.											
% BPR: Pemerintah	54	60,0	100,0	40,0	0,0	33,3	50,0	50,0	100,0	47,8	66,7
% BPR: Bank Indonesia	26	15,0	0,0	33,3	100,0	30,0	0,0	21,4	0,0	23,0	16,7
% BPR: Institusi khusus	18	12,5	0,0	6,7	0,0	23,3	50,0	17,9	0,0	15,9	16,7
% BPR: Kerjasama BPR	9	7,5	0,0	6,7	0,0	10,0	0,0	7,1	0,0	8,0	0,0
% BPR: BPR dan Pemerintah	6	5,0	0,0	13,3	0,0	3,3	0,0	3,6	0,0	5,3	0,0
Siap membayar premi asuransi (% BPR)	110	95,0	100,0	93,3	100,0	96,8	100,0	96,6	100,0	95,7	100,0
Asosiasi BPR											
% BPR yg menjadi anggota	109	92,5	100,0	93,3	100,0	93,5	100,0	100,0	100,0	94,8	100,0
Siap membayar iuran											
Iuran blnan rata2 (Rp.000)	103	37,4	35,0	36,2	0,0	43,5	22,5	34,6	25,0	38,1	28,0
% BPR: Bayaran u/ jasa khusus	105	87,5	100,0	93,3	100,0	80,6	100,0	82,8	100,0	85,2	100,0

https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/5
DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Tabel V.6a :
Fungsi dan Jasa yang diharapkan oleh Asosisasi BPR

BPR Konv. (105)	BPR Sy. (6)	Fungsi dan Jasa
50	6	Memfokuskan diri pada Sumber Daya Manusia BPR dengan mengkoordinir / menyediakan training.
22	6	Menyediakan jasa konsultasi, khususnya pada BPR yang berkinerja buruk
18	4	Mengorganisasikan dan menyalurkan kepentingan dan aspirasi seluruh anggotanya
17	1	Menidentifikasi dan memfasilitasi akses terhadap dana murah
13	-	Mengorganisasikan pertukaran informasi melalui media yang beragam
9	3	Mengukung peningkatan image BPR / termasuk memprosikan BPR syariah (pada BPR syariah)
7	2	Mengembangkan/memfasilitasi bentuk dari lembaga perlidungan/ penjaminan simpanan, atau mendelegasikan kepengawas/ akuntan publik
3	-	Memfasilitasi kerjasama antar BPR
3	-	Membangun sistem informasi (seperti DKM Bank Indonesia) peminjam-peminjam nakal
3	-	Mengembangkan standar pengajian dan sistem kerja
2	-	Berfungsi sebagai pengawas BPR, menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia